****

**REGULASI *INDEPENDENT POWER PRODUCERS* (IPPs) : SEBUAH STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN *POWER PURCHASE AGREEMENT* (PPA) DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**Ng, Sunarni Ekaputri, S.H.**

**11010116410051**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

**196110051986031002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

****

**REGULASI *INDEPENDENT POWER PRODUCERS* (IPPs) : SEBUAH STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN *POWER PURCHASE AGREEMENT* (PPA) DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan**

**Program Magister Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**Ng, Sunarni Ekaputri, S.H.**

**11010116410051**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**

**196110051986031002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2018**

**Halaman Pengesahan Tesis**

**REGULASI *INDEPENDENT POWER PRODUCERS* (IPPs) : SEBUAH STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN *POWER PURCHASE AGREEMENT* (PPA) DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tangal 11 Januari 2018**

Disusun Oleh :

Ng, Sunarni Ekaputri, S.H.

11010116410051

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing  Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.  NIP. 196110051986031002 | Mengetahui  Ketua Program Magister Ilmu Hukum  Universitas Diponegoro  Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.  NIP. 197002021994041001 |

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama Mahasiswa : Ng, Sunarni Ekaputri

NIM : 11010116410051

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Program Kajian : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Judul Tesis : Regulasi *Independent Power Producers* (IPPs) : Sebuah Studi Komparatif Berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Telah Diuji dan Berhasil dipertahankan di Hadapan Dosen Penguji

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2018

**Dosen Penguji**

1. Pembimbing : Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)
2. Penguji I : Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)
3. Penguji II : Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Ditetapkan di Semarang.

**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Karya Ilmiah/Tesis dengan judul “**REGULASI *INDEPENDENT POWER PRODUCERS* (IPPs) : SEBUAH STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN *POWER PURCHASE AGREEMENT* (PPA) DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT**” ini tidak terdapat pada karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara terang dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Dengan ini, penulis juga menyatakan tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian untuk kepentingan akademik/ilmiah yang bersifat non komersial.

Semarang,

Penulis

Ng, Sunarni Ekaputri, S.H.

NIM. 11010116410051

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “**REGULASI *INDEPENDENT POWER PRODUCERS* (IPPs) : SEBUAH STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN *POWER PURCHASE AGREEMENT* (PPA) DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT**”.

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulisan tesis ini juga bertujuan untuk memberikan sumbagan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya ilmu hukum bidang perjanjian, pengaturan infrastruktur oleh pihak swasta, dan penyelesaian sengketa antara penjual dan pembeli listrik berdasarkan perjanjian, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam sektor ketenagalistrikan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, arahan serta dukungan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.** selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. **Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dipongero.
3. **Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Dipongero.
4. **Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Dipongero, Dosen Wali, dan Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran maupun kritik yang membangun dalam penyusunan tesis ini.
5. **Dr. Joko Setiyono, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris II Bidang Umum dan Keuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Dipongero.
6. **Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.**, selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk membimbing, memberi petunjuk, saran serta kritik yang sangat berarti bagi penulis dan mengarahkan penulis dengan sabar dalam penyusunan tesis ini. Hingga dalam penyusunan tesis ini menjadi lebih sistematis, jelas, dan tentunya membantu penulis dalam mencari literatur yang sesuai dengan pembahasan yang dibahas pada skripsi ini.
7. **Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**, selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran maupun kritik yang membangun dalam penyusunan tesis ini.
8. Para Guru Besar dan Staff Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
9. Bapak **Dr. I Gusti Bagus Suryawan, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. I Made Sepud, S.H., M.H.** yang telah memberikan Surat Rekomendasi bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan studi Strata 2.
10. Bapak dan Ibu Staff pengajaran dan karyawan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang selama ini banyak membantu kelancaran proses perkuliahan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
11. Bapak dan Ibu Staff perpustakaan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Perpustakaan Universitas Diponegoro yang selama ini telah membantu penulis dalam mencari literatur yang dibutuhkan untuk penulisan tesis ini.
12. Ayahanda tercinta **Andi Widjaja**, Ibunda tercinta **Sumiaty Susanto**, Kakak dan Adik terkasih, **Sunaryo, S.Kom.**, dan **Ivy Puteri Wijaya** yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil sehingga tesis ini dapat selesai disusun.
13. Sahabat-sahabat terkasih **Dian Nugraheni Widiyantoro, S.E.**, **Hilda Marisa Putri, S.H.**, **Yunieka Kristanto, S.S.**, **Gusti Ayu Oka Risdayanthi, S.Pi.**, **Ni Luh Putu Arista Suparini, S.E.**, dan **Ni Komang Ari Krisnawati, S.E.** yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai disusun.
14. Teman-teman seperjuangan HEB Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro angkatan 2016, khususnya **Margaretha Rosa Anjani, S.H.**, yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan dorongan semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga apa yang penulis paparkan di dalam tesis ini dapat bermanfaat sebagai salah satu wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Semarang,

Penulis,

Ng, Sunarni Ekaputri, S.H.

**ABSTRAK**

**REGULASI *INDEPENDENT POWER PRODUCERS* (IPPs) : STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN *POWER PURCHASE AGREEMENT* (PPA) DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT**

Indonesia sebagai negara berkembang dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo melakukan percepatan pembangunan infrastruktur khususnya dibidang ketenagalistrikan. Penyediaan infrastruktur dalam bidang ketenagalistrikan mulai dibuka bagi pihak swasta melalui mekanisme *Independent Power Producers* (IPPs). Sedangkan di Amerika Serikat (AS) sebagai negara maju telah mulai mengatur sektor ketenagalistrikan dari tahun 1978. Hingga saat ini IPPs di AS telah bisa mencukupi kebutuhan listrik dan mulai mengutamakan pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan.

Penelitian ini membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan IPPs, *Power Purchase Agreement* (PPA), dan Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan AS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami persamaan maupun perbedaan dari perbandingan pengaturan IPPs, *Power Purchase Agreement* (PPA), dan Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan AS berdasarkan teori perbandingan hukum, teori-teori perjanjian, dan teori-teori penyelesaian sengketa.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum dan penelitian hukum melalui internet. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam rangka mengkaitkan persamaan dan perbedaan pengaturan baik dari Indonesia maupun AS berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil dari penelitian ini bahwa, Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki dasar hukum yang kuat berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan di masing-masing negara. Peraturan berkaitan dengan isi PPA antara Indonesia maupun AS telah mengatur hal-hal pokok yang serupa, namun di Indonesia masih kurang rinci berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian apabila dibandingkan dengan PPA Amerika Serikat. Hal ini merupakan hal yang wajar karena Indonesia merupakan negara berkembang sedangkan Amerika Serikat sudah sebagai negara maju. Melalui penelitian ini dapat diketahui perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat khususnya dalam sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan hasil dari perbandingan pada penelitian ini maka diharapkan Indonesia dapat berkembang menuju ke pengaturan yang lebih baik lagi khususnya dalam sektor ketenagalistrikan dengan mekanisme IPPs.

**Kata Kunci : Independent Power Producers (IPPs), Power Purchase Agreement (PPA), Indonesia, Amerika Serikat**

**ABSTRACT**

***INDEPENDENT POWER PRODUCERS* (IPPs) REGULATION : COMPARATIVE STUDY BASED ON POWER PURCHASE AGREEMENT IN INDONESIA AND IN UNITED STATES OF AMERICA**

Indonesia as a developing country under the leadership of President Joko Widodo accelerate the development of infrastructure, especially in the field of electricity. Provision of infrastructure in the electricity sector was opened to private parties through the mechanism of Independent Power Producers (IPPs). While in the United States (US) as a developed country has begun to regulate the electricity sector from 1978. Until now IPPs in the US has been able to meet the needs of electricity and began to prioritize power plants using renewable energy.

This study discusses and analyzes comparisons of IPPs arrangements, Power Purchase Agreement (PPA), and Settlement of Disputes between Indonesia and the US. This study aims to analyze and understand the similarities and differences of comparison of IPPs arrangement, Power Purchase Agreement (PPA), and Settlement of Disputes between Indonesia and US based on comparative theory of law, covenant theories, and dispute resolution theories.

This research is normative law research using legal comparison method and legal research through internet. The approach used by the author in order to link the similarities and differences of arrangements both from Indonesia and the US based on legislation approach, conceptual approach, comparison approach, and historical approach. In this study the authors use primary, secondary, and tertiary legal materials.

The results of this study show that Indonesia and the United States have a strong legal basis with regard to the electricity sector in each country. Regulations relating to the content of PPA between Indonesia and the US have set out the same key points, but in Indonesia it is still less detailed in terms of matters governed by the agreement when compared to the United States PPA. This is a natural thing because Indonesia is a developing country while the United States is already a developed country. Through this research can be known the difference between Indonesia and the United States, especially in the electricity sector. Based on the result of comparison in this research, it is hoped that Indonesia can develop towards better arrangement especially in power sector with IPPs mechanism.

**Keywords : Independent Power Producers (IPPs), Power Purchase Agreement (PPA), Indonesia, United States of America**

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul…......................................................................................................i

Halaman Pengesahan …...........................................................................................ii

Lembar Keaslian Karya Ilmiah............................................................................…iv Kata Pengantar….....................................................................................................v

Abstrak…................................................................................................................ix

Abstract…...........................................................................................................….x

Daftar Isi…...........................................................................................................xi

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1

* 1. Latar Belakang...................................................................................................1
  2. Perumusan Masalah..........................................................................................13
  3. Tujuan Penelitian.............................................................................................13
  4. Manfaat Penelitian...........................................................................................14
  5. Kerangka Pemikiran.........................................................................................15
     1. Kerangka Konseptual...........................................................................16
     2. Kerangka Teoritik................................................................................17
  6. Metode Penelitian.............................................................................................29
     1. Pendekatan Penelitian..........................................................................31
     2. Spesifikasi Penelitian...........................................................................33
     3. Sumber dan Jenis Data.........................................................................34
     4. Teknik Pengumpulan Data...................................................................38
     5. Teknik Analisis Data............................................................................39
  7. Orisinalitas Penelitian......................................................................................40

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

* 1. Tinjauan Mengenai Perkembangan Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia dan di Amerika Serikat……………………………………………………………43
     1. Sejarah Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia……………………….43
     2. Sejarah Sektor Ketenagalistrikan di Amerika Serikat………………...52
  2. Tinjauan Mengenai Regulasi *Independent Power Producers* (IPPs) di Indonesia dan di Amerika Serikat……………………………………………………….59
     1. Regulasi *Independent Power Producers* (IPPs) di Indonesia…………59
     2. Regulasi *Independent Power Producers* (IPPs) di Amerika Serikat….70
  3. Tinjauan Mengenai Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Listrik di Indonesia dan di Amerika Serikat……………………………………………………………75
     1. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Listrik di Indonesia………………75
     2. Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Listrik di Amerika Serikat………84
  4. Tinjauan Mengenai Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Penjual dan Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik di Indonesia dan di Amerika Serikat………………………………………………………………..………95
     1. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Penjual dan Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik di Indonesia……………...…95
     2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Penjual dan Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik di Amerika Serikat………...104

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbandingan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat…………………………………………………………………….107

3.1.1 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) di Indonesia……………………………………………………………107

3.1.2 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) di Amerika Serikat…………………………………………………….121

3.1.3 Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) di Indonesia dan di Amerika Serikat………....178

3.2 Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat………...190

3.2.1 Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia……………………………………...190

3.2.2 P Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Amerika Serikat……………………………….232

3.2.3 Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat……………..239

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....................................................................................................247

4.2 Saran...............................................................................................................249

Daftar Pustaka.......................................................................................................xiv Lampiran…….....................................................................................................xxiii

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pada dasarnya listrik adalah energi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Aktivitas sehari-hari setiap individu tidak terlepas dari manfaat energi listrik. Saat ini perusahaan *Independent Power Producers* telah berdiri di Indonesia seperti Californian Energy, Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Edison Mission Energy, Chevron Geothermal Indonesia dan masih banyak perusahaan pembangkit tenaga listrik lainnya yang berbasis energi terbarukan maupun yang tidak.[[1]](#footnote-1)

Perusahaan swasta inilah yang akan memenuhi kebutuhan listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Perusahaan swasta di Indonesia dapat memproduksi tenaga listrik dengan memanfaatkan energi alternatif seperti angin, air, sinar matahari, maupun panas bumi yang ramah lingkungan atau menggunakan batubara maupun minyak. Pemanfaatkan panas bumi memang belum sepopuler dengan pemanfaatan energi alternatif untuk memproduksi listrik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I (pertama) 2017 berada di angka 5,01% (lima koma nol satu persen) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal I (pertama) 2016 dikisaran 4,92% (empat koma sembilan puluh dua persen) dan kuartal IV (keempat) sebesar 4,94% (empat koma sembilan puluh empat persen).[[2]](#footnote-2) Pada tahun 2016 pendapatan perkapita Indonesia mencapai USD 3.605,06 (tiga ribu enam ratus lima koma nol enam US dollar) atau senilai Rp 47,96 juta (empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).[[3]](#footnote-3) Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto Indonesia saat ini masih menjadi negara yang penduduknya berpenghasilan menengah atau *middle income trap.* Menurut beliau Indonesia dapat keluar dari zona *middle income trap*  pada tahun 2030 dengan tuntutan perekonomian nasional dapat tumbuh rata-rata antara 6-8% (enam sampai dengan delapan persen) pertahun.[[4]](#footnote-4) Fenomena *Middle Income Trap* adalah keadaan dimana negara berpenghasilan menengah tidak hanya mengalami kesulitan untuk bersaing dengan *high-technology countries.[[5]](#footnote-5)*

Salah satu upaya untuk mencapai pertumbuhan rata-rata 6-8% (enam sampai dengan delapan persen) pertahun, pemerintah telah menetapkan program prioritas infrastruktur melalui kebijakan ekonomi ke-19 (kesembilan belas) yang dikeluarkan oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia sejak 2014 lalu khususnya kebijakan ekonomi dalam aspek infrastruktur kelistrikan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi di Indonesia.[[6]](#footnote-6)

Pada tahun 2015-2019 pemerintah berkomitmen untuk membangun infrastruktur khususnya infrastruktur tenaga listrik dengan adanya Program Pembangkit Listrik 35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt).[[7]](#footnote-7) Program tersebut dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke.

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) dan swasta akan membangun 109 (seratus sembilan) pembangkit, masing-masing terdiri dari 35 (tiga puluh lima) proyek oleh PT PLN (Persero) dengan total kapasitas 10.681 MW (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh satu megawatt) dan 74 (tujuh puluh empat) proyek oleh swasta/*Independent Power Producers* (IPPs) dengan total kapasitas 25.904 MW (dua puluh lima ribu sembilan ratus empat megawatt) untuk merealisasikan Program Pembangkit Listrik 35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt). Dalam rangka mengukuhkan kebutuhan 35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt) tersebut pemerintah mengukuhkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dikeluarkan pada awal tahun 2016 oleh Presiden Joko Widodo mengupayakan berbagai isu yang mempengaruhi perkembangan proyek tenga listrik di Indonesia untuk mencapai program 35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt). Peraturan Presiden ini memberikan jaminan kepada Pemerintah untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik oleh PLN dan pihak swasta dalam proyek, penanganan izin, pembebasan lahan, dan berbagai masalah lainnya. Meskipun demikian, dalam mewujudkan program 35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt) ini memerlukan investasi baru yang besar dan kapasitas pembangkit tenaga listrik yang menggunakan bahan baku fosil dan energi terbarukan serta infrastruktur transmisi dan distribusi.

Pada bulan Juni 2016, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral baru saja menerbitkan Rencana Bisnis Penyediaan Tenaga Listrik 2016-2025. RUPTL 2016 bertujuan untuk mencapai rasio elektifikasi sebesar 99,7% (sembilan puluh sembilan koma tujuh persen) pada tahun 2025. Untuk mencapai tingkat elektrifikasi ini, PT PLN (Persero) dan Pihak Swasta mungkin perlu membangun setidaknya 80,5 GW (delapan puluh koma lima gigawatt) pembangkit listrik pada tahun 2025 dengan 18,2 GW (delapan belas koma dua gigawatt) pabrik yang direncanakan akan dibangun oleh PT PLN (Persero) dan 45,7 GW (empat puluh lima koma tujuh gigawatt) oleh Pihak Swasta. Untuk membangun kapasitas baru ini PT PLN (Persero) dan Pihak Swasta perlu menginvestasikan setidaknya US$ 319 miliar (tiga ratus sembilan belas miliar US dollar) dan US$ 78,2 miliar (tujuh puluh delapan koma dua miliar US dollar). Dengan demikian, maka untuk sepuluh tahun kedepan, sektor swasta akan memainkan peran yang lebih besar daripada sebelumnya di sektor listrik di Indonesia.

PT PLN (Persero) pada tanggal 17 Maret 2017 menandatangi 16 (enam belas) proyek kelistrikan. Proyek tersebut terdiri dari 1.825,5 MW (seribu delapan ratus dua puluh lima koma lima megawatt)pembangkit yang merupakan bagian dari program 35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt) dengan skema EPC (*Engineering, Procurement, Construction*)*,* serta proyek transmisi 500 kV (lima ratus kilo Volt) sepanjang 928 kms (sembilan ratus dua puluh delapan kilometer sirkit) di Jalur Utara Jawa. Proyek pembangunan ini direncanakan akan rampung pada tahun 2018, maka rencana pemerintah untuk mewujudkan target rasio elektrifikasi sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) pada 2019 dapat tercapai.[[8]](#footnote-8)

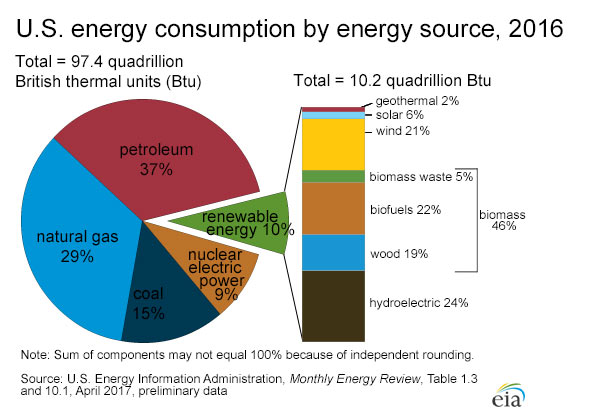
Pemerintah memberikan dukungan dengan menerbitkan dan memberlakukan sejumlah regulasi berkaitan dengan ketenagalistrikan agar proyek 35.000 MW (tiga puluh lima ribu megawatt) dapat terlaksana dalam rangka mempermudah pihak swasta karena keterlibatan pihak swasta/ IPPs sangat mutlak dibutuhkan. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5899 K/20/MEM/2016 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) tahun 2016-2025 telah menetapkan proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan.

Investasi swasta dalam kapasitas pembangkit tenaga listrik yang dimiliki oleh Pemerintah sejak tahun 2014, perlu meningkatkan tarif masuk yang harus dibayarkan oleh PT PLN (Persero) kepada Pihak Swasta dari berbagai bahan baku yang digunakan khususnya untuk pembangkit tenaga energi terbarukan, dan berusaha untuk mengurangi pembebasan lahan dan masalah-masalah lainnya. Sementara itu, proyek pembangkit listrik tenaga batu bara dalam skala besar, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga tambang batu bara, ada juga peluang untuk investasi swasta di proyek energi gas dan energi terbarukan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi diharapkan dapat menghidupkan kembali investasi energi panas bumi. Proyek air, solar, angin, dan biomassa dalam skala kecil juga diharapkan dapat menarik minat dari investor lokal maupun asing.

Target pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dapat tercapai melalui adanya tantangan pemerintah untuk mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) maupun non KPS (*Business to Business*). Untuk itulah diperlukan perbaikan iklim investasi dan promosi yang tepat dalam menarik calon penanam modal yang serius.

Kini, sumber energi yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik dapat dibedakan menjadi berbagai cara, termasuk didalamnya bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Sebagian besar pembangkit tenaga listrik di Amerika Serikat menggunakan fosil atau nuklir sebagai sumber energi yang dapat memberikan dampak yang merugikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan melalui emisi udara dan permasalahan lainnya. Terlepas dari adanya kemajuan dalam pengendalian polusi selama 30 (tiga puluh) tahun terakhir, pembangkit listrik konvensional masih merupakan satu-satunya sumber polusi udara industri terbesar di Amerika Serikat dan menjadi kontributor utama emisi gas rumah kaca.[[9]](#footnote-9)



**Gambar 1.1**

Berdasarkan bagan diatas, pada tahun 2016 Amerika Serikat memproduksi listrik menggunakan energi konvensional maupun energi terbarukan dengan total 97,4 *quadrillion British thermal units* (Btu). Namun hanya 10% (sepuluh persen) dari produksi listrik atau setara dengan 10,2 *quardrillion Btu* saja yang menggunakan sumber daya energi terbarukan, antara lain 2% (dua persen) *geothermal,* 6% (enam persen) *solar,* 21% (dua puluh satu persen) *wind,* 5% (lima persen) *biomass waste,* 22% (dua puluh dua persen) *biofuels,* 19% (sembilan belas persen) *wood,* dan 24% (dua puluh empat persen) *hydroelectric.* Sedangkan penggunaan sumber daya energi konvensional sebesar37% (tiga puluh tujuh persen) *petroleum,* 29% (dua puluh sembilan persen) *natural gas,* 15% (lima belas persen) *coal,* dan 9% (sembilan persen) *nuclear electric power.*[[10]](#footnote-10)

Sejarah sektor ketenagalistrikan di Amerika Serikat didominasi oleh utilitas besar yang terintegrasi secara vertikal dan sangat teratur. Karakteristik dari adanya monopoli secara alami dalam industri ini, kepentingan ekonomi merupakan hal yang utama, ditambah dengan kekhawatiran berkaitan dengan penyalahgunaan dan merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penyedia tenaga listrik menyebabkan peraturan pemerintah federal dari awal tahun 1978 membuat reformasi dan terbosan terkait dengan struktur dan operasi tradisional sektor swasta dalam industri ketenagalistrikan ini. Menjelang tahun 1990-an sebuah industri yang telah berubah mulai terbentuk dengan ditandai dengan peraturan yang dikombinasikan secara signifikan kalah dikarenakan orientasi lebih condong terhadap pasar. Berikut merupakan terjemahan dari pendapat yang disampaikan oleh John Kwoka[[11]](#footnote-11), bahwa :

*“For most of its history the U.S. electricity sector has been dominated by large, vertically integrated, and heavily regulated utilities. The natural monopoly characteristics of the industry, its enermous economic importance, plus concerns about corporate abuses and mergers led to state and federal regulation of investor-owned utilities and also to public ownership throughout much of the 20th century. Beginning in 1978, however, reforms made inroads on this traditional structure and operation of the private sector of this industry. By the late 1990s a transformed industry had started to take shape, characterized by substantial de-integration, signigicantly looser regulation, and more market-oriented operation.”*

Pasar listrik di Amerika Serikat saat ini telah menawarkan beragam cara yang lebih ramah lingkungan untuk memproduksi listrik. Bagaimanapun juga dengan memberikan sebanyak mungkin pilihan kepada konsumen untuk memilih bagaimana listrik yang akan digunakan oleh konsumen itu sendiri diproduksi. Salah satu dari pilihan-pilihan tersebut adalah tenaga listrik yang berasal dari energi terbarukan atau yang dikenal sebagai “*green power*”.

Dibeberapa bagian Amerika Serikat, konsumen dapat membeli *green power* dari penyedia tenaga listrik mereka. Semua konsumen dapat membeli *green power* dalam bentuk *Renewable Energy Certificates* (RECs), yang tersedia secara nasional terlepas dari apakah penyedia listrik dalam lingkup lokal menyediakan produk *green power.*

Walaupun tidak ada bentuk pembangkit tenaga listrik yang benar-benar ramah lingkungan, listrik dihasilkan dari sumber daya terbarukan seperti tenaga surya, angin, panas bumi, air, dan biomassa telah terbukti lebih ramah lingkungan apabila dibandingkan dengan listrik yang dihasilkan oleh sumber daya konvensional seperti batubara, minyak, gas alam, dan nuklir.

Menurut *United States Environmental Protection Agency* (EPA), dalam perhitungan rata-rata, mengganti setiap kilowatt-hour (kWh) dari pembangkit listrik konvensional dengan pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan menghindari emisi lebih dari 1 (satu) pon karbon dioksida. Karena tenaga listrik yang tersebar keseluruh penjuru negeri, konsumen memiliki pengaruh yang sangat besar dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dari pembangkit listrik konvensional. Jika bangunan komersial beralih sepenuhnya ke listrik terbarukan, maka penggunaan *green power* akan memiliki dampak lingkungan yang menghindari emisi karbon dioksida hampir setara dengan 28 (dua puluh delapan) kendaraan setiap tahunnya.

Berbagai organisasi membeli *green power,* termasuk pemerindah federal, negara bagian, dan penduduk setempat yang berasal dari universitas, bisnis, organisasi nirlaba maupun konsumen secara individual. Dengan membeli *green power* telah membantu lingkungan dan memenuhi tujuan mereka sendiri, seperti keuntungan finansial, tunjangan hubungan masyarakat, dan bahkan juga memberi manfaat kepada keamanan nasional. Pada tahun 2008, pembangkit listrik energi terbarukan di Amerika Serikat tidak termasuk PLTA setara dengan 124 (seratus dua puluh empat) juta *megawatt-hours* telah cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik tahunan di Amerika Serikat hampir sekitar 12 (dua belas) juta rumah.[[12]](#footnote-12)

Amerika Serikat menerapkan regulasi mengenai energi terbarukan maupun energi konvensional tidak hanya dengan mendorong konsumsi dari masyarakat, namun juga menciptakan struktur yang memisahkan antara konsumen dan informasi yang lengkap terhadap dampak yang akan terjadi dari pilihan mereka untuk menggunakan sumber daya energi apa untuk menghasilkan listrik bagi kebutuhan mereka. Dengan adanya pengaturan mengenai sumber daya energi, maka akan dapat memberikan hasil akhir dan produk terbaik bagi para konsumen terlepas dari kompleksitas dan besarnya kapasitas sistem yang digunakan oleh pemerintah. Dengan meminimalkan harga listrik, maka tercipta ilusi terkait dengan persediaan energi yang pada dasarnya tidak terbatas dan menimbulkan kesan bahwa bahan bakar untuk transportasi tidak lagi dijatah oleh pemerintah. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Lincoln L. Davies[[13]](#footnote-13), bahwa :

*“Energy law, moreover, does not simply promote consumption. By creating structures that divorce energy consumers from complete information about the full effects of their choices, the law perpetuates and reinforces the structure of the energy system itself, which delivers a convenient end and product to consumers, who are insulated from the complexity and immensity of the system they are using. Thus energy law embraces a kind of gospel of the infinity while clinging to a dogma of invisibility. By seeking to make sure the lights never fo out and that transport fuel is never again rationed, the law creates an illusion for cinsumers that energy supplies are essentially limitless or ought to be. By minimizing prices and treating energy as much a public good as an economic commodity, the law dampens and hides economic signals, making energy and energy use virtually imperceptible.”*

Sebagian besar negara bagian di Amerika Serikat telah mewajibkan untuk memasok sebagian listrik mereka dari sumber energi yang terbarukan. Mandat dari negara bagian ini dikenal dengan *compliance markets* yang memerlukan persentase dari campuran pasokan listrik dari energi terbarukan dan pasokan listrik konvensional, jadi secara tidak langsung para konsumen telah “menghijaukan” listrik yang digunakan sehari-hari. Namun, pemerintah Amerika Serikat masih berusaha untuk mengarahkan masyarakatnya untuk membeli *green power* melalui berbagai cara salah satunya adalah dengan mempromosikan pengembangan *green power* yang inovatif. Dengan adanya pembelian *green power* secara sukarela, maka hal tersebut akan memainkan peran yang penting dalam mendorong pengembangan pasar dan diharapkan menjadi bagian yang penting dari pasar di masa yang akan datang.

Perbandingan hukum Indonesia sebagai negara berkembang dan Amerika Serikat sebagai negara maju dirasa perlu untuk diteliti karena penulis beranggapan bahwa Indonesia sebagai negara yang berkembang seharusnya berkembang kearah yang lebih baik lagi dengan melakukan perbandingan dengan negara yang sudah maju yaitu Amerika Serikat.

Kelebihan yang ada pada pengaturan di Amerika Serikat khususnya berkaitan dengan *Independent Power Producers* (IPPs) berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) dan penyelesaian sengketa antara *seller* dan *buyer*. Hal tersebut tentunya dengan harapan bahwa Indonesia dapat mempelajari kekurangannya dari perbandingan regulasi di Amerika Serikat hingga saat ini Amerika Serikat telah menjadi negara maju yang juga telah memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk berinvestasi dalam bidang penjualan generator listrik secara swasta.

Namun, hal-hal tersebut diatas tentunya tidak terlepas dari keadaan sosial-ekonomi masing-masing negara, daya beli masyarakat, dan keadaan serta kesadaran lingkungan masing-masing penduduk di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pengaturan *Independent Power Producers* (IPPs) antara kedua negara ini berbeda. Penulis berharap agar Indonesia dapat berkembang kearah yang jauh lebih baik dan lebih efektif dalam bidang ketenagalistrikan dengan adanya perbandingan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat terkhusus dalam perbandingan berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) atau yang dikenal Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Indonesia.

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan pengaturan *Independent Power Producers* (IPPs) berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat?
2. Bagaimana perbandingan penyelesaian sengketa antara *seller* dan *buyer* selaku para pihak dalam *Power Purchase Agreement* (PPA) berdasarkan yurisdiksi Indonesia dan Amerika Serikat?
   1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian.
2. Untuk menganalisis dan memahami persamaan dan perbedaan pengaturan *Independent Power Producers* (IPPs) di Indonesia dan di Amerika Serikat.
3. Untuk menganalisis dan memahami persamaan dan perbedaan pengaturan *Independent Power Producers* (IPPs) berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat.
4. Untuk memahami persamaan dan perbedaan penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam berdasarkan yurisdiksi Indonesia maupun Amerika Serikat.
   1. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bermanfaat untuk :

1. Untuk menjadi salah satu referensi penjelasan hukum bagi akademisi dan masyarakat luas terkait dengan *Independent Power Producers* (IPPs) di Indonesia dan di Amerika Serikat.
2. Untuk menjadi salah satu referensi penjelasan hukum bagi calon investor swasta dalam bidang *Independent Power Producers* (IPPs) berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat.
3. Untuk menjadi salah satu referensi penjelasan hukum bagi investor swasta dalam bidang *Independent Power Producers* (IPPs) berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia apabila terjadi perselisihan.

Untuk memahami kelebihan maupun kekurangan pengaturan masing-masing Negara yaitu Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang *Independent Power Producers* (IPPs), *Power Purchase Agreement* (PPA), dan penyelesaian sengketa masing-masing negara.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan Amerika Serikat

*Independent Power Producers* Amerika Serikat

*Power Purchase Agreement* Amerika Serikat

Penyelesaian Sengketa antara *seller* dan *buyer* di Amerika Serikat

Ketenagalistrikan Indonesia

*Independent Power Producers* Indonesia

*Power Purchase Agreement* Indonesia

Penyelesaian Sengketa antara *seller* dan *buyer* di Indonesia

Teori Perbandingan Hukum

Teori-teori berkaitan dengan perjanjian

Teori-teori berkaitan dengan penyelesaian sengketa

Perbandingan Hukum untuk mendapatkan jawaban pertama, kedua, dan ketiga.

**Gambar 5.1**

Pada dasarnya kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian hukum ini yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan dengan menggunakan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan ini akhirnya melahirkan kesimpulan.[[14]](#footnote-14) Penelitian hukum ini membahas mengenai regulasi *Independent Power Producers* (IPPs) berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) dengan perbandingan antara Indonesia sebagai negara berkembang dan Amerika Serikat sebagai negara maju yang dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi negara berkembang agar dapat menemukan regulasi yang lebih efektif dan efisien dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia khususnya infrastruktur tenaga listrik.

* + 1. **Kerangka Konseptual**

Regulasi adalah pengaturan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau dapat juga seabgai tindakan yang mengatur, hal ini sesuai dengan pengertian *regulation* menurut *Oxford Paperback Dictionary & Thesaurus*.[[15]](#footnote-15) Penelitian hukum ini juga menggunakan objek kajian berupa norma atau kaidah dan perbandingan hukum. *Independent Power Producers* (IPPs) adalah perusahaan produsen listrik swasta yang dibentuk oleh konsosium untuk melakukan perjanjian *Power Purchase Agreement* dengan PT PLN (Persero). Studi komparatif merupakan sebuah studi yang membandingkan pengaturan hukum antara satu negara dengan negara lainnya, dalam hal ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan, *Power Purchase Agreement* (PPA) adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara perusahaan produsen listrik swasta (IPPs) dan PT PLN (Persero).[[16]](#footnote-16)

Perbandingan hukum diatas dianalisa berdasarkan teori-teori maupun asas yang berkaitan dengan kontrak dan teori-teori yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi diantara pihak swasta selaku penjual (*seller*) dan PT PLN (Persero) selaku pembeli (*buyer*).

* + 1. **Kerangka Teoritik**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perbandingan hukum, teori kontrak dan teori penyelesaian sengketa. Dalam teori perbandingan hukum, istilah “perbandingan hukum” bukan merupakan “hukum perbandingan”. Perbandingan hukum tidak seperti hukum perdqqata, hukum pidana, hukum tata negara[[17]](#footnote-17), melainkan merupakan kegiatan membandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Membandingkan yang dimaksud disini adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan memberi penjelasannya dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktik serta faktor-faktor non-hukum yang mana saja yang mempengaruhinya.[[18]](#footnote-18) Menurut Van Apeldoorn yang dikutip oleh Djaja S. Meliala penjelasan perbandingan hukum hanya dapat diketahui dalam sejarah hukumnya, sehingga perbandingan hukum yang ilmiah memerlukan perbandingan sejarah hukum.[[19]](#footnote-19) Jadi, dalam membandingkan hukum bukanlah sekedar untuk mengumpulkan peraturan perundang-undangan saja dan hanya mencari perbedaan serta persamaannya, akan tetapi perhatian yang paling mendasar dalam perbandingan hukum ditujukan kepada pertanyaan sampai seberapa jauh peraturan perundang-undangan atau kaidah yang tidak tertulis itu dilaksanakan di dalam masyarakat. Untuk itu dicarilah perbedaan dan persamaan. Dari perbandingan hukum ini dapat diketahui bahwa disamping banyaknya perbedaan dan juga ada kesamaannya.

Teori kontrak adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hubungan atau persetujuan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak yang lain berhak atas sesuatu.[[20]](#footnote-20) Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.[[21]](#footnote-21) Teori-teori yang menganalisis tentang kontrak menurut para ahli[[22]](#footnote-22), antara lain :

1. Teori Momentum Terjadinya Kontrak (*theory momentum the occurrence of contract*);[[23]](#footnote-23)

Vollmar, H.F.A. berpendapat bahwa teori ini menganalisis dan mengkaji tentang saat terjadinya kontrak yang dibuat oleh para pihak. Dalam berbagai literatur disebutkan 4 (empat) teori yang membahas tentang momentum terjadinya kontrak, yaitu :[[24]](#footnote-24)

1. Teori Pernyataan;

Kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat ditandatanganinya perjanjian untuk menyatakan menerima, kesepakatan telah terjadi. Namun teori ini memiliki kelemahan karena sangat teoritis dan terjadinya kesepakatan dianggap secara otomatis.

1. Teori Pengiriman;

Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Bisa saja, walau sudah dikirim tetapi tidak diketahui oleh pihak yang menawarkan. Teori ini juga dianggap sangat teoritis karena terjadinya kesepakatan dianggap terjadi secara otomatis.

1. Teori Pengetahuan; dan

Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Kritik terhadap teori ini, bagaimana ia mengetahui isi penerimaan apabila belum menerima.

1. Teori Penerimaan.

Penerimaan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.

1. Menurut Van Dunne dan Van der Burght dikenal juga 3 (tiga) teori yang menganalisis tentang ketidaksesuaian antara kehendak dan kenyataan, meliputi :[[25]](#footnote-25)
2. Teori Kehendak;

Perjanjian terjadi apabila ada persetujuan antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Kelemahan teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan.

1. Teori Pernyataan; dan

Kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.

1. Teori Kepercayaan.

Tidak setiap pernyataan itu benar-benar dikehendaki, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kelemahan teori ini adalah kepercayaan sulit dinilai.

1. Teori Kontrak yang Berkaitan dengan Kewajiban Para Pihak (*theories of contractual obligation*)

Teori ini merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Randy E. Barnett mengemukakan 3 (tiga) kelompok teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, yaitu :[[26]](#footnote-26)

1. Teori Berdasarkan Para Pihak (*party-based theories*)

Didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam teori ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, meliputi :

1. Teori Kehendak (*will theories*)

Pernyataan dapat diberlakukan atau dilaksanakan karena *promisor* menghendaki atau memilih untuk terikat pada pernyataannya. Menurut pandangan klasik, hukum kontrak memberikan ekspresi dan melindungi kehendak para pihak. Kehendak adalah sesuai yang layak dihormati. Teori ini difokuskan pada kehendak dari para pihak.

1. Teori Ketergantungan (*reliance theories*)

Teori yang menjelaskan kewajiban kontraktual para pihak sebagai upaya untuk melindungi ketergantungan dari *promisee* (orang yang ditujukan terhadap kehendak atau niat tersebut) pada pihak lainnya.

1. Teori Berdasarkan Standar Penilaian (*standartds-based theories*)

Teori yang mengevaluasi atau menilai substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, apakah sesuai dengan standar penilaian. Standar utama untuk melakukan penilaian, yaitu pada efisiensi ekonomi dan keadilan substantif. Teori ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Teori Efisiensi (*efficiency theories*)

Upaya untuk memaksimalkan beberapa konsep antara kekayaan sosial atau kesejahteraan. Istilah efisiensi merujuk pada hubungan antara kemanfaatan dan biaya secara keseluruhan.

1. Teori Kewajaran Substantif (*substantive fairness theories*)

Menganalisis dan mengkaji atau mengevaluasi standar nilai pada substansi kontrak secara objektif, apakah kontrak tersebut sudah adil atau tidak.

1. Teori Berdasarkan Proses (*process-based theories*)

Difokuskan pada prosedur atau proses dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, serta menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada.

1. Teori Penawaran sebagai Pertimbangan (*The Bargain Theory of Consideration*)

Teori yang dikembangkan oleh Holmes dan Langdell ini menganalisis tentang proses tawar menawar dalam kaitannya dengan objek perjanjian (konsiderasi atau prestasi).

1. Teori Kontrak Subjektif

Wayne Barnes mengemukakan teori yang berkembang pada abad ke-19 ini bahwa :[[27]](#footnote-27)

“*The subjective theory, which is said to be represented by the French Legal System is concerned with the actual meeting of the minds or literal intentions of the parties. Both parties had to actually essent to an agreement for there to be a contract and external manifestations of assent are taken merely as evidence of the actual intent of the contracting parties. Proponents of this theory only wish to bind those who clearly and subjectively intended to be bound and accordingly promote the freedom of contract above all other principles. They response on the contention that individuals need not be compelled to perform an obligation to which they haven’t given their consent.*”

Wayne Barnes mengemukakan bahwa *subjective theory of contract* difokuskan pada bertemunya kehendak atau keinginan para pihak. Para pihak harus benar-benar menyetujui kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya. Teori kontrak ini hanya mengikat orang-orang yang telah ditentukan secara jelas dan subjeknya bertujuan mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya. Dengan demikian, kebebasan para pihak di atas segala-galanya.

1. Teori Kontrak Objektif

Wayne Barnes juga mengemukakan tentang pengertian dan fokus teori kontrak objektif, ia mengemukakan bahwa :[[28]](#footnote-28)

“*The central premise to the objective theory of contracts is that contractual assent is determined by analyzing external evidence, and evidence of subjective, internal intention is therefore unimportant. That is, contract formation is concerned with communication, not cognition. Thus, modern objective theory provides that objective manifestations of intent of [a] party should generally be viewed from the vantage point of a reasonable person in the position of the other party such as principles of fairness and protection of reliance, freedom of contract, and personal autonomy.*”

Dalam konstruksi ini, premis utama teori kontrak objektif adalah pada mengikatnya kontrak ditentukan dengan menganalisis dan mengkaji dari bukti-bukti atau petunjuk yang bersifat eksternal dan bukti-bukti subjektif. Niat para pihak tidak penting. Ini berarti bahwa pembentukan kontrak ditentukan oleh adanya komunikasi, bukan kognisi. Dalam teori kontrak objektif modern, bahwa maksud para pihak harus ditentukan dari sudut pandang yang wajar dalam posisi pihak lainnya.

1. Teori Kontrak Otonom (*autonomy of contract theory*)

Difokuskan pada pendekatan keadilan para pihak dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan kontrak. Andrew S. Gold membagi teori kontrak otonomi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :[[29]](#footnote-29)

1. *Promissory theories*

Mengikatnya kontrak karena adanya persetujuan para pihak. Persetujuan merupakan komponen dasar dari kontrak. Persetujuan itu sebagai dasar di dalam melaksankan hak dan kewajiban para pihak. Teori ini dibangun atas dasar pendekatan moral.

1. *Reliance theories*

Difokuskan pada kepentingan *promisse. Promisse,* yaitu orang menerima penawaran dari penawar (*promisor*). Idenya, bahwa *promisor* meminta kepada *promisee* untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya.

1. *Transfer theories*

Pelaksanaan kontrak dikarenakan *promisse* harus memindahkan atau melaksanakan kewajiban kontraktualnya.

1. Teori Overmacht

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang pembebasan kewajiban berprestasi dari debitur kepada kreditor yang disebabkan karena adanya keadaan memaksa. 2 (dua) teori yang membahas mengenai keadaan memaksa, antara lain :[[30]](#footnote-30)

1. Teori Ketidakmungkinan

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan “tidak mungkin” melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan. Ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, meliputi :

* + - * 1. Ketidakmungkinan absolut atau objektif

Suatu ketidakmungkinan sama sekali dari debitur untuk melakukan prestasinya kepada kreditur.

* + - * 1. Ketidakmungkinan relatif atau subjektif

Suatu ketidakmungkinan relatif dari debitur untuk memenuhi prestasinya.

1. Teori Penghapusan atau Peniadaan Kesalahan

Dengan adanya *overmacht* terhapuslah kesalahan debitur atau *overmacht* peniadaan kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh/bisa dipertanggungjawabkan.

Ralf Dahrendorf mengembangkan teori penyelesaian sengketa pada tahun 1958-an. Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa penyelesaian sengketa berorientasi pada struktur dan institusi sosial, sedangkan masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu sengketa dan konsensus. Simon Fisher, dkk menjabarkan 6 (enam) teori yang menganalisis tentang penyelesaian sengketa, antara lain : Teori Hubungan Masyarakat; Teori Negosiasi Prinsip; Teori Identitas; Teori Kesalahpahaman; Teori Transformasi Sengketa; dan Teori Kebutuhan Manusia. Sedangkan menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori yaitu Teori Strategi Penyelesaian Sengketa. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. mengemukakan pendapat mereka berkaitan dengan tujuh cara penyelesaian sengketa. Penjelasan dari teori-teori yang menganalisis tentang penyelesaian sengketa menurut para ahli tersebut[[31]](#footnote-31), yaitu :

1. Teori Sengketa;[[32]](#footnote-32)

Ralf Dahrendorf berpendapat bahwa teori sengketa menganalisis mengenai sengketa kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu.

1. Teori Konsensus;[[33]](#footnote-33)

Menurut Ralf Dahrendorf teori konsensus adalah teori yang menguji nilai integrasi dalam masyarakat.

1. Teori Hubungan Masyarakat;

Dalam teori hubungan masyarakat berpendapat bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami sengketa dan mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada di dalamnya.

1. Teori Negosiasi Prinsip;

Teori negosiasi prinsip menganggap bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah dikarenakan posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang sengketa oleh pihak-pihak yang mengalami sengketa.

1. Teori Identitas;

Teori identitas berasumsi (beranggapan) bahwa terjadinya sengketa disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

1. Teori Kesalahpahaman;

Teori kesalahpahaman antara budaya berasumsi bahwa sengketa terjadi disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.

1. Teori Transformasi Sengketa;

Teori transformasi sengketa terjadi disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

1. Teori Kebutuhan Manusia;

Teori kebutuhan manusia menurut Simon Fisher, dkk, yang dikutip oleh Imam Taufik berasumsi bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi sering merupakan inti pembicaraan.[[34]](#footnote-34)

1. Teori Strategi Penyelesaian Sengketa; dan

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin dalam teori strategi penyelesaian sengketa terdapat 5 (lima) strategi dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana disajikan berikut ini :[[35]](#footnote-35)

1. Pertama, *contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak lainnya.
2. Kedua, *yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kurang dari yang sebetulnya diinginkan.
3. Ketiga, *problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif memuaskan aspirasi kedua belah pihak.
4. Keempat, *with drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
5. Kelima, *inaction* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.
6. Teori Cara Penyelesaian Sengketa.

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. mengemukakan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat berdasarkan cara penyelesaian sengketa oleh masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, antara lain :[[36]](#footnote-36) membiarkan saja *(lumping it)*, mengelak *(avoidance)*, paksaan *(coercion)*, perundingan *(negotiation)*, mediasi *(mediation)*, arbitrase *(arbitration)*, dan peradilan *(adjudication)*.

* 1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode perbandingan hukum dan penelitian hukum melalui internet. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan karena penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan.

Adapula pengertian hukum normatif menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif pada hakikatnya merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.[[37]](#footnote-37)

Penulis akan memfokuskan pada objek kajian berupa norma atau kaidah dan perbandingan hukum. Objek kajian berupa norma atau kaidah adalah objek kajian yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan mentri energi dan sumber daya mineral, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dalam bidang ketenagalistrikan berdasarkan *power purchase agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat. Sedangkan objek kajian berupa penelitian perbandingan hukum menurut H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani adalah untuk mengetahui perbandingan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya. Tujuan perbandingan ini, yaitu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara sistem negara yang satu dengan negara yang lainnya.[[38]](#footnote-38)

Hal tersebut diatas sejalan dengan pendapat Jerome Hall yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang menyimpulkan bahwa dalam penelitian hukum normatif, perbandingan hukum merupakan suatu metode adalah “*comparative law is not a sociology or science of law expressed in universal causal generalizations that can be systematized and the prospect of its becoming such a science is very remote.”[[39]](#footnote-39)*

Sedangkan penelitian hukum melalui internet memberikan berbagai kemudahan terhadap penelitian hukum mengenai pengadilan, kasus hukum, jurnal hukum, dan sumber-sumber berita berkaitan dengan hukum seperti yang disampaikan oleh Valerie J. Atkinson Brown “*The Internet provides many resources to legal profesionals. After several years of substantial growth and development, the Internet can lead researchers to courts, cases, law review and new sources*”.[[40]](#footnote-40)

Stephen Elias dan Susan Levinkind dalam bukunya juga menyatakan bahwa melalui mesin pencari di internet, penulis dapat dengan mudah menemukan bahan-bahan hukum sesuai dengan bidang hukum tertentu yang akan dianalisa dan internet sangat berguna pada tingkatan apapun dalam penelitian hukum. Dalam bukunya beliau menyatakan “*The Internet is useful at every stage : when you are trying to get general information about a topic, when you are zeroing in on specific legal sources, and when you are trying to figure out what to do with the information you have uncovered. Many sites on the Internet provide one-stop shopping for statutes, important cases, regulations and commentary on a particular legal area*”.[[41]](#footnote-41)

* + 1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam rangka untuk mengkaitkan persamaan dan perbedaan pengaturan baik dari Indonesia maupun Amerika Serikat melalui metode penelitian normatif berdasarkan pendapat dari Jhonny Ibrahim dan Peter Mahmud Marzuki[[42]](#footnote-42) yang dikutip oleh H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani[[43]](#footnote-43), antara lain :

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*);

Menurut H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*);

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan melalui rujukan prinsip-prinsip hukum, prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam Undang-Undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut perlu memahami konsep tersebut melalui pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.

1. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Hal ini sejalan dengan pendapat Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi bahwa perbandingan hukum dilakukan dengan membandingkan undang-undang satu negara dengan negara lain atau putusan hakim satu negara dengan undang-undang negara lain mengenai perkara yang sama.[[44]](#footnote-44)

1. Pendekatan Historis (*historical approach).*

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

Penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis dalam rangka mengkaitkan persamaan maupun perbedaan pengaturan *Independent Power Producers* (IPPs) di Indonesia dan di Amerika Serikat berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) dan penyelesaian sengketa antara *seller* dan *buyer.*

* + 1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analisis adalah penggambaran keadaan objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.[[45]](#footnote-45) Bentuk penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.[[46]](#footnote-46)

Hasil penelitian ini akan menjadi suatu deskripsi dari mekanisme pengaturan *Independent Power Producers* berdasarkan peraturan perundang-undangan, *Power Purchase Agreement*, dan penyelesaian sengketa bagi para pihak apabila terjadi perselisihan. Dari perbandingan mengenai hal tersebut, akan diambil suatu kesimpulan yang bersifat analitis dengan menyesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada.

* + 1. **Sumber dan Jenis Data**

Penelitian hukum ini memfokuskan penelitian dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan perbandingan *Independent Power Producers (IPPs)* berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat dan penyelesaian sengketa antara *seller* dan *buyer.*

1. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Soetandyo Wignjosoebroto dalam bukunya bahwa bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara[[47]](#footnote-47), yaitu :
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung;
6. Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2006 jo. Nomor 04 Tahun 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga listrik dan atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 jo Nomor 70 Tahun 2010 tentang Kegiatan Geothermal;
10. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Panas Bumi;
11. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT PLN (Persero);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan telah direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 (perubahan pertama), Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 (Perubahan kedua), dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 (Perubahan ketiga);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Infrastruktur melalui *Public Private Partnership* (PPP);
14. *Federal Water Power Act of 1920;*
15. *Federal Power Act of 1935;*
16. *Public Utility Holding Company Act 1935;*
17. *Rural Electrification Act of 1936;*
18. *Natural Gas Act of 1938;*
19. *Atomic Energy Act of 1946;*
20. *Atomic Energy Act of 1954;*
21. *Energy Policy and Conservation Act of 1975;*
22. *Department of Energy Organization Act of 1977;*
23. *National Energy Act, incorporating : National Energy Conservation Policy Act, Power Plant and Industrial Fuel Use Act, Public Utilities Regulatory Policies Act, Energy Tax Act, Natural Gas Policy Act of 1978;*
24. *Energy Security Act, incorporating : U.S. Synthetic Fuels and Alcohol Fuels Act, Renewable Energy Resources Act, Solar Energy and Energy Conservation Act, Geothermal Energy Act, Ocean Thermal Energy Conversion Act of 1980;*
25. *Nuclear Waste Policy Act of 1982;*
26. *Energy Policy Act of 1992;*
27. *Energy Policy Act of 2005;*
28. *Energy Independence and Security Act, incorporating America Competes Act of 2007;*
29. *The Energy and Tax Extenders Act of 2008, incorporating : food, conservation, and Energy Act of 2008, Strategic Petroleum Reserve Fill Suspension and Consumer Protection Act, America Competes Act, Energy Improvement and Extension Act of 2008; dan*
30. *The American Recovery and Reinvestment Act of 2009.*
31. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah literatur, jurnal nasional maupun internasional, dan bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer sesuai dengan yang telah dicantumkan pada Daftar Pustaka. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri, namun secara formal tidak dapat dibilangkan sebagai hukum positif. Bahan hukum sekunder ini merupakan informasi yang sekalipun sarat dengan materi hukum, namun karena tidak/belum pernah diformalkan melalui proses positivisasi yang formal sebagai hukum, maka ketaatan kepadanya tidak pernah dijamin berdasarkan otoritas dan daya paksa aparat negara yang memiliki kewenangan resmi untuk penegakkannya.[[48]](#footnote-48)
32. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, dan *Black’s Law Dictionary*. Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum, dan semacamnya. Bahan hukum ini hanya dapat difungsikan sebagai sumber referensi yang menunjuk dan merujuk ke sumber-sumber yang secara positif lebih menegaskan atau mengisyaratkan adanya berbagai akibat hukum yang mungkin timbul dari terjadinya peristiwa-peristiwa hukum tertentu.[[49]](#footnote-49)
    * 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi beserta klasifikasi bahan hukum, pengutipan materi bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini, dan studi dokumenter untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu kutipan dan sistem kartu bibilografi.

Sistem Kartu Kutipan yaitu pencatatan atau pengutipan data berserta sumber dimana data tersebut diperoleh (nama, pengarang/penulis, judul buku atau artikel, halaman dan lain sebagainya). Selain sistem kartu kutipan digunakan juga Sistem Kartu Bibilografi, yaitu pencatatan sumber bacaan yang dipergunakan. Kartu ini berguna dalam penelitian untuk menyusun daftar kepustakaan sebagai bahan penutup dari laporan penelitian yang ditulis. Kedua sistem ini merupakan sistem kartu menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.[[50]](#footnote-50)

Bahan hukum yang dikumpulkan dan dikaji menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.[[51]](#footnote-51)

* + 1. **Teknik Analisis Data**

Data primer, sekunder, maupun tersier yang telah diperoleh baik berupa konsep-konsep hukum maupun peraturan perundang-undangan akan diolah dengan melakukan pengklasifikasian dan pengurutan sehingga mudah dibaca dan dipahami. Data ini kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif dengan mengutamakan mutu dari data dan bukan kuantitas dari data dan argumen dengan metode interpretasi hukum. Analisa kualitatif menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moleong upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.[[52]](#footnote-52)

Sedangkan Metode interpretasi hukum adalah uraian dalam bentuk bahasan proses yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum lainnya sehingga bisa mendapatkan suatu kebenaran atau mendapatkan gambaran baru. Menurut Peter de Cruz dalam arti luas, interpretasi dapat mengindikasikan berbagai kegiatan kreatif dari seorang hakim dalam memperluas, membatasi atau memodifikasi sebuah peraturan hukum yang dinyatakan atau terkandung di dalam sebuah bentuk undang-undang. Namun, dalam arti sempit, interpretasi dapat menunjuk pada penjelasan yang diberikan oleh seorang hakim mengenai makna dari kata-kata atau kalimat yang termaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Pidana atau undang-undang.[[53]](#footnote-53)

* 1. **Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan, *internet* dan sumber informasi lain, penelitian yang memiliki fokus studi *Independent Power Producers* berdasarkan *Power Purchase Agreement* di Indonesia dan di Amerika Serikat sebagai perbandingan. Penulis menemukan bahwa telah ada peneliti-peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan fokus kajian sebagaimana diteliti oleh penulis. Oleh karena itu penulis memiliki kewajiban ilmiah untuk menampilkan pembeda dan kebaruan antara peneliti-peneliti terdahulu dengan penulis.

Untuk membedakan hasil peneliti-peneliti terdahulu, maka dapat dilihat dalam matriks dibawah ini :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penelitian Sebelumnya | | | | Penelitian Sekarang |
| No. | Peneliti/ Penulis | Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Unsur Kebaruan |
| 1 | Muhammad Ghiffari, (2017, Skripsi Fakultas Hukum Undip, Semarang) | Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian *Power Purchase Agreement* dan *Finance Lease Agreement* Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tanjut Jati B Unit 1-IV | - Penyediaan tenaga listrik di Indonesia dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Hubungan hukum antara pemerintah dan swasta lahir dari kontrak yang digunakan yaitu *Power Purchase Agreement* (PPA) dan *Finance Lease Agreement*. | - Penyediaan tenaga listrik di Indonesia khususnya oleh swasta (*Independent Power Producers*) dalam tesis ini penulis lebih fokus pada perbandingan *Power Purchase Agreement* antara Indonesia dan Amerika Serikat. |
| - Power Purchase Agreement di PLTU Tanjung Jati B berlaku untuk 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun sedangkan Finance Lease Agreement hanya berlaku selama 23 (dua puluh tiga) |
| tahun, maka dengan dilaksanakannya *Finance Lease Agreement* pemerintah dapat mengambil alih dan memiliki pembangkit listrik lebih cepat daripada menggunakan *Power Purchase Agreement.* |
| 2 | Yosef Gunawan Wibisono, S.H., (2006, | Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang | - Perlindungan hukum masih kurang seimbang bagi kedua belah | - Penyediaan tenaga listrik di Indonesia khususnya oleh swasta (*Independent* |
|  | Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas | Dilakukan Antara PT. PLN (PERSERO) dengan Pelanggan | pihak berdasarkan PJBL antara PT. PLN (PERSERO) dan pelanggan khususnya terhadap pelanggan. | *Power Producers*) dalam tesis ini penulis lebih fokus pada penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Amerika Serikat. |
|  | Hukum Undip, Semarang) |  | - Terdapat indikasi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen apabila terjadi pemadaman baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh PT. PLN (PERSERO) |  |

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Tinjauan Mengenai Perkembangan Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia dan di Amerika Serikat**
     1. **Sejarah Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia**

Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 18.000 (delapan belas ribu) pulau, dan memiliki populasi sebesar 261.890.90 ribu jiwa, sesuai dengan Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010.[[54]](#footnote-54)



**Gambar 2.1**

Ekonomi Indonesia mengawali tahun 2017 dengan kuat, dan fundamental yang kokoh membuahkan peningkatan peringkat kredit. Indonesia masih perlu melanjutkan pencapaian reformasi struktural untuk memperluas potensi ekonomi. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) triwulanan meningkat dari 4,9% (empat koma sembilan persen) pada triwulan terakhir tahun 2016 menjadi 5,0% (lima koma nol persen) pada triwulan pertama tahun 2017, terangkat oleh pulihnya tingkat konsumsi pemerintah dan melonjaknya nilai ekspor. Lonjakan harga listrik pada tahun 2017 untuk para pemakai 900 VA telah menyebabkan inflasi menjadi 3,9% (tiga koma sembilan persen) untuk lima bulan pertama tahun 2017. Efek dari biaya energi yang lebih tinggi sebagian diimbangi oleh inflasi di sektor makanan yang lebih rendah. Inflasi tahun ini diperkirakan rata-rata sebesar 4,3% (empat koma tiga persen), yang masih berada di dalam rentang target inflasi Bank Indonesia.[[55]](#footnote-55)

Sektor ketenagalistrikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2015-2019 menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional, yaitu menjadi salah satu dari 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional : dimensi pembangunan manusia dan masyarakat; dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas; dan dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Di Indonesia sektor unggulan dan prioritas nasional adalah sektor ketenagalistrikan, pangan, energi, kemaritiman, kelautan, pariwisata, dan industri. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (RPJMN 2015 – 2019) terkait dengan sektor ketenagalistrikan adalah dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur kelistrikan, menjamin ketahanan energi untuk mendukung ketahanan nasional melalui cara yang terintegrasi dan meningkatkan peran kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Indonesia memiliki kapasitas ketenagalistrikan yang ditinjau berdasarkan daya tersambung, energi terjual, jumlah pelanggan, dan kapasitas terpasang merupakan gambaran umum dari kemampuan Indonesia dalam menyediakan energi listrik saat ini. Daya tersambung yang merupakan besaran daya yang disepakati oleh PT PLN (Persero) dan pelanggan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, daya tersambung ini yang menjadi dasar penghitungan beban.

Investasi ketenagalistrikan dapat dilakukan melalui skema *Independent Power Producers* (IPPs), Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), *Engineering Production and Construction* (EPC), maupun Swasta Murni. Aturan berkaitan dengan pengadaan investasi untuk ketenagalistrikan umum, antara lain :

* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
* Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014;
* Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung;
* Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2006 jo. Nomor 04 Tahun 2007 tentang Prosedur Pembelian Tenaga listrik dan atau Sewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum; dan
* Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain.

Aturan berkaitan dengan pengadaan investasi khusus energi geothermal, ditambah dengan aturan berikut ini :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Geothermal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 jo Nomor 70 Tahun 2010 tentang Kegiatan Geothermal;
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Panas Bumi; dan
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTP dan Uap Panas Bumi untuk PLTP oleh PT PLN (Persero).

Aturan berkaitan dengan pembiayaan melalui *Public Private Partnership* (PPP), antara lain :

1. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur dan telah direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 (perubahan pertama), Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 (Perubahan kedua), dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 (Perubahan ketiga); dan
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Infrastruktur melalui *Public Private Partnership* (PPP)

PT PLN (Persero) menetapkan pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik melalui pemilihan langusng dan penunjukan langsung. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 untuk meningkatkan kapasitas pembangunan tenaga listrik nasional, khususnya untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik melalui mekanisme *Independent Power Producers* (IPPs).

Dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2015-2024 telah mempertimbangkan perencanaan penyediaan tenaga listrik yang ada dalam Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2012 hingga 2031 dan Draft RUKN 2015 hingga 2034 mendukung penyediaan tenaga listrik di Indonesia. PT PLN (Persero) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik dalam wilayah usahanya dengan melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA. Pembelian dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga kerja lainnya dilakukan berdasarkan rencanausaha penyediaan tenaga listrik.

Pembelian tenaga listrik dapat dilakukan melalui pemilihan langsung dan penunjukkan langsung sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pembelian tenaga listrik dilakukan dari PLTU Mulut Tambang, PLTG marginal dan PLTA.
2. Pembelian kelebihan tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA.
3. Pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA jika sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan listrik.
4. Pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA dalam rangka penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.

Terdapat 3 (tiga) mekanisme pengadaan listrik di Indonesia melalui prosedur *Independent Power Producers* (IPPs), yaitu :

1. Prosedur Penunjukan Langsung;

Proses penunjukan langsung dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero) dan sampai dengan penandatangan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) hari.

1. Prosedur Pemilihan Langsung; dan

Proses pemilihan langsung didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang tunjuk oleh PT PLB (Persero) dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

1. Tender/Lelang Terbuka.

Lelang terbuka dilaksanakan apabila kondisi IPPs tidak layak untuk penunjukkan langsung atau pemilihan langsung atau PLN menginginkan Lelang Terbuka untuk semua jenis tenaga pembangkit. Pemenang ditetapkan pada pengajuan tariff terendah. Berdasarkan peraturan IPPs proses lelang terbuka dengan kapasitas lebih atau sama dengan 15 MW (lima belas megawatt) dari pengumuman tender sampai penandatanganan kontrak memerlukan waktu 321 (tiga ratus dua puluh satu) hari jika tidak ada tender ulang.

Tahapan Bisnis IPPs mencakup : tahap pra kualifikasi; tahap permintaan proposal; tahap pengajuan surat penawaran; tahap penandatangan kontrak; tahap pembayaran sesuai tanggal yang telah disepakati; tahap pelaksanaan komersial; dan tahap akhir masa kontrak.

Ketentuan harga patokan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung telah ditetapkan Harga Patokan Tertinggi Pembelian Tenaga Listrik.

Sesuai dengan program pemerintah tahun 2015-2019, PT PLN (Persero) dalam RUPTL 2015-2024 telah mencantumkan program pembangunan ketenagalistrikan sebesar 35.000 MW (tigapuluh lima ribu mega watt) untuk periode tahun 2015-2019, dimana peran listrik swasta diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Peran swasta akan meningkat dari kontribusi kapasitas sekitar 15% (lima belas persen) menjadi 32% (tiga puluh dua persen) pada tahun 2019, dan 41% (empat puluh satu persen) pada tahun 2024.

Pembiayaan ketenagaan listrik oleh swasta didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta, yaitu semua usaha penyediaan tenaga listrik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta dan koperasi selaku pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum.

Melalui kentetuan diatas, pemerintah mengundang partisipasi swasta dalam proyek-proyek yang ditentukan oleh Pemerintah dan atas prakarsa sendiri, swasta dapat mengusulkan proyek-proyek tenaga listrik lain untuk dipertimbangkan oleh pemerintah. Usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta diutamakan dengan pola pelaksanaan “Membangun, Memiliki dan Mengoperasikan”. Selain itu dipertimbangkan kemungkinan penggunaan pola pelaksanaan lain yang menguntungkan pola pelaksanaan lain yang menguntungkan bagi negara.

Izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum sebagai dasar bagi usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta diberikan oleh Menteri. Izin usaha tersebut dapat diberikan untuk salah satu atau gabungan usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi dan/atau usaha distribusi untuk dijual kepada PT PLN (Persero) sebagai perusahaan umum listrik negara atau kepada pihak lain. Penjualan tenaga listrik, sewa jaringan transmisi dan sewa jaringan distribusi dari pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum kepada PT PLN (Persero) atau kepada pihak lain ini diatur dalam suatu perjanjian berupa perjanjian jual beli tenaga listrik atau perjanjian sewa jaringan transmisi atau perjanjian sewa jaringan transmisi atau perjanjian sewa jaringan distribusi. Harga jual tenaga listrik, harga sewa jaringan distribusi dinyatakan dalam mata uang rupiah dan dicantumkan dalam perjanjian penjualan yang dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu uang dicantumkan dalam perjanjian penjualan. Harga itu wajib mencerminkan biaya yang paling ekonomis atas dasar kesepakatan bersama dan perlu mendapat persetujuan dari Menteri.

Usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta hanya dapat dilaksanakan dengan pembiayaan tanpa jaminan pemerintah terhadap modal yang ditanamkan dengan kewajiban membayar pinjaman. Terhadap impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta diberikan fasilitas berupa :

1. Pembebasan atas pembayaran bea masuk;
2. Tidak dipungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn dan PPn BM) yang terhutang ditangguhkan.

Pembangunan pembangkit tenaga listrik oleh swasta dilaksanakan sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang energi dan didasarkan atas ketersediaan sumber energi primer yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan keekonomian usaha tersebut dan memperhatikan pertimbangan untuk melestarikan lingkungan hidup.

Dalam usaha pembangkitan tenaga listrik oleh swasta diutamakan penggunaan sumber energi promer di luar minyak bumi, kecuali jika pada lokasi proyek pembangkitan yang diusulkan tidak tersedia atau atas dasar keekonomian tidak memungkinkan untuk penggunaan sumber energi primer diluar minyak bumi.

Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum mengusahakan sendiri pemasokan energi primer yang diperlukannya agar dapat menghasilkan biaya pembangkitan tenaga listrik yang paling ekonomis. Pemasokan energi primer di luar minyak bumi diutamakan yang berasal dari dalam negeri.

* + 1. **Sejarah Sektor Ketenagalistrikan di Amerika Serikat**

Semenjak 150 tahun yang lalu, masyarakat di Amerika Serikat (AS) telah melalui transformasi fundamental. Dengan adanya invensi lampu pijak pada tahun 1870-an memperkenalkan bahwa penerangan adalah salah satu dari praktik pertama yang menggunakan tenaga listrik. Invensi atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *invention* adalah penemuan yang ditafsirkan secara luas sebagai produksi pengetahuan. Dari sudut pandang kesejahteraan ekonomi, penentuan alokasi sumber daya secara optimal untuk penemuan akan bergantung pada karakteristik teknologi dari proses penemuan dan sifat pasar untuk pengetahuan. Hal ini adalah pendapat mengenai invensi menurut Kenneth J. Arrow, beliau menyatakan bahwa :[[56]](#footnote-56)

“*Invention is here interpreted broadly as the production of knowledge. From the viewpoint of welfare economics, the determination of optimal resource allocation for invention will depend on the technological characteristics of the invention process and the nature of the market for knowledge.*”

Kegunaan listrik telah mulai tumbuh dan berkembang pada kota-kota besar selama tahun 1880-an, dan pada tahun 1990-an listrik telah tersebar ke negara-negara bagian di AS. Ketika pemilik utilitas sebagai investor melayani konsumen pada area perkotaan dan mendahulukan konsumen industrial untuk Perang Dunia I[[57]](#footnote-57), untuk menjalankan pelayanan universal yang diluncurkan pada tahun 1930-an, dengan membuat Administrasi Elektrifikasi Pedesaan, saat ini Utilitas Pelayanan untuk daerah Pedesaan di Amerika Serikat, merupakan bagian dari *US Department of Agriculture*. *The National Academy of Engineering* menunjuk ketenagalistrikan adalah pencapaian teknik mesin terbesar pada abad ke-20 mengalahkan mobil, komputer, dan pesawat ruang angkasa.[[58]](#footnote-58)

Dengan tidak melupakan kerumitan jaringan kabel yang berbelit-belit yang menyambungkan setiap saklar lampu yang ada di AS ke pembangkit tenaga listrik yang sangat besar, panel surya disetiap atap masing-masing individu, dan setiap sumber ketenagalistrikan diantaranya. Ditambahkan juga bahwa terdapat pipa yang berada dibawah tanah yang mengarah ke *stovetops,* pembangkit tenaga listrik, dan pabrik-pabrik yang menggunakan gas alami, dan juga merupakan dasar pada setiap masyarakat moderen yang telah dibangun.

Utilitas Grid infrastruktur listrik dan gas saling berkaitan dan terus berkembang saat populasi di AS juga bertumbuh dan menuntut energi listrik yang relatif tinggi. Meskipun sektor transportasi telah dilayani dengan persaingan penyediaan layanan sejak tahun 1920an, penyediaan listrik dan gas alam dianggap menjadi monopoli alami karena skala ekonomi yang signifikan dan modal untuk membangun pembangkit listrik, jalur transmisi, dan pipa gas alam yang tidak murah maupun mudah. Perusahaan listrik dan gas alam mengembangkan apa yang kita kenal saat ini sebagai monopoli yang menawarkan layanan listrik dan gas alam dari produsen tunggal. Untuk mengatasi *the disparity in economic leverage* antara para pelanggan dan para produsen, pengaturan berkaitan dengan sistem utilitas telah dikembangkan lebih dari 150 (seratus lima puluh) tahun untuk memastikan sistemnya handal, aman, dan harga yang diberikan adil.[[59]](#footnote-59)

Utilitas listrik dan utilitas gas alam memberikan layanan ritel kepada konsumen diatur oleh negara bagian, federal, dan agensi pemerintahan lokal. Agensi ini mengatur harga yang akan ditetapkan oleh produsen, persyaratan layanan terhadap konsumen, anggara dan rencana konstruksi, dan anggaran untuk efisiensi energi pada layanan lainnya. Dampak operasi dari utilitas di udara, air, penggunaan lahan, dan pembuangan limbah juga diatur oleh pemerintah namun diatur oleh agensi pemerintahan lainnya.

Prinsip dasar atau prinsip fundamental membenarkan pengawasan pemerintah terhadap sektor utilitas karena utilitas menyediakan layanan penting untuk kesejahteraan masyarakat baik untuk individu maupun bisnis. Hal ini adalah sebuah industri yang terpengaruh dengan kepentingan umum. Fitur teknologi dan ekonomi dari industri juga mengakibatkan sering kali satu produsen mampu melayani keseluruhan permintaan dengan biaya total yang lebih rendah dari kombinasi terhadap entitas yang lebih kecil. Persaingan tidak dapat berkembang dalam kondisi seperti ini, maka dari semua perusahaan apabila ada yang keluar dari pasar maka ia akan gagal bersaing. Entitas yang bertahan dalam keadaan yang disebut alam monopoli dan sama seperti monopoli lainnya, mereka memiliki kemampuan untuk membatasi output dan menetapkan harga pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang dibenarkan secara ekonomi.

Berdasarkan kondisi diatas maka regulasi ekonomi dibutuhkan oleh publik dan pemerintah untuk mengintervensi pasar agar dapat mencapai manfaat publik. Dalam beberapa tahun terakhir elemen pembangkit listrik dalam utilitas industri ketenagalistrikan telah mengalami persaingan yang tinggi tekanan dan di beberapa negara telah dikecualikan dari regulasi ekonomi namun bukan dari regulasi lingkungan.

Pada tahun 1848, John Stewart Mill menerbitkan sebuah analisis tentang monopoli alami dan mencatat bahwa :[[60]](#footnote-60)

1. Layanan gas dan air di London dapat diberi harga yang lebih rendah apabila duplikasi fasilitas oleh perusahaan kompetitif dihindari; dan
2. Dalam keadaan seperti itu, persaingan yang tidak stabil akan pasti terjadi dan digantikan oleh monopoli.

Arus kebijakan di AS pada umumnya telah ke arah memperkenalkan kompetisi dimana hal tersebut adalah bentuk yang paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya dan memenuhi kebutuhan pokok. Konsep monopoli secara natural masih berlaku setidaknya untuk perbaikan transportasi dan pengiriman dalam komponen jaringan layanan utilitas. Walaupun terdapat persaingan yang cukup antara produsen dan/atau ritel yang melaksanakan tugas layanan untuk penagihan, sektor utilitas dalam infrastruktur modern memiliki peran yang penting.

Regulasi dibuat untuk melindungi kepentingan umum yang terdiri dari berbagai elemen. Utilitas diharapkan dapat menawarkan layanan kepada siapa saja yang meminta dan dapat membayar pada regulator atau pemerintah dengan harga yang telah disetujui oleh pemerintah. Pelayanan yang bersifat universal ini dapat mengenakan biaya koneksi apabila dalam menyediakan layanan mengakibatkan pengeluaran utilitas yang signifikan. Tetapi untuk tunduk pada peraturan dan kasus lainnya dapat disubsidi dengan cara tertentu oleh pelanggan lain melalui skema pembayaran pajak. Utilitas juga harus mematuhi standar keselamatan pemerintah yang ketat, karena infrastruktur mereka berjalan di seluruh komunitas publik dan apabila terjadi masalah maka masyarakat dapat menjadi yang terkena dampak buruh dari kabel kendur, pipa pecah, dan masalah-masalah lainnya.

Produksi dan distribusi listrik dan gas alam juga memberikan dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dari emisi polutan, melalui penggunaan perairan umum, pemandangan indah dan penggunaan lahan, dan bahkan dari kebisingan yang dihasilkan oleh produksi juga dapat memberi dampak yang negatif terhadap masyarakat. Pembangkit listrik sering kali menghasil kan polusi, jalur transmisi dan distribusi memiliki visual dampak fisik pada penggunaan lahan dan visual dampak terhadap sistem ekologi. Dengan cara yang sama, ketersediaan listrik dan gas alam menciptakan peluang untuk menggunakan bahan bakar yang lebih rendah dampak polusinya apabila dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar dari minyak atau batubara. Jadi, tergantung pada ruang lingkup wewenang yang didelegasikan, regulator mungkin memberlakukan tanggung jawab lingkungan kepada utilitas untuk melindungi kepentingan publik. Regulator diberi wewenang khusus oleh legislator dalam bentuk otoritas yang bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Karena sebagian besar konsumen tidak bisa langsung membeli dari utilitas layanan distribusi atau produsen. Hal ini diakibatkan layanan distribusi dari produsen terkena dampak dari terjadinya monopoli yang terjadi secara natural, peraturan disini berfungsi untuk memastikan bahwa pelayanan untuk konsumen memadai dan perusahaan responsif terhadap kebutuhan konsumen. Selain itu, utilitas sering kali berupa penagihan atau komunikasi untuk informasi yang dianggap penting oleh regulator untuk diketahui konsumen. Mengingat peran penting utilitas dalam perekonomian dan kesejahteraan masyarakat umum, maka standar keandalan dalam pelayanan oleh perusahaan juga sering dipaksakan juga.[[61]](#footnote-61)

Bisnis di AS kebanyakan menentukan harga barang dan/atau jasa yang dijual berdasarkan besaran yang dapat di tanggung oleh pelanggan maupun pasar. Secara ekonomi, pasar akan dapat terlihat jelas bahwa pasokan barang dan/atau jasa bergantung pada permintaan pasar. Regulator menggunakan pendekatan biaya layanan (*cost of service approach*) untuk menentukan harga yang wajar dan adil untuk layanan listrik dengan biaya yang dapat menyediakan layanan untuk setiap kelas (perumahan, komersial, dan industri). Harga yang ditetapkan untuk dapat mengembalikan porsi modal yang diinvestasikan oleh produsen dalam menghasilkan listrik dan dialokasikan berdasarkan penjualan yang dilakukan ke masing-masing kelas.

Secara efektif, peraturan merupakan kesepakatan antara utilitas dan pemerintah. Utilias menerima kewajiban untuk memberikan pelayanan sebagai imbalan atas janji pemerintah untuk menyetujui dan membiarkan tarif yang akan dikompensasikan utilitas sepenuhnya untuk biaya yang dikenakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Kesepakatan tersirat diatas terkadang disebut *the regulatory compact.[[62]](#footnote-62)*

Selain ungkapan diatas, sebenarnya tidak ada kesepakatan yang mengikat antara sebuah utilitas dan pemerintah yang melindungi kepemilikan utilitas dari akuntabilitas keuangan. Terdapat banyak utilitas yang diatur melalui reorganisasi kebangkrutan karena pendapatan yang didapat bersifat prudent dan diijinkan oleh regulator untuk tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya dengan manajemen utilitas.

Regulasi adalah pelaksanaan dari kekuasaan polisi pada negara bagian, diatas industri yang “terpengaruh kepentingan publik”, apakah industri tersebut menikmati hak untuk beroperasi sebagai penyedia monopoli ataupun tidak. Kebutuhan akan regulasi utilitas terutama berasal dari monopoli karakteristik industri. Tujuan umum dari peraturan adalah memastikan penyediaan layanan yang aman, memadai, dan dapat diandalkan dengan harga dan pendapatan bagi produsen secara cukup tetapi tidak lebih dari cukup untuk mengimbangi modal investasi yang dikeluarkan oleh produsen.

* 1. **Tinjauan Mengenai Regulasi *Independent Power Producers* (IPPs) di Indonesia dan di Amerika Serikat**
     1. **Regulasi *Independent Power Producers* (IPPs) di Indonesia**

Pembangkit Listrik di Indonesia dibedakan menjadi dua tipe berdasarkan bahan bakarnya, yaitu pembangkit fosil dan pembangkit energi terbarukan. Pembangkit Listrik Tenaga Fosil antara lain PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), PLTGU (Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap), PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) dan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan terdiri dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), PLT Bayu (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin).[[63]](#footnote-63)

Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah penyedia daya listrik yang dapat berfungsi untuk pusat pembangkit, cadangan, beban puncak dan cadangan untuk keadaan darurat. Komponen-komponen penting mesin PLTD adalah mesin atau motor, sistem bahan bakar, sistem udara masuk, sistem pembuangan gas, sistem pendinginan, sistem pelumasan, dan sistem penggerak mula. Pembangkit listrik ini sesuai untuk diimplementasikan dimana pada lokasi yang pengeluaran bahan bakarnya rendah, persediaan air terbatas, minyak sangat murah dibandingkan dengan batubara dan semua beban dasarnya adalah seperti yang dapat ditangani oleh mesin pembangkit dalam kapasitas kecil, serta dapat berfungsi dalam waktu singkat.[[64]](#footnote-64)

Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit yang memanfaatkan gas (campuran udara dan bahan bakar) hasil dari pembakaran bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG) untuk memutarkan turbin yang telah dihubungkan dengan generator sehingga akan dihasilkan energi listrik. Sistem pembangkit listrik tenaga gas yang paling sederhana terdiri dari tiga komponen, yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin gas.[[65]](#footnote-65)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang mengkonversikan energi primer menjadi energi listrik dengan menggunakan bahan bakar. Ada kalanya PLTU menggunakan kombinasi beberapa macam bahan bakar. Konversi energi tingkat pertama yang berlangsung dalam PLTU adalah konversi energi primer menjadi energi panas atau yang dikenal dengan istilah kalor. Hal ini dilakukan dalam ruang bakar dari ketel uap PLTU. Energi panas ini kemudian dipindahkan kedalam air yang ada dalam pipa ketel untuk menghasilkan uap yang dikumpulkan dalam drum dari ketel. Uap dari drum ketel dialirkan ke turbin uap. Dalam turbin uap, energi uap dikonversikan menjadi energi mekanis penggerak generator, dan akhirnya energi mekanik dari turbin uap ini dikonversikan menjadi energi listrik oleh generator.[[66]](#footnote-66)

Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap yang selanjutnya disingkat PLTGU adalah gabungan antara PLTG dan PLTU, dimana panas dari gas yang dibuang dari PLTG digunakan untuk menghasilkan uap yang digunakan sebagai fluida kerja di PLTU. Bagian yang digunakan untuk menghasilkan uap tersebut adalah *heat recovery steam generator.[[67]](#footnote-67)*

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang menggunakan minyak solar *High Speed Diesel* dan gas alam *Liquified Natural Gas.* Dalam hal ini tentu memiliki dampak negatif karena bahan bakar yang digunakan adalah bahan bakar fosil yang dapat menghasilkan emisi gas berbahaya, salah satunya adalah CO2. Pelepasan gas emisi dari cerobong asap PLTMG ke atmosfir akan mengakibatkan penurunan kualitas udara.[[68]](#footnote-68)

Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit yang cara kerjanya adalah bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu menjadi tenaga listrik, dengan menggunakan turbin air dan generator. Daya yang keluar dari generator dapat diperoleh dari perkalian efisiensi turbin dan generator dengan daya yang keluar secara teoritis.[[69]](#footnote-69)

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang prinsipnya sama dengan PLTU, hanya pada PLTU, uap dibuat di permukaan menggunakan boiler, sedangkan pada PLTP, uap berasal langsung dari perut bumi. Uap panas bumi didapatkan dari suatu kantong uap di perut bumi. Tepatnya diatas lapisan batuan yang keras diatas magma dan mendapatkan air dari lapisan humus dibawah hutan penahan air hujan. Pengeboran dilakukan diatas permukaan bumi kantong uang tersebut, sehingga uap akan menyembur keluar. Semburan uap dialirkan ke turbin penggerak generator, disini listrik akan terbangkitkan. Setelah menggerakkan turbin, uap akan diembunkan dalam kondensor menjadi air dan disuntikkan kembali kedalam perut bumi menuju kantong uap.[[70]](#footnote-70)

Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pemanfaatan energi terbarukan diantaranya dengan memanfaatkan tenaga radiasi matahari dengan menggunakan sel surya sebagai pengkonversi enegi matahari menjadi energi listrik. Cahaya matahari terdiri atas foton atau partikel energi surya yang dikonversi menjadi energi listrik.[[71]](#footnote-71)

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin yang selanjutnya disingkat PLT Bayu adalah pembangkit listrik menggunakan tenaga angin yang menghasilkan putaran turbin yang sangat bervariasi dari waktu ke waktu dalam sehari, karena kecepatan angin yang berubah-ubah.[[72]](#footnote-72)

PT PLN (Persero) menetapkan pembelian tenaga listrik dan harga patokan pembelian tenaga listrik melalui pemilihan langusng dan penunjukan langsung. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 untuk meningkatkan kapasitas pembangunan tenaga listrik nasional, khususnya untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik melalui mekanisme *Independent Power Producers* (IPPs).

Dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2015-2024 telah mempertimbangkan perencanaan penyediaan tenaga listrik yang ada dalam Draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2012 hingga 2031 dan Draft RUKN 2015 hingga 2034 mendukung penyediaan tenaga listrik di Indonesia. PT PLN (Persero) wajib memenuhi kebutuhan tenaga listrik dalam wilayah usahanya dengan melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA. Pembelian dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga kerja lainnya dilakukan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

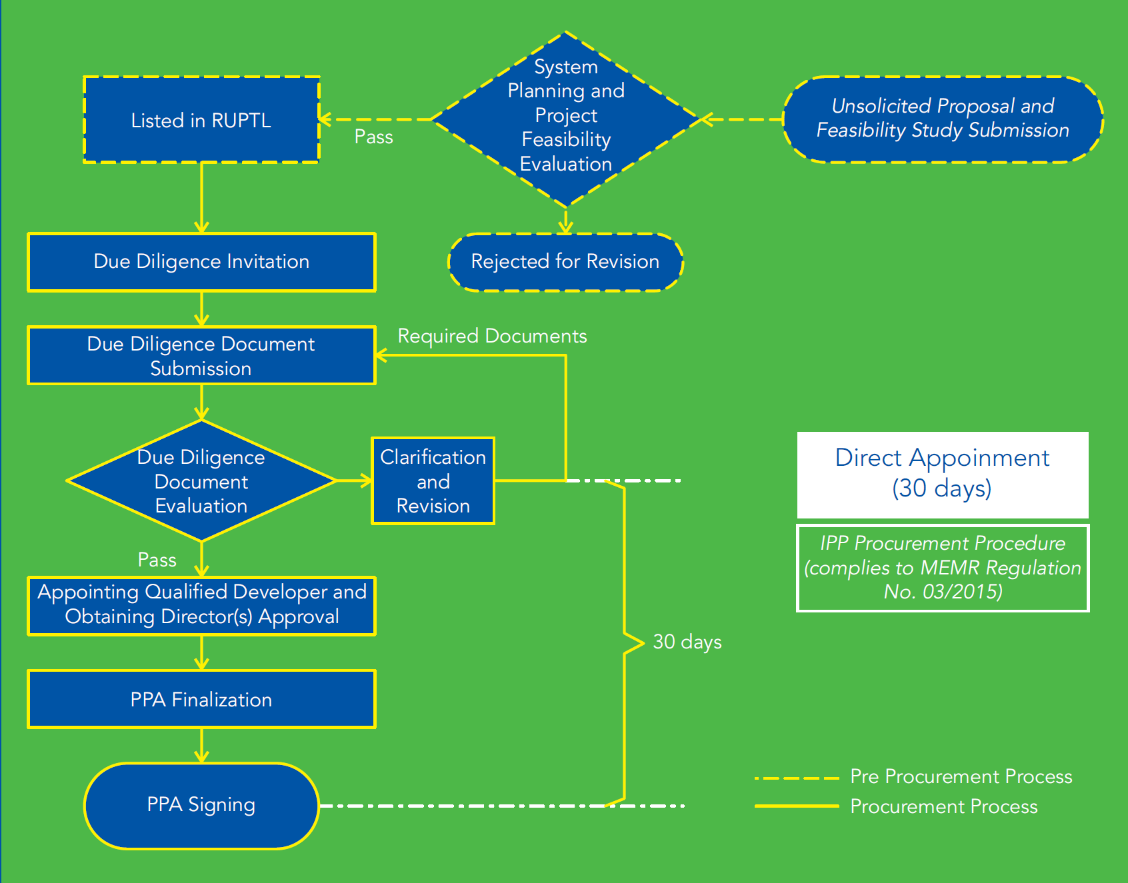
Pembelian tenaga listrik dapat dilakukan melalui pemilihan langsung dan penunjukkan langsung sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Pembelian tenaga listrik dilakukan dari PLTU Mulut Tambang, PLTG marginal dan PLTA.
2. Pembelian kelebihan tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA.
3. Pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA jika sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis atau darurat penyediaan listrik.
4. Pembelian tenaga listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG dan PLTA dalam rangka penambahan kapasitas pembangkitan pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama.

Terdapat 3 (tiga) mekanisme pengadaan listrik di Indonesia melalui prosedur *Independent Power Producers* (IPPs), yaitu :

1. Prosedur Penunjukan Langsung;

Proses penunjukan langsung dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang ditunjuk oleh PT PLN (Persero) dan sampai dengan penandatangan perjanjian jual beli tenga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) hari. Mekanisme IPPs untuk Penunjukkan langsung :

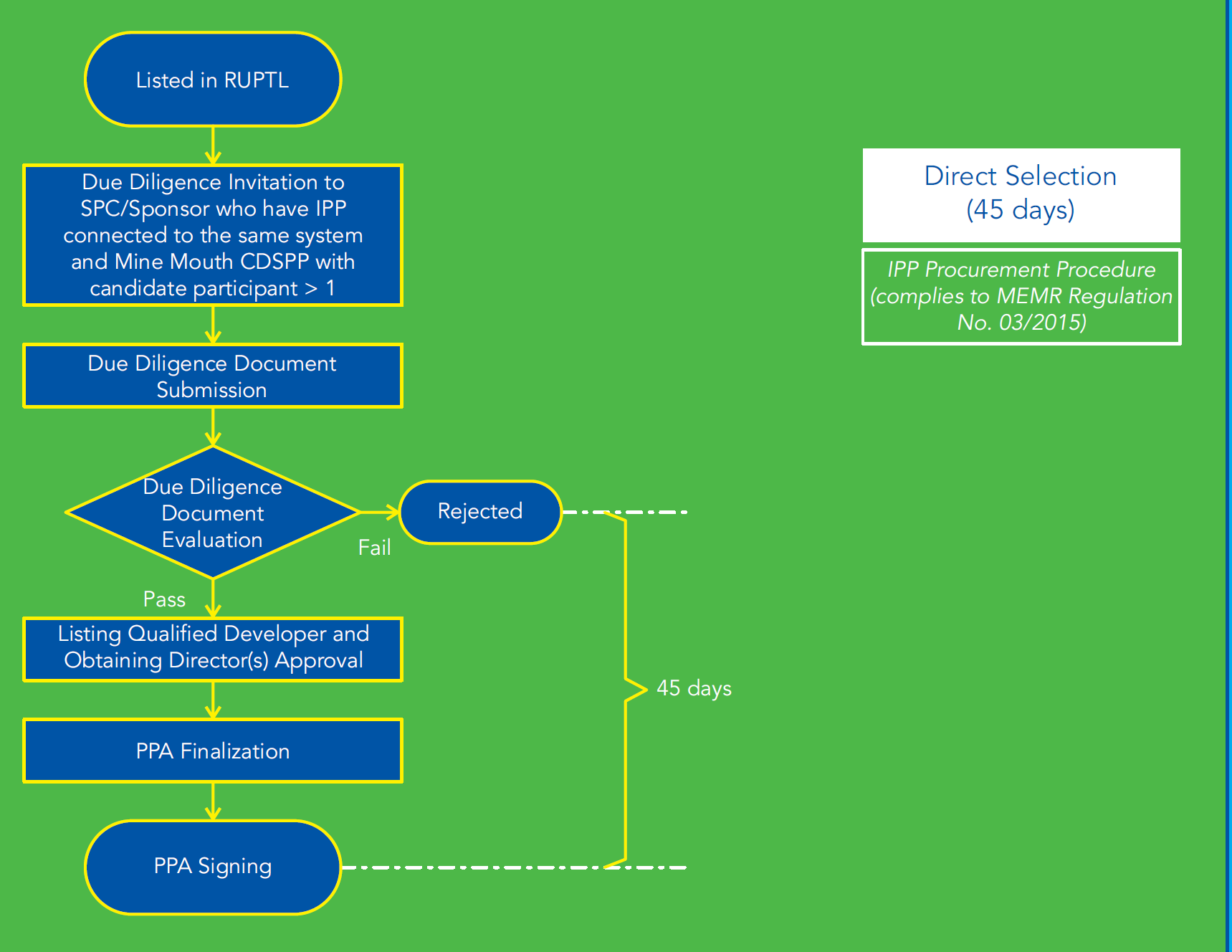


**Gambar 3.1**

**Mekanisme Pengadaan Ketenagalistrikan dengan Penunjukan Langsung**

1. Prosedur Pemilihan Langsung; dan

Proses pemilihan langsung didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak *procurement agent* yang tunjuk oleh PT PLB (Persero) dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 45 (empat puluh lima) hari. Mekanisme IPPs untuk pemilihan langsung :

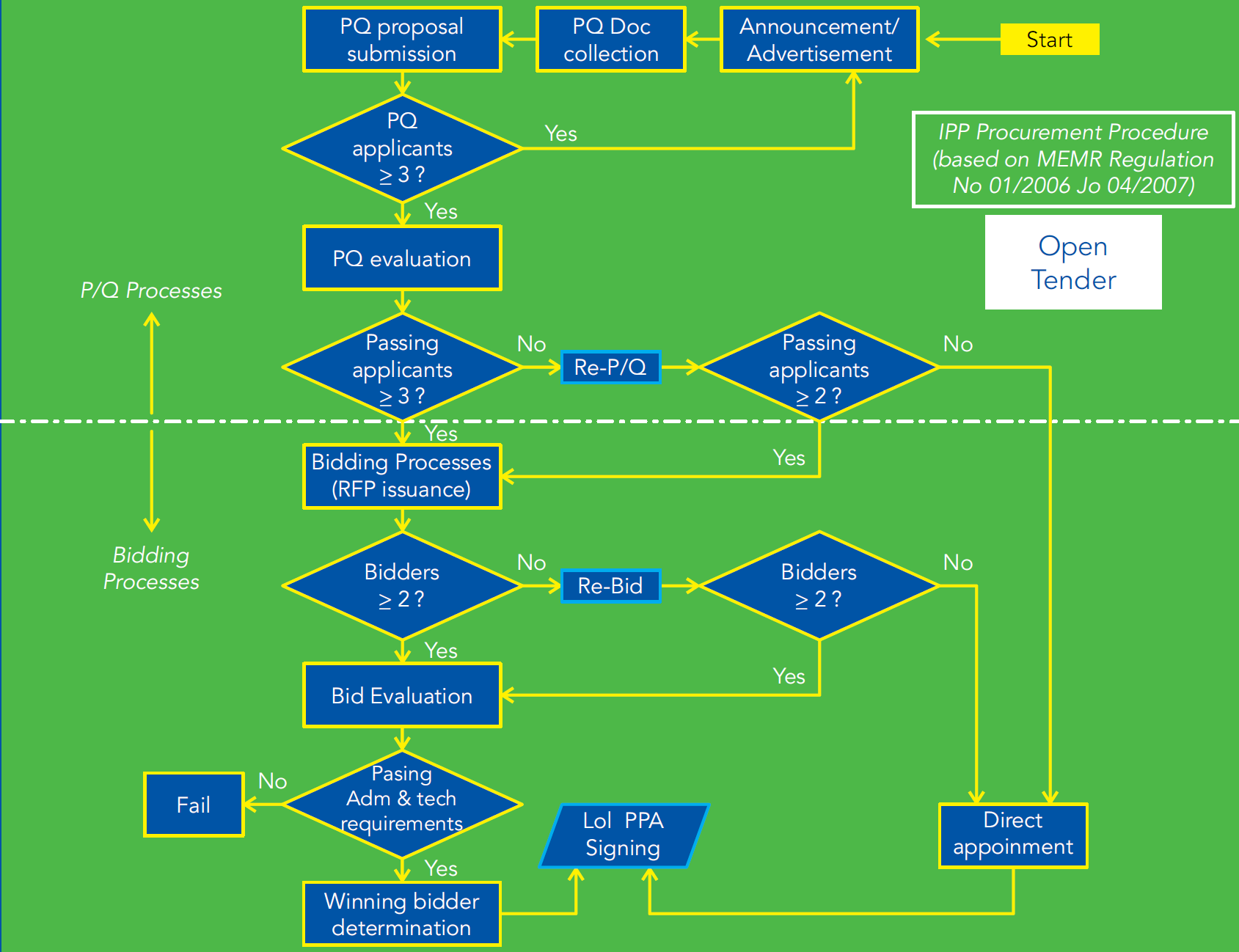


**Gambar 3.2**

**Mekanisme Pengadaan Ketenagalistrikan dengan Pemilihan Langsung**

1. Tender/Lelang Terbuka.

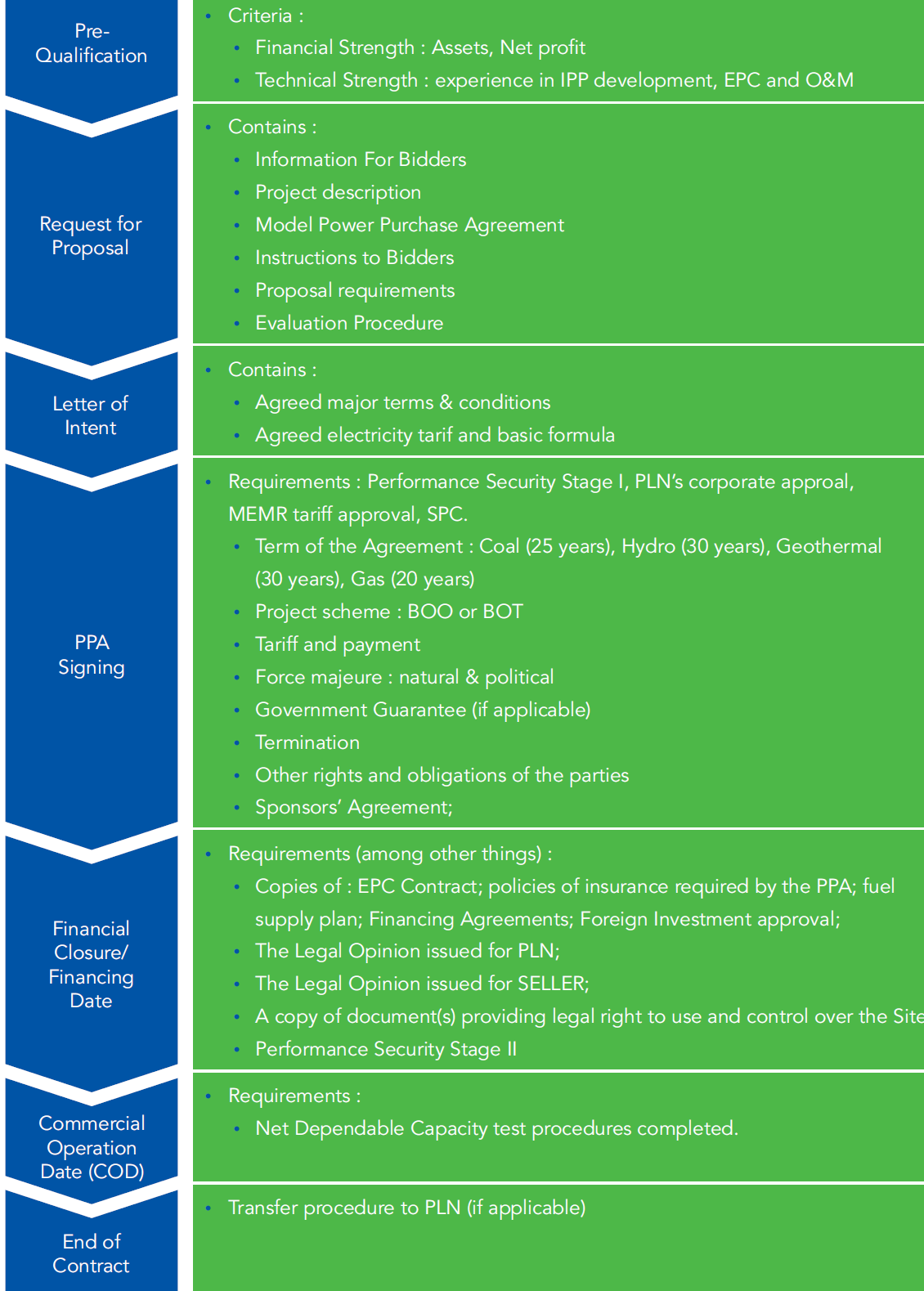
Lelang terbuka dilaksanakan apabila kondisi IPPs tidak layak untuk penunjukkan langsung atau pemilihan langsung atau PLN menginginkan Lelang Terbuka untuk semua jenis tenaga pembangkit. Pemenang ditetapkan pada pengajuan tariff terendah. Berdasarkan peraturan IPPs proses lelang terbuka dengan kapasitas >/=15 MW dari pengumuman tender sampai penandatanganan kontrak memerlukan waktu 321 (tiga ratus dua puluh satu) hari jika tidak ada tender ulang. Mekanisme IPPs untuk Tender/Lelang Terbuka :



**Gambar 3.3**

**Mekanisme Pengadaan Ketenagalistrikan dengan Lelang Terbuka**

Tahapan-tahapan Bisnis IPPs mencakup : Tahap pra kualifikasi; Tahap permintaan proposal; Tahap pengajuan surat penawaran; Tahap penandatangan kontrak; Tahap pembayaran sesuai tanggal yang telah disepakati; Tahap pelaksanaan komersial; dan Tahap akhir masa kontrak dengan kriteria dan konten yang dibutuhkan sesuai dengan **Gambar 3.4**.



**Gambar 3.4**

**Tahapan Bisnis Ketenagalistrikan Pola IPPs**

Ketentuan harga patokan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2015 tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik dari PLTU Mulut Tambang, PLTU Batubara, PLTG/PLTMG, dan PLTA oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukkan Langsung telah ditetapkan Harga Patokan Tertinggi Pembelian Tenaga Listrik.

Pemerintah mengebut pembangunan berbagai proyek infrastruktur di seluruh pelosok Nusantara. Sebagian sudah mendekati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Tapi tak sedikit juga yang masih jauh dari harapan. Proyek Pembangkit Listrik 35.000 (tiga puluh lima ribu megawatt) megawatt per-September 2017 telah beroperasi proyek pembangkit listrik sebesar 773 (tujuh ratus tujuh puluh tiga megawatt) megawatt, proyek pembangkit listrik dalam tahap konstruksi sebesar 15.266 (lima belas ribu dua ratus enam puluh enam megawatt) megawatt, proyek pembangkit listrik yang telah disepakati berdasarkan *power purchase agreement* sebesar 6.970 (enam ribu sembilan ratus tujuh puluh megawatt) megawatt, proyek pembangkit listrik dalam proses pengadaan sebesar 4.563 (empat ribu lima ratus enam puluh tiga megawatt) megawatt, dan proyek pembangkit listrik dalam proses persiapan sebesar 8.255 (delapan ribu dua ratus lima puluh lima) megawatt.[[73]](#footnote-73)

Proyek Pembangkit Listrik 35.000 (tiga puluh lima ribu megawatt) megawatt per-September 2017 realisasinya dibandingkan dengan target pada tahun 2019 masih belum melampaui target pada bagian proyek yang telah beroperasi yaitu sebesar 24.450 (dua puluh empat ribu empat ratus lima puluh megawatt) megawatt, sedangkan pada proyek pembangkit listrik tahap konstruksi, *power purchase agreement,* proses pengadaan, dan proses persiapan telah melampaui target yang diharapkan akan dicapai pada tahun 2019.

* + 1. **Regulasi *Independent Power Producers* (IPPs) di Amerika Serikat**

Industri listrik di Amerika Serikat (AS) bergerak dari serangkaian monopoli yang terintegrasi secara vertikal menjadi satu dengan persaingan dalam pasar grosir dan produsen listrik secara mandiri atau yang dikenal dengan IPPs. IPPs di AS memiliki empat kali perubahan model kerja, untuk yang pertama generasi pertama kali adanya IPPs adalah IPPs harus memiliki hukum dan hak untuk memasuki pasar di AS. Kedua, akses transmisi, dalam akses transmisi IPPs harus memiliki akses sistem transmisi milik utilitas dengan harga dan kualitas dasar yang sebanding dengan penggunaan utilitas itu sendiri. Ketiga, produk transmisi regional yang merupakan perencanaan dan operasi regional sistem transmisi. Keempat dan yang terakhir adalah keandalan daya secara masal harus memiliki otoritas dari pusat atau pemerintah.

Sebelum tahun 1978 utilitas IPPs terintegrasi secara vertikal dan menyediakan sebagian besar kebutuhan mereka sendiri. Utilitas terintegrasi secara vertikal dan dijual dengan harga grosir bergantung pada transmisi atau utilitas mana yang tidak memiliki pembangkit listrik. Penjualan antar utilitas terbatas dan akses transmisi juga masih terbatas.

Selanjutnya *Public Utility Regulatory Policies Act of 1978* telah ditetapkan untuk mendorong pengembangan produksi fasilitas kecil yang diharapkan akan mengurangi permintaan pembangkit listrik dengan tenaga bahan bakar fosil dan untuk mengatasi keengganan utilitas tradisional untuk membeli kekuatan dari fasilitas non-tradisional. Dibawah undang-undang ini sebuah utilitas dipaksa untuk membeli tenaga listrik dari fasilitas yang berkualifikasi namun tidak dapat dilibatkan penjualan tenaga listrik dengan biaya yang dihindari untuk membayar listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan cara yang tradisional.

Sebelum berlakunya PURPA 1978, masih sedikit dan jarang ada yang mendapat distribusi listrik karena biaya pembangunan infrastruktur alat pengangkut sangat mahal. PURPA dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan domestik terhadap energi asing dan untuk mendorong konversi energi.

Pada tahun 1992 *Energy Policy Act* telah ditetapkan, melalui undang-undang ini pemerintah AS memperkenalkan kompetisi menjadi produsen listrik yang independen yang dikenal sebagai IPPs dengan kuasa yang ditunjuk dari sistem transmisi masal ke *Federal Energy Regulatory Commission.*

John E. Besant Jones mendefiniskan IPPs sebagai “*An entity that owns facilities to generate electric power for sale to utilities and end users and that has no affiliation to a transmission or distribution company.*”[[74]](#footnote-74) Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi “Sebuah entitas yang memiliki fasilitas untuk menghasilkan tenaga listrik untuk dijual ke utilitas dan pengguna akhir dan tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan transmisi atau distribusi.”

IPPs umumnya merupakan salah satu langkah awal untuk menciptakan pasar yang terdesentralisasi dengan memperkenalkan persaingan ke generasi pasar. Untuk membeli daya dari IPPs, sebuah PPA akan dikembangkan. PPA harus dibedakan dari PPA pihak ketiga, yang memisahkan kepemilikan sistem energi dan pembangkit tenaga listrik.

John E. Besant Jones juga mendefinisikan PPA sebagai “*A legally binding contractual agreement by which an entity, such as a single buyer or distribution company, undertakes to purchase the power generated by an independent or affiliated power producer under specified terms for a multiyear period.*”[[75]](#footnote-75) Definisi dari John E. Besant Jones menjelaskan bahwa perjanjian kontrak yang mengikat secara hukum dimana entitas, seperti pembeli tunggal atau perusahaan distribusi, berjanji untuk membeli tenaga yang dihasilkan oleh produsen listrik independen atau berafiliasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk periode beberapa tahun. Dengan demikian, PPA adalah kesepakatan kontraktual antara dua pihak, semata-mata untuk pembelian kekuasaan, berbeda dengan PPA pihak ketiga yang mencakup tiga pihak, yaitu : pelanggan; pemilik; dan utilitas. Dalam PPA pihak ketiga memisahkan kepemilikan sistem energi dan pembangkit tenaga listrik. Kerangka peraturan kerja juga memungkinkan PPA untuk menyediakan blok-blok bangunan untuk mendukung pihak ketiga.

Semua anggota SIEPAC telah mengizinkan generator swasta atau yang dikenal dengan istilah IPPs sampai batas waktu tertentu. Diantara negara-negara SIEPAC, Panama telah mengizinkan persentase partisipasi swasta tertinggi di sektor generasinya di lebih dari 80% diikuti oleh El Savador, Nikaragua, dan Guatemala pada lebih dari 60%. Menariknya, Kosta Rika memiliki persentasi keterlibatan swasta yang sangat rendah, yaitu hanya di atas 10%, sementara Honduras memiliki lebih dari 60%. Namun kedua negara hanya memiliki keterlibatan swasta terbatas hanya pada perusahaan milik negara yang terintegrasi secara vertikal.[[76]](#footnote-76) SIEPAC adalah Sistem Interkoneksi Listrik Amerika Tengah yang merupakan singkatan dari bahasa Spanyol ***S****istema de****I****nterconexión****E****léctrica de los****P****aíses de****A****mérica****C****entral*. SIEPAC merupakan interkoneksi jaringan listrik dari enam negara Amerika Tengah yang menghubungkan 37 juta (tiga puluh tujuh juta) konsumen di Panama, Kosta Rika, Honduras, Nikaragua, El Salvador, dan Guatemala.[[77]](#footnote-77)

Banyak negara yang mulai menggunakan IPPs dan PPA pada tahap awal deregulasi untuk menarik modal dari swasta. Ketentuan PPA dan pembiayaan petugas untuk melindungi IPPs dari risiko seperti risiko pasar, volatilitas harga bahan bakar, inflasi, risiko kredit, dan risiko politik. Meskipun pada awalnya berhasil, kesulitan akan terjadi dalam mentransfer kontrak ke pasar grosir selama deregulasi penuh. Maka muncul dua solusi yaitu menegosiasikan kembali PPA dan mentrasnfernya ke pasar grosir atau negara mewakili IPPs di pasar, mengasumsikan biaya PPA dan menjual energi dengan harga pasar. Solusi ini telah dipenuhi dengan berbagai tingkat keberhasilan.[[78]](#footnote-78)

Masuknya IPPs di AS juga tergantung pada kemampuan produsen untuk mendapatkan akses non-diskriminatif ke sistem transmisi daya. Dalam putusan yang dikeluarkan pada tahun 1996 sampai dengan 2000 *the US Federal Energy Regulatory Commision* mengamanatkan bahwa sistem transmisi yang dimiliki oleh utilitas dapat diakses secara terbuka. Perintah ini juga memisahkan fungsi dari pembangkit listrik yang dijual secara grosir. Dibentuknya *the Regional Transmission Organization* disetiap daerah untuk mengawasi pengiriman setiap harinya dari generasi ke generasi untuk memenuhi permintaan dan pengoperasian sistem transmisi.

Mengingat tren yang memungkinkan akses persaingan untuk mengakses pasar grosir, masing-masing negara bagian mulai menyelidiki apakah layak untuk dimungkinkannya persaingan pasar ritel di yurisdiksi mereka. Pada tahun 1990-an beberapa negara bagian, termasuk California, Pennsylvania, Texas, dan New York mengenalkan hukum yang memungkinkan akses konsumen ke pemasok yang kompetitif. Dalam beberapa kasus, utilitas yang diatur ada pada yurisdiksi diminta untuk melepaskan diri dari menghasilkan aset lain dan diberi pilihan untuk melakukannya.

Pada bulan agustus tahun 2003 terjadi pemadaman yang menyebar luas di wilayah AS bagian timur laut.[[79]](#footnote-79) Spekulasi bahwa kurangnya standar reliabilitas yang bisa ditegakkan memungkinkan beberapa IPPs sudah menjadi sistem yang lemah. *Energy Policy Act of 2005* ditetapkan dan mengamanatkan bahwa keandalan sistem harus dipastikan berdasarkan adopsi standar keandalan, IPPs berfokus pada energi terbarukan, dan menghilangkan ketentuan “harus membeli” dari undang-undang pada tahun 1978.

* 1. **Tinjauan Mengenai Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Listrik di Indonesia dan di Amerika Serikat**
     1. **Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Listrik di Indonesia**

Berbagai perjanjian dilakukan oleh individu-individu sebagai anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan mengadakan hubungan satu sama lain, terutama dengan melakukan hubungan dalam pertukaran barang dan jasa dalam lalu lintas ekonomi. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum Perjanjian di Indonesia adalah perkembangan di bidang perdagangan. Beranekaragamnya transaksi dagang menimbulkan beragam perjanjian yang dibuat oleh masyarakat. Perjanjian timbul sebagai wujud dari adanya transaksi antara para produsen dan para konsumen.[[80]](#footnote-80)

Perikatan berasal dari bahasa Belanda “*Verbintenis”* atau dalam bahasa Inggris “*Binding*”. *Verbintenis* berasal dari perkataan bahasa Perancis “*Obligation*” yang terdapat dalam “*code civil Perancis*”, yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata “*obligation*” yang terdapat dalam Hukum Romawi “*Corpusiuris Civilis*”.[[81]](#footnote-81)

Menurut Hofmann, perikatan adalah sutau hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu. Sedangkan menurut Pitlo, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.[[82]](#footnote-82)

Menurut H. Hilman Hadikusuma, perikatan diartikan yang telah diikat atau cara mengikat, sedangkan perikatan diartikan pertalian atau perhubungan. Kemudian perjanjian diartikan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan menaati apa yang tersebut dipersetujuan itu.[[83]](#footnote-83)

Istilah kontrak berasal dari kata “*contract*” dalam Bahasa Inggris. Dalam Bahasa Prancis “*contrat*” dan dalam Bahasa Belanda “*overeenkomst*” sekalipun kadang-kadang juga digunakan istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah ini merupakan terjemahan dari “*contract*”, “*overeenkomst*”, atau “*contrat*”. Istilah kontrak lebih menunjukkan pada nuansa bisnis atau komersial dalam hubungan hukum yang dibentuk.[[84]](#footnote-84)

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan bahwa “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Berdasarkan rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut dapat ditegaskan bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Jika memperhatikan perumusan dari perjanjian maka dapat dijabarkan unsur-unsur perjanjian, antara lain :[[85]](#footnote-85)

1. Adanya para pihak yang sedikitnya dua orang;

Pihak-pihak yang ada dalam perjanjian ini disebut sebagai subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa manusia pribadi atau juga badan hukum. Subyek perjanjian harus mampu atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Sedangkan subyek hukum dapat dalam kedudukan pasif atau sebagai debitur atau dalam kedudukan yang aktif atau sebagai kreditur.

1. Adanya persetujuan antara para pihak tersebut;

Persetujuan antara para pihak disini bersifat tetap, dalam arti bukan baru dalam taraf berunding. Perundingan tersebut adalah tindakan pendahuluan untuk menunju adanya persetujuan. Realisasi dari persetujuan dapat ditunjukkan dengan adanya penerimaan dari salah satu pihak atas tawaran dari pihak lainnya. Pada umumnya berkaitan dengan syarat yang ada dalam perjanjian mengenai obyek dari perjanjian itu sendiri. Dengan syarat dan obyek perjanjian yang disetujui oleh para pihak, maka timbul persetujuan dan persetujuan ini merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

1. Adanya tujuan dari perjanjian yang akan dicapai;

Tujuan yang akan dicapai dalam mengadakan perjanjian adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak dan kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi jika pihak yang satu mengadakan perjanjian dengan pihak yang lain. Namun dalam praktiknya perjanjian yang dilakukan harus tetap sesuai dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1. Adanya prestasi yang akan dicapai;

Pelaksanaan prestasi meliputi untuk memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Kesemuanya itu harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan yang diperjanjikan.

1. Adanya bentuk tertentu (lisan maupun tulisan); dam

Dalam suatu perjanjian bentuk itu sangat penting, karena ada ketentuan undang-undang bahwa dengna bentuk tertentu, maka suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan sebagai bukti. Bentuk tertentu disini biasanya dalam bentuk akta, namun demikian tidak menutup kemungkinan bentuk perjanjian secara lisan, dan biasanya perjanjian bentuk lisan atau cara lisan terhadap perikatan murni.

1. Adanya syarat tertentu.

Syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian karena dengan syarat itulah dapat diketahui adanya hak dan kewajiban dari pihak-pihak. Biasanya syarat ini dapat kita bedakan syarat pokok dan syarat tambahan berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata.

Prestasi merupakan obyek dari perjanjian. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, tidak akan memiliki arti apapun bagi hukum perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, maka prestasi yang diperjanjian itu adalah untuk :

1. Menyerahkan;
2. Menyerahkan sesuatu;
3. Melakukan sesuatu; atau
4. Untuk tidak melakukan sesuatu.

Definisi perikatan menurut Subekti adalah sebagai suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.[[86]](#footnote-86)

H. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa sahnya persetujuan berarti bagaiman terjadinya persetujuan itu menurut hukum yang berlaku, persetujuan yang sah artinya persetujuan yang dibenarkan menurut hukum yang berlaku.[[87]](#footnote-87) Syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata Pasal 1320 merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri atau isi perjanjian yang biasa disebut syarat objektif, berikut merupakan penjelasan menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati antara lain :[[88]](#footnote-88)

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakaan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengna cara tidak tertulis dan juga tidak lisan, tetapi bahkan hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.

1. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Kecakapan ini ditandai dengan dicapainya umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, walaupun usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.

Khusus untuk orang yang menikah sebelum usia 21 (dua puluh satu) tahun tersebut, tetap dianggap cakap walaupun dia bercerai sebelum mencapai usia 21 tahun. Jadi, janda atau duda tetap dianggap cakap walaupun usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun.

Walaupun ukuran kecakapan didasarkan pada usia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, tidak semua orang yang mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun telah menikah secara otomatis dapat dikatakan cakap menurut hukum karena ada kemungkinan orang yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah, tetapi tetap dianggap tidak cakap karena berada di bawah pengampuan, misalnya karena gila, atau bahkan karena boros.

1. Suatu hal tertentu;

Mengenai hal tertentu, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya obyek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa obyek yang tertentu. Jadi tidak bisa seseorang menjual “sesuatu” (tidak tertentu) dengan harga seribu rupiah misalnya karena kata sesuatu itu tidak menunjukkan hal tertentu, tetapi hal yang tidak tentu.

1. Suatu sebab yang halal.

Hal ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal di sini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum Islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.” Menerangkan bahwa kesepakatan yang cacat walaupun dikatakan tiada sepakat yang sah, tetapi tidak berarti perjanjian itu batal karena sebenarnya telah terjadi kesepakatan, hanya saja kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan karena kesepakatannya terjadi karena adanya kehilafan, paksaan atau penipuan.

Sedangkan pada pasal 1322 KUH Perdata yang berbunyi “Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.” Ahmadi Miru dan Sakka Pati menjelaskan bahwa kekhilafan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seorang bermaksud membuat suatu perjanjian, kecuali jika perjanjian itu telah dibuat terutama karena mengingat dirinya orang tersebut.

Sedangkan menurut H. Hilman Hadikusuma, hapusnya perikatan, kata hapus berarti hulang, lenyap, menghapuskan berarti menghilangkan, meniadakan, menyatakan tidak berlaku lagi. Jadi hapusnya perikatan, artinya tidak berlakunya lagi suatu perikatan dikarenakan sesuatu hal, atau sesuatu perbuatan. Di dalam hukum suatu perikatan itu hapus dikarenakan adanya beberapa perbuatan hukum.[[89]](#footnote-89)

Menurut R. Subekti, jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya, justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikiran jika pelaksanaan perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang tercantum dalam kontrak tersebut.[[90]](#footnote-90)

Perjanjian dapat dibeda-bedakan menurut berbagai cara dengan pembedaan sebagai berikut : [[91]](#footnote-91)

1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak;

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana salah satu pihak saja yang dibebani suatu kewajiban.

1. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian alas hak membebani;

Perjanjian cuma-cuma yaitu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Sedangkan perjanjian alas hak membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu akan diimbangi kontra prestasi dari pihak lain, antar prestasi dan kontra prestasi tersebut terdapat hubungan menurut hukum meskipun kedudukannya tidak selalu harus sama.

1. Perjanjian konsensual, riil dan formil; dan

Perjanjian konsensual adalah adanya suatu perjanjian dirasa cukup apabila diantara para pihak ada kata sepakat. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian disamping adanya kata sepakat masih diperlukan secara nyata penyerahan bendanya. Namun untuk perjanjian formil merupakan perjanjian setelah diawali adanya kata sepakat diikuti dengan penyerahan barangnya selanjutnya diikuti pula adanya formalitas tertentu.

1. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah ada namanya seperti dalam buku III KUH Perdata Bab V smapai dengan Bab XVIII. Sebaliknya perjanjian tidak berdama adalah perjanjian yang tidak ada namanya seperti dalam buku III KUH Perdata Bab V sampai dengan Bab XVIII. Sedangkan perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang terdiri dari beberapa perjanjian bernama yang kemungkinan terdapat perjanjian tidak bernama.

Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang menderita kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu. Di Indonesia juga terdapat asas-asas yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Itikad Baik. Asas Kebebasan Berkontrak berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata adalah “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.” Sedangkan Asas Itikad Baik berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata adalah “Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

* + 1. **Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli Listrik di Amerika Serikat**

Di negara-negara maju yang menganut *civil law system,* seperti Perancis, Belanda, dan Jerman, pengadilan memberlakukan asas itikad baik bukan hanya dalam tahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam tahap perundingan (*the duty of good faith in negotiation*), sehingga janji-janji pra kontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.

Sedangkan di Indonesia, beberapa putusan pengadilan tidak menerapkan asas itikad baik dalam proses negosiasi, karena menurut teori klasik jika suatu perjanjian belum memenuhi syarat hal tertentu, maka belum ada suatu perjanjian sehingga belum lahir suatu perikatan yang mempunyai akibat hukum bagi para pihak. Akibatnya, pihak yang dirugikan karena percaya pada janji-janji pihak lawannya tidak terlindungi dan tidak dapat menuntut ganti rugi.

Namun di Amerika Serikat (AS) yang menganut *common law system,* pengadilan menerapkan doktrin *promissory estoppel* untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan karena percaya dan menaruh pengharapan (*reasonably relied*) terhadap janji-janji yang diberikan lawannya dalam tahap pra kontrak (*preliminiary negotiation*).[[92]](#footnote-92)

Michael James pada bukunya berpendapat mengenai pandangan komersial dari pentingnya hukum, bahwa :

“*The United States merits specific comment in view of its great commercial and consequent legal importance. Each of the states of the United States has its own separate system of law, but there are close resemblances between the laws of the different states in many areas, especially commercial matters. Furthermore, some matters are covered by federal laws.*”[[93]](#footnote-93)

Berdasarkan kutipan diatas maka AS pantas berkomentar secara spesifik dalam pandangan komersial dan konsekuensi dari pentingnya hukum. Setiap negara bagian di AS memiliki sistem hukum yang terpisah, tetapi terdapat kemiripan diantara hukum-hukum yang berlaku di setiap negara bagian, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang komersial. Hal-hal yang lebih lanjut, untuk beberapa masalah tertentu diatur oleh hukum federal.

Hukum kontrak AS mengatur mengenai kewajiban yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan tersurat maupun kesepakatan tersirat antara para pihak swasta dalam hukum AS. Hukum dari setiap negara bagian di AS bervariasi dan tidak ada Undang-Undang Federal yang mengatur mengenai kontrak. Walaupun undang-undang yang mengatur transaksi melibatkan penjualan barang telah menjadi standar yang sangat luas di seluruh negara bagian dari AS melalui penerapan *the Uniform Commercial Code.* Masih terdapat keragaman yang signifikan pada kontrak jenis lain, tergantung pada sejauh mana negara tertentu telah mengkodifikasikan hukum umum kontrak atau bagian yang diadopsi dari *the Restatement (second) of Contracts.*

*The Uniform Commercial Code* untuk selanjutnya disingkat UCC pertama kali diterbitkan pada tahun 1952 adalah satu dari sejumlah tindakan yang telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang dengan tujuan untuk menyelaraskan hukum penjualan dan transaksi komersial lainnya di seluruh AS melalui pengapdopsian UCC oleh seluruh 50 (lima puluh) negara bagian, Distrik Columbia dan yang menjadi bagian dari wilayah AS.[[94]](#footnote-94)

*The Restatement (second) of Contracts* adalah penetapan ulang yang kedua dari Undang-Undang Kontrak dari penataan kembali Undang-Undang dan berusaha untuk memberitahu kepada para hakim dan advokat mengenai prinsip-prinsip umum hukum kontrak. Ini adalah salah satu penetapan yang sering dikutip di semua yurisprudensi AS.[[95]](#footnote-95) Setiap mahasiswa hukum tahun pertama di AS seringkali mengutip hukum umum AS dibidang kontrak dan transaksi komersial dari *the Restatement (second) of Contracts.[[96]](#footnote-96)* Institusi Hukum AS mulai mengerjakan edisi kedua pada tahun 1962 dan menyelesaikannya pada tahun 1979. Versi yang digunakan saat ini memiliki hak cipta pada tahun 1981.[[97]](#footnote-97)

Para pihak diijinkan untuk menyetujui arbitrase sengketa yang timbul dari kontrak mereka. Berdasarkan *the Federal Arbitration Act* yang telah mencakup semua kontrak yang timbul menurut Undang-Undang Federal atau negara bagian. Klausula arbitrase pada umumnya dapat dilaksanakan kecuali jika pihak yang menolak arbitrase dapat menunjukkan kecurangan atau hal lain yang menggagalkan keseluruhan kontrak.

Stewart Macaulay melakukan penelitian intensif terhadap hukum kontrak AS dan menemukan bahwa eksistensi hukum kontrak itu tidak hanya dapat dibaca dalam kitab undang-undang dan dokumen-dokumen kontrak, melainkan juga dalam perilaku para pebisnis. Penelitian Macaulay kemudian menjadi tonggak dalam pemahaman kontrak di AS. Sebelum penelitian Macaulay dipublikasikan, orang-orang hanya melihat kontrak sebagai dokumen hukum dan setelah penelitian Macaulay, para pebisnis AS sering tidak mematuhi atau menggunakan kontrak yang notabene mereka buat sendiri, melainkan memilih “jalan bisnis” untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kontrak antara mereka. Dari data yang dikumpulkan oleh Macaulay, beliau menyimpulkan bahwa bagi para pebisnis di AS, kontrak tidak dipresepsikan sebagai sebuah dokumen legal, melainkan sebagai alat pertukaran. Sebuah dokumen hukum harus dijalankan, maka penggunaannya menjadi relatif, tergantung dari kemauan para pelakunya. Konsep dari pertukaran dalam konsep bisnis atau ekonomi adalah didasarkan pada efisiensi dan mencari keuntungan. Macaulay menamakan perilaku kontrak seperti tersebut diatas sebagai “*organic transaction*”.[[98]](#footnote-98)

Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan kewajiban timbal balik antara para pihak yang dapat diakui oleh hukum. Unsur-unsur dalam kontrak saling menguntungkan, pertimbangan, pihak-pihak yang berkompeten secara hukum dan tujuan hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Robert A. Hillman bahwa “*A contract is an independent source of rights and duties because of the normative significance of contracting. Parties make claims and justify their actions based on their contracts, believing that people should perform their agreements.*”[[99]](#footnote-99) Robert A. Hillman menyatakan dalam buku beliau bahwa kontrak adalah sumber hak dan kewajiban independen karena signifikansi normatif kontrak. Para pihak membuat klaim dan membenarkan tindakan mereka berdasarkan kontrak mereka, percaya bahwa orang harus melakukan kesepakatan mereka.

Janet Tai Landa dalam bukunya menyampaikan bahwa :

“*The institution of the law of contracts is even more necessary to the efficient functioning of a complex exchange economy with chains of intermediaries indirectly linking sellers and ultimate buyers. In a complex economy, characterized by specialization and division of labor among producers, consumers, and middlemen. Contract breach by an offending party can have significant third-party effects.*”[[100]](#footnote-100)

Terjemahan dari kutipan diatas adalah institusi hukum kontrak lebih diperlukan untuk memfungsikan ekonomi pertukaran yang kompleks dengan rantai perantara secara tidak langsung menghubungkan penjual dan pembeli akhir. Dalam ekonomi yang kompleks, ditandai dengan spesialisasi dan pembagian kerja antara produsen, konsumen, dan perantara. Pelanggaran kontrak oleh pihak yang menyinggung dapat memiliki efek pihak ketiga yang signifikan.

Kesepakatan bersama juga dikenal sebagai ratifikasi dan pertemuan pikiran yang biasanya dilakukan melalui proses penawaran dan penerimaan. Namun, kontrak juga bisa tersirat seperti pada *common law* bahwa persyaratan penerimaan yang diakui harus menjadi *“mirror image”* dari persyaratan penawaran. Setiap variasi merupakan penghitung balik.

Sebuah tawaran adalah bentuk kemauan oleh seorang yang menjanjikan untuk terikat secara hukum dengan ketentuan yang telah mereka tentukan, dibuat dengan cara yang masuk akal dalam menciptakan posisi orang yang berjanji untuk memahami dan menerima, jika kontrak telah dibuat, maka kontrak dapat dilaksankan. Biasanya seorang penawar diijinkan untuk mencabut tawaran mereka kapan pun sebelum diterima secara sah. Hal ini biasanya terjadi karena seorang pemberi tawaran adalah tuan dari penawaran.

Persetujuan adalah perjanjian atau kesepakatan, tindakan tegas atau tersirat dari ketentuan sebuah tawaran, termasuk cara penerimaan yang ditentukan, sehingga kontrak yang dapat dilaksanakan terbentuk. Dalam apa yang dikenal sebagai pertarungan format tertentu, ketika proses penawaran dan penerimaan tidak diikuti, masih dimungkinkan untuk memiliki kontrak yang dapat dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 2 § 2-207 UCC mengatur mengenai ketentuan tambahan dalam persetujuan atau konfirmasi. Pasal 2 § 2-207 UCC berbunyi :[[101]](#footnote-101)

1. *A definite and seasonable expression of acceptance or a written confirmation which is sent within a reasonable time operates as an acceptance even though it states terms additional to or different from those offered or agreed upon, unless acceptance is expressly made conditional on assent to the additional or different terms.*
2. *The additional terms are to be construed as proposals for addition to the*[*contract*](https://www.law.cornell.edu/ucc/2/2-106#contract_2-106)*.*[*Between merchants*](https://www.law.cornell.edu/ucc/2/2-104#Between Merchants_2-104)*such terms become part of the contract unless:*
3. *the offer expressly limits acceptance to the terms of the offer;*
4. *they materially alter it; or*
5. *notification of objection to them has already been given or is given within a reasonable time after notice of them is received.*
6. *Conduct by both parties which recognizes the existence of a*[*contract*](https://www.law.cornell.edu/ucc/2/2-106#contract_2-106)*is sufficient to establish a*[*contract for sale*](https://www.law.cornell.edu/ucc/2/2-106#Contract for sale_2-106)*although the writings of the parties do not otherwise establish a contract. In such case the terms of the particular contract consist of those terms on which the writings of the parties agree, together with any supplementary terms incorporated under any other provisions of this Act.*

Dalam ayat 1 Pasal 2 § 2-207 UCC mengatur mengenai persetujuan yang pasti dan dapat diterima atau dikonfirmasi secara tertulis yang dikirim dalam waktu yang wajar dapat berlaku sebagai persetujuan. Walaupun dalam persetujuan tersebut menyatakan persyaratan tambahan yang berbeda dari yang ditawarkan atau dari yang disepakati, kecuali jika penerimaan secara tegas dibuat bersyarat berdasarkan persetujuan dengan istilah tambahan atau berbeda. Sedangkan pada ayat yang ke-2 dijabarkan bahwa ketentuan tambahan dalam kontrak harus berbentuk proposal sebagai bentuk tambahan dari kontrak yang sudah ada. Antara para pedagang yang menjadi para pihak dalam kontrak kecuali apabila : tawaran tersebut secara tegas membatasi penerimaan; salah satu pihak mengubahnya secara material; atau pemberitahuan keberatan kepada salah satu pihak telah diberikan atau diberikan dalam waktu yang wajar setelah pemberitahuan diterima. Untuk ayat yang terakhir dijelaskan bahwa pelaksanaan oleh kedua belah pihak yang mengakui adanya kontrak cukup untuk menetapkan kontrak penjualan, walaupun tulisan-tulisan para pihak tersebut tidak membentuk kontrak. Dengan demikian, syarat-syarat kontrak tertentu terdiri dari syarat-syarat di mana tulisan-tulisan para pihak setuju, dan persyaratan tambahan serta ketentuan lain dalam undang-undang UCC ini.

Jadi pengertian kontrak di AS berdasarkan UCC lebih pada kewajiban total berdasarkan hukum yang berasal dari perjanjian pihak-pihak sebagaimana yang dipengaruhi oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam sistem *common law* di AS faktor-faktor yang mengakibatkan cacat atau batalnya suatu perjanjian antara lain :

1. Kekeliruan (*mistake*)

Pada dasarnya tidak semua kekeliruan menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Ada beberapa kekeliruan yang dianggap berdampak biasnya suatu perjanjian maka perjanjian tersebut batal khususnya apabila terdapat kekeliruan berkaitan dengan identitas para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

1. Perbuatan Curang (*misrepresentation*)

Apabila dalam proses perundingan dari sebuah perjanjian, salah satu pihak membuat pernyataan mengenai fakta dengan harapan supaya pihak lain menyetujui perjanjian atas fakta-fakta tersebut dan ternyata fakta-fakta tersebut tidak benar atau palsu, maka ini yang dinamakan dengan perbuatan curang.

1. Ketidakmungkinan (*imposibility*)

Kemustahilan atau ketidakmungkinan adalah alasan untuk tidak menjalankan tugas berdasarkan suatu kontrak berdasarkan perubahan keadaan, ketidakberadaan yang merupakan asumsi mendasar dari kontrak, yang membuat kinerja kontrak secara harafiah tidak mungkin.

1. Ketidakpraktisan (*impracticability*)

Ketidakpraktisan serupa dengan ketidakmungkinan karena dipicu oleh terjadinya suatu keadaan yang mencegah salah satu pihak memenuhi kontrak. Perbedaannya adalah bahwa ketidakmungkinan dapat memaafkan apabila kontrak tidak dapat dilaksanakan secara fisik, namun ketidakpraktisan berperan dimana kinerja masih dapat dilakukan secara fisik namun sangat memberatkan pihak lain. Dengan demikian maka ketidakmungkinan merupakan kondisi objektif sedangkan ketidakmampuan adalah kondisi subyektif bagi pengadilan untuk menentukannya.

1. Ketidaksahan (*illegality*)

Hal ini terjadi ketika kesepakatan dalam kontrak adalah hal-hal atau tindakan-tindakan yang melanggar peraturan maupun undang-undang yang berlaku dan bersifat illegal. Salah satunya adalah kontrak pembunuhan.

1. Perbuatan curang atau tidak pantas (*unclean hands*)[[102]](#footnote-102)

Suatu keadaan dimana pihak tergugat akan protes dengan menyatakan bahwa pihak penggugat tidak bisa mendapatkan bantuan dari pengadilan jika penggugat telah melakukan tindakan yang melanggar etika berkaitan dengan subyek di persediangan.

1. Ketidakmampuan (*unconscionability*)[[103]](#footnote-103)

Ketidakmampuan yang mengacu pada kontrak atau tawar menawar yang sangat tidak adil bagi suatu pihak sehingga idak ada orang yang beralasan atau berakal akan menyetujuinya. Dalam tuntutan untuk pelanggaran kontrak, pengadilan tidak akan menerapkan kontrak yang merugikan pihak yang dirugikan secara tidak adil dengan dasar pemikiran bahwa pihak yang dirugikan tersebut disesatkan, tidak memiliki informasi, atau menandatangani dengan paksaan atau kesalahpahaman. Hal ini mirip dengan yang dinamakan *adhesion contract* dimana satu pihak telah memanfaatkan seseorang dengan menggunakan kelemahan dari orang tersebut.

1. Kesesuaian dan kepuasan (*accord and satisfaction*)[[104]](#footnote-104)

Kesesuaian dan kepuasan adalah konsep kontrak hukum tentang pembelian pelepasan dari kewajiban hutang. Hal ini adalah salah satu metode dimana para pihak dalam sebuah kontrak dapat mengakhiri kesepakatan mereka. Pelepasan ini diselesaikan dengan transfer pertimbangan berharga yang tidak boleh menjadi kinerja aktual dari kewajiban itu sendiri. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan untuk melunasi kewajiban dan kepuasan adalah sebagai pertimbangan hukum yang mengikat para pihak dalam kesepakatan tersebut. Kesepakatan yang benar tidak akan melepaskan kontrak sebelum masa berlaku kontrak habis. Sebagai gantinya ia kaan menangguhkan hak untuk menegakkannya sesuai dengan persyaratan kontrak kesepakatan, di mana kepuasan, atau kinerja kontrak akan membebaskan kedua kontrak yang asli dan kesepakatannya. Apabila kreditur melanggar kesepakatan tersebut, maka debitur akan dapat memunculkan keberadaan kesepakatan tersebut untuk memerintahkan tindakan apapun terhadapnya.

* 1. **Tinjauan Mengenai Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Penjual dan Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik di Indonesia dan di Amerika Serikat**
     1. **Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Penjual dan Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik di Indonesia**

Putusan ahli diatas tidak mengikat para pihak, karena ketika para pihak tidak dapat menerima putusan ahli, maka para pihak dapat menentukan salah satu Badan Arbitrase berikut untuk mendapatkan putusan akhir yang mengikat kedua belah pihak, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), dan Badan Arbitrase lainnya yang ditunjuk oleh para pihak.

Kosakata sengketa adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris *conflict* atau *dispute,* yang secara substantif maknanya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmfull*), melainkan membangun (*constructive*), menarik/menantang (*chalenging*) serta dinamis sebagai katalisator perubahan (*a catalyst of change*). Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain. Lazimnya, sengketa dimulai dari perasaan tidak puas yang dialami oleh perorangan atau kelompok. Jika perasaan tidak puas disampaikan kepada pihak kedua dan pihak kedua menanggapi dan dapat memuaskan pihak pertama, maka selesailah konfliknya. Sebaliknya, jika perbedaan pendapat tersebut terus berlanjut, maka akan terjadi sengketa. Sengketa dalam pengertian sehari-hari adalah suatu keadaan dimana pihak-pihak yang melakukan perniagaan mempunyai masalah, yaitu menghendaki pihak lian untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, tetapi pihak lainnya menolak. Sengketa ialah adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan, karena hak satu di antara dua pihak terganggu atau dilanggar.[[105]](#footnote-105)

Pada tanggal 3 Desember 1977, atas prakarsa dari Prof. Dr. Subekti, S.H. (Mantan Ketua Mahkamah Agung), Harjono Tjitrosubono, S.H. didirikanlah Badan Arbiterasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa komersial yang bersifat otonom dan independen. Pendirian BANI didukung penuh oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, yaitu oleh Marsekal (purn) Suwoto Sukendar (Ketua) dan Julius Tahya (anggota pengurus). Selain itu pendirian ini juga telah mendapat restu dari Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Bappenas dan juga Presiden Republik Indonesia.[[106]](#footnote-106)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar BANI, BANI adalah sebuah badan yang didirikan atas prakarsa KADIN Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul berkaitan dengan perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. BANI merupakan lembaga peradilan yang mempunyai status bebas, otonom dan juga independen, artinya BANI tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan yang lain, selayaknya lembaga peradilan yang independen. Dengan demikian BANI diharapkan dapat bersikap objektif, adil, dan jujur dalam memandang dan memutuskan perkara yang dihadapinya nanti.

Salah satu yang dapat menunjukkan keindependenan BANI adalah dengan metode pengangkatan kepengurusannya yang untuk pertama kali diangkat oleh Ketua KADIN, dan selanjutnya berbentuk yayasan. Proses pembentukan yayasan inilah yang dapat menunjukkan kemandirian dan independensi BANI, sebagai lembaga yang bukan berada di bawah kepentingan lembaga (KADIN).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 48 Tahun 2009), metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diakui, di mana dinyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur secara umum dalam Bab XII Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Lembaga BANI berkedudukan di Jakarta dan memiliki kantor perwakilan dibeberapa kota besar di Indonesia termasuk diantaranya adalah Surabaya, Denpasar, Bandung, Medan, Pontianak, Palembang, dan Batam.[[107]](#footnote-107)

BANI merupakan lembaga yang menyelenggarakan penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi bisnis mengenai perdagangan, industri, dan keuangan. Dalam menjalankan kegiatan di lapangan usaha bisnis, merupakan suatu kebutuhan mutlak agar suatu sengketa dapat ditangani dan diselesaikan secara cepat dan adil.[[108]](#footnote-108)

Hal ini dikarenakan semakin lambatnya sengketa tersebut diselesaikan akan semakin besar pula biaya dan juga kerugian yang dapat diderita oleh para pelaku usaha. Maka dalam rangka untuk mendapatkan penyelesaian suatu sengketa secara cepat dan adil tersebut, para pelaku usaha akhirnya memilih metode penyelesaian sengketa berupa arbiterase sebagai bentuk penyelesaian yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan mengupayakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Disinilah BANI berperan sebagai lembaga independen yang menyediakan sarana untuk menyelenggarakan proses arbitrase tersebut serta para ahli yang berpengalaman dan kompeten sebagai arbiter, yang memberikan pertimbangan-pertimbangannya berdasarkan keahlian serta hukum yang ada dalam bentuk putusan arbitrase. Secara umum BANI didirikan untuk tujuan berikut :[[109]](#footnote-109)

1. Dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia menyelenggarakan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri dan keuangan, melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya dalam bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, fabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, *franchise,* konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, penginderaan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional.
2. Menyelenggarakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan pemberian pendapat yang mengikat sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI atau peraturan prosedur lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan.
3. Bertindak secara otonom dan independen di dalam penegakan hukum dan keadilan.
4. Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Terkait dengan sengketa-sengketa yang dapat diperkarakan melalui metode arbitrase di BANI, pada dasarnya kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang merumuskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanyalah sengketa di bidang perdagangan, sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa dan sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian. Hal yang dimaksud ini adalah kepentingan perdata yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran dapat diadakan perdamaian, akan tetapi perdamaian ini tidak akan menghalangi kewenangan jaksa untuk menuntut perkaranya secara pidana, dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkara pidana baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran termasuk sebagai perkara yang tidak dapat didamaikan). Dalam hal ini beberapa bidang sengketa yang dapat diperkarakan melalui arbitrase, yaitu antara lain : korporasi, asuransi, lemabga keuangan, perbankan, telekomunikasi, fabrikasi, pertambangan, angkutan laut dan udara, lingkungan hidup, perdagangan, lisensi, *franchise,* distribusi dan keagenan, hak kekayaan intelektual, maritim dan perkapalan, konstruksi, pengideraan jarak jauh, dan lain-lain.

United Nations Commission On International Trade Law yang selanjutnya disingkat UNCITRAL merupakan suatu komisi yang didirikan pada bulan desember 1966 dengan tujuan untuk mengharmonisasikan dan melakukan unifikasi suatu hukum yang fokus ke perdagangan internasional dari negara yang dipersyaratkan menjadi anggota UNCITRAL. Tetapi dalam implementasinya UNCITRAL bekerja sama dengan organisasi atau lembaga yang relevan seperti *International Council for Commercial Arbitration* (ICCA) untuk beberapa isu arbitrase. Beberapa instrumen prinsip yang diadopsi oleh UNCITRAL adalah sebagai berikut :

1. *The UNCITRAL Arbitration Rules, 1976.*
2. *The UNCITRAL Conciliation Rules, 1980.*
3. *Guidelines for Administering Arbitration, 1982.*
4. *The Model Law on International Commercial Arbitration, 1985.*
5. *Guidelines on Pre-Hearing Conferences.*

Model hukum (*the Model Law*) arbitrase perdagangan internasional merupakan sebuah model untuk negara-negara yang mengadopsi ke dalam hukum nasionalnya di bidang arbitrase perdagangan internasional. Tujuan utama UNCITRAL adalah untuk mempersiapkan suatu model hukum yang ideal dalam menghadapi divergensi yang ada dalam penggunaan aturan-aturan arbitrase dan hukum nasional.

Akan tetapi *Model Law* ini tidak menangani setiap persoalan yang berhubungan dengan arbitrase perdagangan internasional. Sebagai dampaknya negara-negara sering memasukkan pasal-pasal tambahan (*additional provisions*) ke dalam hukum nasional masing-masing negara yang mengadopsi *the Model Law. The Model Law* dapat dimodifikasi oleh negara-negara anggota, seperti beberapa negara telah memodifikasinya, sehingga dapat diterapkan ke dalam hukum nasional tanpa diskriminasi (*equally*).

Sebelum *the Model Law* mulai digunakan, hanya ada dua instrumen utama yang menangani arbitrase perdagangan internasional dalam sistem di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua instrumen tersebut adalah *The United Nations Convention on the Recognition and Enforcement on Foreign Arbitral Awards,* 1958, dan *The UNCITRAL Arbitration Rules,* 1976.

*New York Convention* 1958 menyiapkan pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri (asing) dan perjanjian arbitrase. Konvensi ini adalah salah satu konvensi yang tersukses dalam hubungan internasional yang telah ditandatangani oleh 120 negara per 16 Desember 1998. Akan tetapi, konvensi ini dalam praktiknya terpisah dengan ketentuan domestik masing-masing negara anggota konvensi yang berakibat pada interpretasi yang berbeda. Disamping itu konvensi ini juga tidak menangani prosedur arbitrase.

*The UNCITRAL Arbitration Rules,* 1976 justru sebaliknya. Prosedur arbitrase menjadi salah satu *subject matters* meskipun dalam batasan tertentu. Hal pertama yang dilakukan adalah mengunifikasi penerapan hukum nasional dalam arbitrase. Jadi, *the UNCITRAL Arbitration Rules* 1976 didesain sebagai arbitrase *ad hoc.* Sebuah draft *Model Law* mulai diprakarsai dengna meluaskan lingkup dari instrumen pada tahun 1982. Tujuan dari *Model Law* adalah untuk mempromosikan penyatuan prosedur arbitrase dan mengalamatkannya pada kebutuhan mendasar dari arbitrase perdagangan internasional. Akhirnya pada tanggal 21 Juni 1985 UNCITRAL diadopsi dan Majelis Umum PBB juga mengadopsinya pada tanggal 11 Desember 1985.

Prinsip dasar dari *the Model Law* adalah pengakuan terhadap kebebasan para pihak untuk melaksanakan arbitrase dengan batasan atau larangan yang minimal, sehingga pada kenyataannya, banyak pasal-pasal dalam *the Model Law* yang diderogasi oleh para pihak. *The Model Law* juga mengakui peranan yang dimainkan oleh lembaga-lembaga arbitrase dalam arbitrase perdagangan internasional. Hal ini berdasarkan Pasal 2 huruf d bahwa :

“*where a provisions of this law, except article 28 (concerning the rules applicable to the substance of the dispute), leaves the parties free to determine a certain issues such freedom includes the right of the parties to authorize a third party, including an institution, to make that determination.”*

Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan-aturan arbitrase dapat digunakan baik arbitrase yang bersifat *ad hoc* maupun permanen. Ruang lingkup utama dari UNCITRAL *Model Law* adalah :

1. Bentuk dan definisi perjanjian arbitrase;
2. Pengangkatan arbitrase tribunal;
3. Hukum yang dapat diterapkand alam arbitrase;
4. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase.

UNCITRAL *Model Law* mengatur mengenai kemungkinan campur tangan pengadilan dalam hal pengambilan putusan provisional atau putusan sementara. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diatur Pasal 32 yaitu kemungkinan arbiter atau majelis arbiter Indonesia mengambil putusan provisional atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.[[110]](#footnote-110)

Dalam lingkup aplikasi, *the Model Law* merujuk pada Pasal 1 dengan bebrapa pengecualin pada Pasal 8, 9, 35, dan 36. Adapun perjanjian arbitrasenya dapat dilihat pada Pasal 7 *the Model Law.* Demikian pula jumlah arbitrase dapat ditunjuk satu atau tiga orang (Pasal 10), termasuk di dalamnya prosedur pengangkatan (Pasal 11 ayat 1 dan 3). Dalam kaitannya dengan proses persidangan arbitrase, para pihak diberi kebebasan untuk menentukan prosedur yang tepat (Pasal 19), termasuk di dalamnya substansi hukum apa yang tepat untuk digunakan (Pasal 28 ayat 1 dan 2). Sedangkan dalam konteks pelaksanaan dan penerapan putusan dapat saja ditolak jika :

1. Invalid;
2. Salah satu pihak tidak memberikan pemberitahuan tentang pengangkatan arbitrator dan atau proses arbitrase;
3. Putusan arbitrase melebihi lingkup perjanjian yang dilakukan;
4. Komposisi dari tribunal arbitrase yang tidak sesuai dengan perjanjian para pihak;
5. Pengadilan menemukan bahwa persoalan yang diajukan ke arbitrase adalah bukan persoalan yang dapat atau harus diselesaikan melalui lembaga arbitrase;

Putusan arbitrase bertentangan dengan kebijakan publik dari negara (Pasal 34 dan 36).

* + 1. **Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Antara Penjual dan Pembeli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Listrik di Amerika Serikat**

Alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa di Amerika Serikat (AS) adalah salah satu *co-optation* dari apa yang menjadi tantangan serius terhadap pendekatan formalistik dan legalistrik terhadap pemecahan masalah hukum dan sosial. Saat ini telah di lembagakan untuk penggunaan yang lebih formal di pengadilan.[[111]](#footnote-111) Pada saat yang sama, penggunaan bentuk penyelesaian sengketa yang privat melalui mediasi, arbitrase dan bentuk penyelesaian sengketa baru yang disahkan diantara para pihak yang bersengketa dapat menolak atau menggunakan sistem peradilan formal dalam menyelesaikan sengketa mereka mulai mengalami peningkatan.

Konsekuensi dari peningkatan penggunaan bentuk penyelesaian sengketa secara privat meliputi kesulitan bagi individu yang tidak dapat menanggung biaya peradilan formal, dan minat yang masih relatif kurang terhadap pelayanan peradilan. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, konsumen dan karyawan telah terikat pada komitmen kontraktual untuk mewajibkan arbitrase. Hal ini didukung oleh Mahkamah Agung AS yang memiliki semua tetapi menghilangkan pilihan tentang dimana menyelesaikan suatu sengketa tertentu.[[112]](#footnote-112) Peraturan formal dalam penyelesaian perselisihan di AS saat ini setidaknya berdasarkan pada sumber hukum berikut ini :[[113]](#footnote-113)

1. Konstitusi Amerika Serikat;

Kontitusi AS berperan terhadap proses apa yang ada dalam prosedur publik dan badan pemerintahan apa yang diberi fungsi untuk penyelesaian sengkta, dan pemisahan wewenang.

1. Perundang-Undangan Federal;

Perundang-undangan federal mencakupi Undang-Undang Reformasi Peradilan Perdata tahun 1990, Penyelesaian Sengketa Administratif Undang-Undang Resolusi 1996, Undang-Undang Alternatif Penyelesaian Sengketa Tahun 1998.

1. Aturan Federal mengenai Prosedur Sipil;
2. Yurisprudensi hukum umum dan banyak preseden dari Mahkamah Agung AS dan pengadilan federal terhadap banyak permasalahan ADR termasuk arbitrase yang diwajibkan, kerahasiaan, keistimewaan, penegakan hukum berdasarkan itikad baik, dan persyaratan lainnya;
3. Peraturan agensi yang bersifat administratif diberbagai bidang studi, termasuk peraturan sekuritas, ligitasi sipil, energi dan lingkungan, pendidikan, bisnis dan perdagangan, pengadaan tenaga kerja dan militer;
4. Perundang-undangan negara bagian yang termasuk didalam Amerika Serikat;
5. Hukum dan putusan negara bagian;
6. *Uniform Mediation Act* atau yang juga dikenal sebagai *Uniform Arbitration Act*  untuk membuat aturan dasar bagi negara bagian dalam mengatur tentang peraturan perundang-undangan dalam aspek penyelesaian sengketa;
7. Kontrak pribadi yang menentukan kondisi dan peraturan untuk penyelesaian sengketa, sering kali ditegakkan oleh pengadilan, membuat peraturan umum dengan efek yang sangat bersifat preseden dan termasuk hubungan masyarakat, asosiasi perdagangan, kelembagaan dan organisasi resolusi perselisihan internal;
8. Hukum keputusan swasta,misalnya penghargaan arbitrase dalam bidang investasi dan tenaga kerja serta penghargaan paling pribadi misalnya arbitrase komersial;
9. Sistem aturan organisasi swasta.

*American Arbitration Association Rules for arbitration, mediation, International Institute for Conflict Prevention and Resolution,* dan *Association of Conflict Resolution* termasuk didalamnya.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Perbandingan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat**

**3.1.1 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) di Indonesia**

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat PJBL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disingkat PT PLN (Persero) selaku pembeli dan Badan Usaha selaku penjual tenaga listrik di Indonesia. Pokok-Pokok yang diatur dalam PJBL meliputi aspek komersial untuk seluruh jenis pembangkit, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik tenaga biomassa diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017. Sedangkan untuk pokok-pokok dalam PJBL yang berkaitan dengan pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan yang bersifat intermitten atau tidak terus menerus[[114]](#footnote-114), pembangkit listrik tenaga air dibawah 10 MW (sepuluh *megawatt*), pembangkit listrik tenaga biogas, dan pembangkit listrik berbasis sampah kota diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri. Para pihak dalam PJBL antara lain :

1. Pembeli, yang meliputi :

* PT PLN (Persero)

1. Penjual, yang meliputi :

* Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
* Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
* Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia;
* Koperasi; dan
* Swadaya Masyarakat di bidang usaha pembangkitan tenaga listrik.

PJBL antara PT PLN (Persero) dengan Badan Usaha setidaknya harus memuat 14 (empat belas) ketentuan berdasarkan Pasal 3 sampai dengan Pasal 28 Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017, antara lain :

1. Jangka Waktu PJBL;

Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak terlaksananya *Commercial Operation Date* yang selanjutnya disingkat COD dengan mempertimbangkan jenis pembangkit yang digunakan. Pola kerjasama yang digunakan adalah “Membangun, Memiliki, Mengoperasikan dan Mengalihkan” atau yang dikenal juga dengan BOOT (*Bulid, Own, Operate and Transfer*) dengan harga jual tenaga listrik dihitung berdasarkan nilai investasi yang didepresiasi paling sedikit selama 20 (dua puluh) tahun.

Depresiasi atau penyusutan dalam akuntasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan.[[115]](#footnote-115)

1. Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli;
2. Hak Penjual (Badan Usaha)

* Menerima pembayaran sesuai dengan harga jual tenaga listrik yang tercantum pada PJBL;
* Mendapat insentif percepatan COD jika percepatan tersebut merupakan permintaan dari Pembeli yaitu PT PLN (Persero); dan
* Mendapatkan keadaan dimana listrik tidak dapat dialirkan akibat kesalahan dari PLN[[116]](#footnote-116) (*deemed dispatch)* jika jaringkan PT PLN (Persero) terganggu bukan dikarenakan keadaan kahar (*force majeur*).
* Hak penjual lainnya yang tertuang dalam PJBL.

1. Hak Pembeli (PT PLN (Persero))

* Memperoleh penyaluran tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan dari pembangkit tenaga listrik;
* Mendapat setiap persetujuan yang diperlukan berkaitan dengan PJBL; dan
* Hak pembeli lainnya yang tertuang dalam PJBL.

1. Kewajiban Penjual (Badan Usaha)

* Merancang, mendanai, membangun, memiliki, mengoperasikan, dan mentransfer pembangkit tenaga listrik, dan juga transmisi tenaga listrik jika diperlukan;
* Memberikan jaminan pelaksanaan proyek (*performance guarantee*), dan jaminan kerja berupa penalti yang akan dibayarkan jika gagal menyelesaikan pelaksanaan proyek maupun keterlambatan pelaksanaan COD;
* Menyampaikan rencana penyediaan tenaga listrik (*projected AF*) bulanan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017, *projected availability factor* adalah faktor ketersediaan, perbandingan antara jumlah produksi tenaga listrik dalam *kilowatt hour* (kWh) yang dibangkitkan dan diambil oleh PT PLN (Persero) terhadap jumlah produksi tenaga listrik terpasang dalam jumlah produksi listrik maksimal yang mungkin dapat dibangkitkan berdasarkan *net dependable capacity*;
* Mengirim dan menjual tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) sesuai dengan *projected AF*, namun apabila Badan Usaha tidak dapat mengirimkan tenaga listrik sesuai dengan PJBL dan hal ini disebabkan oleh kegagalan dan/atau kelalaian Badan Usaha maka Badan Usaha wajib membayar penalti kepada PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017;
* Mengurus semua perizinan yang diperlukan;
* Memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri berdasarkan Peraturan Mentri Perindustrian Nomor 54/M-IND/PER/3/2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
* Menjaga keberlangsungkan pasokan tenaga listrik selama PJBL berlaku;
* Tidak mengkompensasikan suatu kerugian pada salah satu proyek sebagai pengurah pendapatan di proyek lain jika Penjual memiliki lebih dari 1 (satu) proyek; dan
* Kewajiban penjual lainnya yang tertuang dalam PJBL.

1. Kewajiban Pembeli (PT PLN (Persero))

* Memberikan insentif percepatan pelaksanaan COD kepada Penjual jika percepatan merupakan permintaan Pembeli;
* Menyerap dan membeli tenaga listrik yang dihasilkan oleh Penjual sesuai dengan PJBL yang telah disepakati dalam periode tertentu, namun apabila PT PLN (Persero) tidak dapat menyerap tenaga listrik sesuai PJBL disebabkan kesalahan PT PLN (Persero), maka PT PLN (Persero) wajib membayar penalti kepada Badan Usaha selama periode tertentu yang ditetapkan secara proporsional sesuai dengan komponen investasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 16 Ayat (2) dan (3) Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017;
* Membayar *deemed dispatch* jika jaringan tenaga listrik Pembeli terganggu bukan karena alasan keadaan kahar (*force majeur*);
* Memelihara dan menjaga keandalan fasilitas jaringan untuk menerima tenaga lsitrik dari Penjual; dan
* Kewajiban pembeli lainnya yang tertuang dalam PJBL.

1. Alokasi Risiko;

Dalam PJBL para pihak harus mencantumkan alokasi risiko yang ditanggung Badan Usaha selaku penjual maupun PT PLN (Persero) selaku pembeli yaitu perubahan kebijakan atau regulasi (*government force majeure*) dan keadaan kahar (*force majeure*). Risiko-risiko lain yang ditanggung dan akan diatur lebih lanjut dalam PJBL, antara lain :

1. Risiko terhadap PT PLN (Persero), yang meliputi :

* Kebutuhan tenaga listrik/beban; dan
* Kemampuan transmisi yang terbatas.

1. Risiko terhadap Badan Usaha, yang meliputi :

* Masalah pembebasan lahan;
* Perizinan termasuk izin lingkungan;
* Ketersediaan bahan bakar;
* Ketepatan jadwal pembangunan; dan
* Peforma pembangkit.

1. Jaminan Pelaksanaan Proyek;

Jaminan pelaksanaan proyek harus diberikan Badan Usaha kepada PT PLN (Persero) berupa jaminan kinerja proyek (*performance security*) yang terdiri dari 3 (tiga) tahap yang berlaku sejak PJBL ditandatangani sampai dengan *financing date* yang disepakati, antara lain :

1. Tahap 1 (satu)

Jaminan untuk menjamin pencapaian tahap kemampuan pendanaan (*financing date*).

1. Tahap 2 (dua)

Jaminan untuk menjamin pencapaian waktu komisioning (*commissioned date*).

1. Tahap 3 (tiga)

Jaminan untuk menjamin pencapaian pelaksanaan COD.

1. Komisioning dan COD;

COD adalah tanggal mulai beroperasinya pembangkit tenaga listrik untuk menyalurkan energy listrik ke jaringan tenaga listrik milik PT PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017. Ketentuan mengenai komisioning dan COD pembangkit tenaga listrik berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

Dalam mengoperasikan pembangkit tenaga listrik harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*) pada sistem sesuai dengan wilayah beroperasinya pembangkit tenaga listrik tersebut. Namun apabila dalam Sistem Tenaga Listrik belum memiliki aturan jaringan tersebut maka akan ditetapkan oleh Direktur Jendral atau pengoperasian pembangkit tenaga listrik dapat mengikuti aturan jaringan tenaga listrik yang telah ada sebelumnya.

Pelaksanaan COD dapat dipercepat jika diminta oleh PT PLN (Persero) dan Badan Usaha berhak mendapatkan insentif yang dituangkan dalam PJBL dan ditentukan secara *business to business.* Transaksi secara *business to business* adalah transaksi yang dilakukan secara fisik maupun elektronik yang terjadi antara entitas bisnis satu dengan entitas bisnis lainnya. Pengertian transaksi secara *business to business*  dalam lingkup elektronik menurut Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom adalah sistem komunikasi bisnis *online* antar pelaku bisnis.[[117]](#footnote-117)

Apabila dalam pelaksanaan COD terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian Badan Usaha, maka Badan Usaha akan dikenakan *liquidated damage penalty.* Berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) *liquidated damage penalty* adalah penggantian biaya senilai dengan biaya pembangkitan oleh PT PLN (Persero) untuk mengganti daya yang dibangkitkan akibat keterlambatan pelaksanaan COD.

Ganti rugi dalam jumlah tertentu atau yang dikenal dengan *liquidated damaged* adalah jumlah ganti rugi yang telah ditetapkan dalam kontrak terkait adanya pelanggaran, atau jika kontrak mengandung klausul menghukum (*penalty*) jika pelanggaran terjadi. Jumlah ganti rugi tersebut tidak melebihi dari yang telah diperjanjikan oleh para pihak dalam kontrak.[[118]](#footnote-118)

1. Pasokan Bahan Bakar;

PT PLN (Persero) maupun Badan Usaha dalam melakukan penyediaan bahan bakar, namun apabila pasokan bahan bakar disediakan oleh PT PLN (Persero) maka ketentuan berikut harus dipenuhi, yaitu :

1. Badan Usaha menjamin konsumsi bahan bakar spesifik (*Specific Fuel Consumption/SFC*) atau tara kalor spesifik (*Spesific Heat Rate/SHR*) berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam PJBL;
2. Badan Usaha harus memonitor biaya pengadaan batubara sesuai dengan kontrak yang mencerminkan efektifitas dan efisiensi biaya pengadaan; dan
3. Pemasok bahan bakar gas harus menjamin keberlangsungan pasokan gas dan harus membayar penalti jika tidak bisa memenuhi kesepakatan yang dikenal dengan istilah *deliver or pay*.
4. Transaksi;

Pembayaran atas transaksi pembelian tenaga listrik wajib menggunakan mata uang Rupiah (IDR) kecuali jika mendapat pengecualian dari Bank Indonesia, pembayaran dapat menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD). Apabila menggunakan USD seabgai mata uang pembayaran maka nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR).[[119]](#footnote-119)

Harga jual yang digunakan sesuai dengan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri dan PT PLN (Persero) dapat membeli tenaga listrik melebihi AF atau yang tertera dalam PJBL dengan harga berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017.

1. Pengendalian Operasi Sistem;

Pengendalian Operasi Sistem (*Dispatcher*) harus membuat perencanaan dan berperan untuk mengatur operasi sistem (*dispatch*) pembangkit tenaga listrik untuk menjaga keandalan Sistem Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*) pada sistem setempat.

Dalam perencanaan dan pelaksanaannya harus mempertimbangkan kondisi pembangkitan dengan biaya termurah (*least cost*) dan teknis operasional pembangkit dalam memenuhi prakiraan beban, dengan tetap memperhatikan kendala jaringan dan standar kualitas pelayanan dan ketentuan yang ada dalam PJBL terkait.

Operasi sistem (*dispatch*) untuk setiap pembangkit tenaga listrik harus dideklarasikan dan dilaporkan ke Mentri c.q. Direktur Jendral setiap bulannya. Laporan tersebut juga memuat pelanggaran terhadap Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik (*Grid Code*) pada sistem setempat yang dilakukan oleh para pihak.

1. Penalti Terhadap Kinerja Pembangkit;

Kinerja pembangkit tenaga listrik yang disepakati oleh para pihak dapat dinyatakan dengan nilai aktual dari AF atau CF, *heat rate,* maupun ketentuan teknis lainnya yang disepakati dalam PJBL. Ketika nilai aktual tidak sesuai dengan nilai yang disetujui bersama antara para pihak, maka pihak yang bersalah akan dikenakan penalti. Penalti yang dimaksud, antara lain :

1. *Liquidated damaged* (LD);

Penalti akibat keterlambatan mencapai COD sesuai dengn PJBL yang besarnya proposional dengan biaya yang dikeluarkan oleh PT PLN (Persero), dikarenakan tidak adanya energi yang dijanjikan.

1. Penalti AF atau CF;

Penalti ditetapkan sebesar biaya yang harus dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) dikarenakan tidak adanya energi yang dijanjikan.

1. Penalti *outage factor* (OF);

Penalti ditetapkan sebesar biaya yang harus dikeluarkan oleh PT PLN (Persero) dikarenakan tidak adanya energi yang dijanjikan.

1. Penalti tara kalor (*heat rate*);

Penalti di diberlakukan khusus untuk pembangkit berbahan bakar gas dan gas tersebut disiapkan oleh PT PLN (Persero) dan pembangkit dengan bahan bakar batubara. Nilai penalti berupa PT PLN (Persero) selaku pembeli membayar komponen bahan bakar (komponen C) sesuati dengan tara kalor (*heat rate*) yang diperjanjikan dalam PJBL. Penetapan nilai penalti dengan cara harga gas dikalikan selisih tara kalor (*heat rate*) yang diperjanjian dengan tara kalor (*heat rate*) aktual.

1. Penalti kegagalan memikul *mega volt ampere reactive* (MVAR);

Penalti yang diakibatkan karena pembangkit tenaga listrik milik Badan Usaha gagal untuk memikul MVAR di sistem interkoneksi PT PLN (Persero). Namun penalti ini tidak dapat berlaku apabila hal tersebut terjadi atas permintaan Pengendali Operasi Sistem (*dispatcher*).

1. Penalti kegagalan menjaga frekuensi; dan

Penalti yang diakibatkan oleh pembangkit tenaga listrik milik Badan Usaha yang gagal memenuhi ketentuan dalam *Grid Code* pada sistem setempat.

1. Penalti kecepatan naik turun beban (*ramp rate*).

Penalti dikenakan terhadap pembangkit tenaga listrik milik Badan Usaha yang tidak mampu mencapai jumlah dan waktu perubahan pembebanan memenuhi operasi sistem (*dispatch*).

1. Pengakhiran PJBL;

PJBL dapat diakhiri apabila masa PJBL berakhir, pendanaan tidak tercapai, Badan Usaha bangkrut atau dilikuidasi, keadaan kahar (*force majeur*), atau salah satu pihak mengakhiri PJBL yang dikarenakan : perizinan tidak terbit; tidak mendapatkan pendanaan; atau biaya tidak terduga yang terlalu besar.

Pengakhiran PJBL harus dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jendral berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017. Sedangkan mekanisme dan konsekuensi atas pengakhiran PJBL akan dituangkan dalam PJBL.

1. Pengalihan Hak;

Pengalihan hak kepemilikian atas Badan Usaha tidak dapat dialihkan sampai dengan pembangkit tenaga listrik mencapai COD, namun dapat dikecualikan apabila pengalihan dilakukan terhadap afiliasi yang sahamnya dimiliki lebih dari 90% (Sembilan puluh persen) oleh penyandang dana (sponsor) yang akan mengalihkan saham.

Pengalihan hak kepemilikan dapat dilakukan setelah mencapai COD dan telah mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PT PLN (Persero) dan dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jendral. Sedangkan untuk pengalihan hak pembangkit listrik tenaga panas bumi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang panas bumi.

1. Persyaratan Penyesuaian Harga;

Penyesuaian harga jual tenaga listrik dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan unsur biaya dan teknis yang berdasarkan pada :

1. Peraturan terkait harga jual tenaga listrik;
2. Peraturan perpajakan;
3. Peraturan lingkungan;
4. Peraturan terkait biaya energy; dan/atau
5. Kesepakatan yang tertuang dalam PJBL.
6. Penyelesaian Perselisihan; dan

Setelah PJBL disepakati dan ditandatangani oleh para pihak, apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui 3 cara, antara lain :

1. Perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka perselisihan akan diserahkan kepada ahli yang disepakati untuk mendapatkan putusan ahli;
3. Apabila para pihak tidak dapat menerima putusan ahli, maka perselisihan akan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), atau Badan Arbitrase lainnya yang ditunjuk oleh para pihak. Putusan dari Badan Arbitrase tersebut merupakan putusan akhir yang mengikat kedua belah pihak. Menurut Sujana Donandi S. dan Etty Susilowati arbitrase merupakan penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut arbiter.[[120]](#footnote-120)
4. Keadaan Kahar (*force majeur*).

PT PLN (Persero) dan Badan Usaha dibebaskan dari kewajibannya apabila terjadi *force majeur,* keadaan yang dimaksud meliputi : bencana alam (*natural force majeure*); perubahan peraturan perundang-undangan; atau perubahan kebijakan pemerintah (*government force majeure*). Apabila terjadi *force majeur* yang disebabkan oleh bencana alam menyebabkan tertundanya pelaksanaan COD maka jadwal pelaksanaan COD dapat diperpanjang sesuai dengan waktu berlangsungnya bencana alam termasuk waktu untuk perbaikan yang diperlukan pada proyek tersebut.

Menurut Frans Satriyo Wicaksono, keadaan kahar atau yang dikenal dengan *force majeur* adalah keadaan dimana jika pada saat kontrak berlangsung ternyata ditemukan kejadian yang termasuk dalam golongan keadaan memaksa, atau yang disebut juga *overmacht*.[[121]](#footnote-121)

**3.1.2 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) di Amerika Serikat**

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di Amerika Serikat atau yang dikenal dalam bahasa Inggris adalah *Power Purchase Agreement* selanjutnya disingkat PPA menurut Albert Thumann dan Erick A. Woodroof bahwa :[[122]](#footnote-122)

“*A power purchase agreement (PPA), or electricity power agreement, is a contract between two parties, one which generates electricity (the seller) and one which is looking to purchase electricity (the buyer). The PPA defines all of the commercial terms for the sale of electricity between the two parties, including when the project will begin commercial operation, schedule for delivery of electricity, penalties for under delivery, payment terms, and termination. A PPA is the principal agreement that defines the revenue and credit quality of a generating project and is thus a key instrument of project finance.*”

Menurut kutipan pendapat dari Albert Thumann dan Erick A. Woodroof PPA adalah kontrak antara dua pihak, satu yang menghasilkan listrik selaku penjual dan satu yang mencari untuk membeli listrik atau pembeli. PPA mendefinisikan semua persyaratan komersial untuk penjualan listrik antara kedua belah pihak, termasuk saat proyek akan mulai beroperasi secara komersial, jadwal pengiriman listrik, denda untuk pengiriman dibawah kesepakatan, syarat pembayaran dan syarat penghentian. PPA juga merupakan kesepakatan utama yang mendefinisikan pendapatan dan kualitas kredit dari sebuah proyek pembangkit dan dengan demikian menjadi instrument utama pembiayaan proyek.

Sedangkan untuk pokok-pokok dalam PPA yang berkaitan dengan Pembangkit Listrik khususnya dalam penelitian ini peneliti menggunakan PPA Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Amerika Serikat antara Departemen Energi Amerika Serikat yang diwakili oleh *Bonneville Power Administration* dan Penjual (pihak yang menjual Energi Listrik menggunakan turbin angin).

“*Wind power is the use of air flow through wind turbines to mechanically power generators for electric power. Wind power, as an alternative to burning fossil fuels, is plentiful, renewable, widely distributed, clean, produces no greenhouse gas emissions during operation, consumes no water, and uses little land. The net effects on the environment are far less problematic than those of nonrenewable power sources.*”[[123]](#footnote-123)

Kutipan diatas adalah pengertian pembangkit listrik tenaga angin menurut Vashilis Fthenakis dan Hyung Chui Kim bahwa pembangkit listrik tenaga angina adalah penggunaan aliran udara melalui turbin angina ke generator listrik mekanis untuk tenaga listrik. Tenaga angina, sebagai alternative untuk membakar bahan bakar fosil secara banyak, dapat diperbaharui, didistribusikan secara luas, bersih, tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca selama beroperasi, tidak menggunakan air, dan menggunakan lahan yang kecil. Efek atau dampak lingkungan yang lebih bersih menjadikannya lebih sedikit dampak buruknya terhadap lingkungan dibanding dengan sumber daya tak terbarukan. Para Pihak dalam PPA tersebut diatas, antara lain :

1. Pembeli, yang meliputi *Bonneville Power Administration* yang mewakili Departemen Energi Amerika Serikat.
2. Penjual, yang meliputi penjual secara kolektif maupun individu;

PPA antara Departemen Energi Amerika Serikat yang diwakili oleh *Bonneville Power Administration* selaku Pembeli dan Penjual harus memuat 20 (dua puluh) ketentuan berdasarkan contoh PPA dengan Pembangkit Listrik Tenaga Angin dan penjual, antara lain :[[124]](#footnote-124)

1. **Definisi**

Dalam pasal definisi berisi pengertian dan ketentuan yang berlaku dalam PPA dan harus mematuhi Ketentuan Praktik Utilitas Industri (*Good Utility Industry Practice*). Pengertian-pengertian tersebut antara lain :

1. “Rata-rata Output Tahunan” (*Actual Average Annual Output*) berarti jumlah sebenarnya dari rata-rata energi listrik yang dihasilkan setiap tahunnya oleh Fasilitas selama berjalannya waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang diberikan.
2. “Faktor Ketersediaan” (*Availability Factor*) berarti jumlah jam dalam pelayanan Fasilitas dan siap selama 12 (dua belas) bulan untuk menghasilkan Output Energi yang sesuai dengan Ketentuan Praktik Utilitas Industri (*Good Utility Industry Practice*), dibagi dengan 8.760 (delapan ribu tujuh ratus enam puluh) jam.
3. “Pembangkit Listrik Tenaga Angin BPA” (*Bonneville Power Administration* (BPA) *Wind Turbine(s)*) berarti masing-masing dan semua [jumlah, produsen, dan ukuran] generator turbin angin, atau penggantian yang cukup dapat diterima atau penggantinya, yang merupakan bagian dari Fasilitas dan didedikasikan untuk menghasilkan Output Energi untuk dijual ke BPA.
4. “Hari Kerja” (*Business Day*) berarti setiap hari Senin sampai dan termasuk hari Jumat selama jangka waktu Perjanjian ini selain hari libur yang diakui secara nasional di Amerika Serikat.
5. “Operasi Komersial” (*Commercial Operation*) berarti saat Turbin Angin BPA tertentu dalam Fasilitas yang telah siap untuk operasi reguler dan harian, sudah terhubung ke *Grid,* dan mampu menghasilkan Output Energi sesuai dengan Ketentuan Praktik Utilitas Industri (*Good Utility Industry Practice*), semuanya disertifikasi secara tertulis oleh Penjual kepada BPA.
6. “Tanggal Operasi Komersial” (*Commercial Operation Date*) berarti, berkaitan dengan Turbin Angin BPA tertentu, hari pertama dimana Operasi Komersial dilaksanakan.
7. “Komisi” (*Commission(s)*) berarti salah satu pengaturan negara bagian atau Federal yang memiliki yurisdiksi atas BPA atau termasuk Penjual, namun tidak terbatas pada, Komisi Regulasi Energi Federal (*Federal Energy Regulatory Commission* (“FERC”)), atau agen pengganti.
8. “Tanggal Penyelesaian” (*Completion Date*) berarti tanggal dimana semua Turbin Angin yang dimiliki oleh BPA mencapai Operasi Komersial dan Keadaan Preseden lainnya.
9. “Keadaan Preseden” (*Conditions Precedent*) yaitu keadaan yang mendahului tanggal penyelesaian fasilitas; standar operasi dan keandalan fasilitas; arsip operasi; laporan bulanan; dan komite operasi dan prosedur operasi.
10. “Tahun Kontrak” (*Contract Year*) berarti jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dimulai dengan Tanggal Penyelesaian.
11. “Perjanjian Pengaturan Pengiriman” (*Delivery Arrangements Agreement*) berarti kesepakatan antara Transmisi Bisnis (*Power Business Line*) dan Operator Sistem Transmisi (*Transmission System Operator*) yang menyediakan Output Energi pada Titik Pengiriman dan untuk transmisi dan pengiriman Output Energi ke titik di luar Titik Pengiriman.
12. “Darurat” (*Emergency*) berarti kondisi fisik atau situasi dalam pengawasan Operator Sistem Transmisi mempengaruhi atau akan mempengaruhi kemampuan *Grid* untuk menerima Output Energi dari Fasilitas di Titik Pengiriman.
13. “Output Energi” (*Energy Output*) berarti jumlah energi listrik yang dihasilkan oleh Turbin Angin BPA dan dikirim pada Titik Pengiriman. Output Energi harus diukur dalam *kilowatt-hours* (kWh) menggunakan alat pengukur yang terdapat pada bagian dari trasnformator di Cabang Fasilitas. Output Energi dikirim ke BPA pada Titik Pengiriman dianggap sama dengan energi yang diukur oleh alat pengukur dikurangi hilangnya energi dari persentase terntentu sesuai dengan kesepakatan para pihak antara alat pengukur dan Titik Pengiriman.
14. “Tingkat Pembayaran Energi” (*Energy Payment Rate*) berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan harga listrik pada saat tanggal jatuh tempo; dan harga listrik pada saat setelah tanggal jatuh tempo.
15. “Keadaan Lalai” (*Event of Default*) berarti suatu peristiwa yang menganugerahkan sebuah hak terhadap Pihak yang tidak melakukan kelalaian untuk menghentikan Perjanjian.
16. “Fasilitas” (*Facility*) berarti yang meliputi semua hal berikut ini, tujuannya adalah untuk memproduksi dan menjual listrik, antara lain peralatan milik penjual, properti, turbin angin, *transformer step-up*, pemutus sirkuit, diperlukan saluran listrik untuk terhubung ke Titik Pengiriman, protektif dan terkait dengan peralatan, perbaikan, dan aset berwujud dan tidak berwujud lainnya, hak kepemilikan dan hak akses dan hak kontrak yang diperlukan untuk konstruksi, operasi, dan pemeliharaan fasilitas pembangkit listrik tenaga angin yang akan ditempatkan di lokasi yang telah ditentukan untuk menghasilkan Output Energi yang dijual berdasarkan PPA.
17. “Cabang Fasilitas” (*Facility Substation*) berarti fasilitas-fasilitas yang berlokasi pada titik persimpangan dari Jalur Transmisi Fasilitas dan Jalur Transmisi milik BPA.
18. “Jalur Transmisi Fasilitas” (*Facility Transmission Line*) adalah jalur transmisi yang menyambungkan Turbin Angin ke Titik Pengiriman.
19. “Tanggal Pengiriman Pertama” (*First Delivery Date*) berarti tanggal pertama dimana Fasilitas Interkoneksi mendapatkan energi listrik dan dapat menerima pengiriman Output Energi pada Titik Pengiriman.
20. “GDPIPD” (GDPIPD) berarti harga implisit deflator untuk produk domestik bruto yang dihitung dan diterbitkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Angka tersebut akan digunakan dalam penyesuaian ini adalah yang tertera pada “Produk Domestik Bruto : Siaran Pers ‘Triwulan Pertama’ yang biasanya dirilis pada bulan Juni setiap tahun oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat, Biro Analisis Ekonomi. Tidak ada revisi berikutnya yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan Amerika Serikat ketika angka tersebut akan dipertimbangkan untuk mempengaruhi atau menyesuaikan Tingkat Pembayaran Energi untuk Tahun Kontrak tertentu.
21. “Ketentuan Praktik Utilitas Industri” (*Good Utility Industry Practice(s)*) berarti praktik, metode, dan tindakan (termasuk, namun tidak terbatas pada, praktik-praktik, metode-metode, dan tindakan yang dilakukan atau disetujui oleh sebagian besar industri utilitas listrik) bahwa, pada waktu tertentu, dalam penilaian berdasarkan fakta diketahui atau yang seharusnya diketahui pada saat keputusan itu dibuat, diharapkan bisa mencapai hasil yang diinginkan melalui cara yang sesuai dengan hukum, regulasi, kode (*code*), standar, peralatan rekomendasi pabrikan, kehandalan, keamanan, perlindungan lingkungan, ekonomi, dan ekspedisi. Sehubungan dengan Fasilitas, Ketentuan Praktik Utilitas Industri meliputi, namun tidak terbatas pada, dengan langkah yang masuk akal untuk memastikan bahwa :
22. Peralatan, bahan-bahan, sumber daya, dan persediaan tersedia untuk memenuhi kebutuhan Fasilitas;
23. Personil operasi yang memadai dan siap sedia setiap saat dan cukup berpengalaman, terlatih dan berlisensi sesuai dengan keperluan untuk beroperasi pada Fasilitas dengan benar dan efisien, serta mampu merespon kondisi darurat yang dapat diperkirakan baik yang disebabkan oleh suatu kejadian atau diluar lokasi dari Fasilitas;
24. Perbaikan dan pemeliharaan preventif, rutin, dan tidak rutin dilakukan atas dasar yang menjamin kehandalan dalam jangka panjang dan operasi yang aman, dan dilakukan dengan pengetahuan, pelatihan, dan personil yang berpengalaman untuk menggunakan peralatan dan kelengkapan yang tepat;
25. Pemantauan dan pengujian yang tepat dilakukan untuk memastikan bahwa peralatan berfungsi dengan baik sama seperti ketika dirancang;
26. Peralatan tidak dioperasikan secara sembrono, atau dengan cara tertentu yang tidak aman bagi pekerja, masyarakat umum, atau bertentangan dengan hukum lingkungan atau regulasi yang berlaku tanpa memperhatikan batasan yang telah didefinisikan seperti keadaan banjir, persyaratan pemeriksaan keselamatan, voltase operasi, arus listrik, muatan *volt-ampere reactive* (VAR), frekuensi, kecepatan rotasi, polaritas, sinkronisasi, dan/atau batasan sistem kontrol; dan
27. Peralatan akan berfungsi dengan baik namun dibawah normal ketika terjadi keadaan darurat di Fasilitas.
28. “Jaringan Listrik” (*Grid*) berarti sistem transmisi listrik yang berada di luar Titik Pengiriman dan dikendalikan oleh Operator Sistem Transmisi.
29. “Faktor Penyesuaian Inflasi” (*Inflation Adjustment Factor*) berarti sebuah pecahan, pembilangnya adalah GDPIPD untuk kuartal pertama dari tahun yang berjalan dan penyebutnya adalah GDPIDP untuk kuartal pertama tahun sebelumnya.
30. “Fasilitas Interkoneksi” (*Interconnection Facilites*) berarti semua hak atas tanah, bahan, peralatan, dan fasilitas yang dipasang dengan tujuan interkoneksi dengan Turbin Angin BPA ke jalur transmisi BPA, termasuk, namun tidak terbatas pada, interkoneksi listrik, pengalihan, pengukuran, penyampaian, serta komunikasi dan peralatan keselamatan.
31. “Perjanjian Fasilitas Interkoneksi” (*Interconnection Facilities Agreement*) berarti Perjanjian Generasi Interkoneksi dan Operator Sistem Transmisi yang berisi hak dan kewajiban para pihak dengan menghargai Fasilitas Interkoneksi ke jalur transmisi BPA dan metode dan prosedur untuk operasi dan pemeliharaan Fasilitas Interkoneksi yang aman.
32. “Alat Pengukur” (*Metering Device(s)*) berarti pengukur *kilowatt* elektronik dan transformator potensial terkait dengan transformator arus yang digunakan untuk mengukur Output Energi dari Fasilitas.
33. “Sengketa Non-Penagihan” (*Non-Billing Dispute*) berarti segala sengketa antara para pihak selain sengketa pembayaran.
34. “Bulan Dengan Harga Tinggi” (*On-Peak Month*) berarti setiap tanggal dalam bulan September dan seterusnya termasuk bulan Februari.
35. “Komite Operasi” (*Operating Committee*) berarti komite yang terdiri dari satu delegasi dari masing-masing pihak, yaitu BPA dan Penjual.
36. “Sistem Pengawasan Komputer oleh Penjual” (*Seller’s Computer Monitoring System*) berarti pengawasan berbasis komputer, perangkat lunak, dan sistem komunikasi pribadi yang meluas ke masing-masing Turbin Angin BPA, yang sistem tersebut mengumpulkan, arsip dan laporan data operasi turbin.
37. “Pihak” (*Party*) dan atau “Para Pihak” (*Parties*) berarti Penjual, BPA, atau Penjual dan BPA.
38. “Titik Pengiriman” (*Point of Delivery*) berarti titik sistem elektrik yang berada pada Penjual membuat Output Energi tersedia untuk BPA.
39. “Transmisi Bisnis” (*Power Business Line*) berarti Transmisi Bisnis BPA.
40. “Fasilitas Interkoneksi Penjual” (*Seller’s Interconnection Facilities*) berarti bagian dari Fasilitas Interkoneksi yang berada di luar batasan dari cabang Fasilitas, namun dengan kabel tambahan yang terpasang cukup untuk dijangkau ke Titik Pengiriman dalam Cabang Fasilitas, seperti yang dijelaskan pada detail yang lebih besar pada Exhibit A.
41. “Operator Sistem Transmisi” (*Transmission System Operator*) berarti Transmisi Bisnis BPA atau penggantinya yang mengendalikan dan mengoperasikan *Grid*.
42. **Syarat**
43. Efektivitas; Syarat Dasar

Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan berlaku selama beberapa periode dari Tanggal Penyelesaian, tergantung pada ketentuan terminasi awal yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

1. Masa Berlaku Syarat dan Ketentuan

Ketentuan yang berlaku akan terus berlaku setelah terminasi sampai dengan batas waktu yang diperlukan untuk menyediakan tagihan akhir dan penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum penghentian, termasuk pelunasan tagihan yang harus dibayar oleh atau oleh BPA sesuai dengan PPA yang ditandatangani.

1. **Ekshibit**

Ekshibit yang terdapat dalam PPA digabungkan kedalam PPA sebagai referensi.

1. **Deskripsi Fasilitas**
2. Ringkasan Deskripsi

Penjual harus membangun, mengoperasikan, dan memelihara Fasilitas. Ekshibit A menyediakan deskripsi lengkap tentang Fasilitas, termasuk identifikasi Turbin Angin BPA dan peralatan serta komponen lainnya yang meliputi Fasilitas.

1. Lokasi

Fasilitas tersebut berada pada area yang umumnya digambarkan sebagai nama fasilitas dan lokasi dari fasilitas. Peta berskala yang mengidentifikasi lokasi Fasilitas, yaitu Turbin Angin BPA, Fasilitas Interkoneksi, dan fasilitas pendukung yang signifikan, termasuk fasilitas yang berada pada Titik Pengiriman.

1. Desain Secara Umum dan Konstruksi Fasilitas

Penjual harus membangun Fasilitas dengan cara yang profesional, seperti para pekerja profesional sesuai dengan Ketentuan Praktik Utilitas Industri. Fasilitas yang dimaksud, antara lain :

1. Mampu memasok Output Energi sesuai dengan persyaratan Perjanjian Fasilitas Interkoneksi;
2. Mampu beroperasi pada tingkatan daya yang telah ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas Interkoneksi; dan
3. Dilengkapi dengan alat pelindung dan sistem kontrol generator yang dirancang dan dioperasikan sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Interkoneksi dan Ketentuan Praktik Utilitas Industri.
4. **Fasilitas Interkoneksi dan Pengukuran**
5. Perjanjian Fasilitas Interkoneksi

Penjual harus menegosiasikan Perjanjian Fasilitas Interkoneksi yang dapat diterima oleh Transmisi Bisnis untuk keperluan dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan itikad baik. Perjanjian Fasilitas Interkoneksi harus memiliki tujuan dan dideskripsikan sebagai berikut :

1. Perpindahan, pengukuran, menyampaikan, komunikasi, dan peralatan keamanan yang merupakan Fasilitas Interkoneksi;
2. Proses, prosedur untuk, dan waktu untuk pengadaan, konstruksi, pengujian dan penempatan ke dalam operasi Fasilitas Interkoneksi dan hubungannya dengan Titik Pengiriman;
3. Jadwal penagihan dan pembayaran untuk konstruksi, operasi dan pemeliharaan Fasilitas Interkoneksi;
4. Prosedur operasi dan persyaratan Fasilitas Interkoneksi, termasuk persyaratan untuk Turbin Angin BPA untuk dapat segera diputus dari Titik Pengiriman harus sesuai dengan Ketentuan Praktik Utilitas Industrik atau dalam hal apabila terjadi keadaan Darurat; dan
5. Persyaratan, kondisi dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan konstruksi, operasi dan pemeliharaan Fasilitas Interkoneksi. Seperti antara BPA dan Penjual, semua biaya terkait dengan pengadaan, konstruksi, instalasi dan pengoperasian Fasilitas Interkoneksi dibayar oleh Penjual sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Interkoneksi.

Tujuan dari Perjanjian ini adalah menentukan Tanggal Pengiriman Pertama, apabila tanggal tersebut diperpanjang oleh karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*) atau penundaan yang disebabkan oleh Transmisi Bisnis. Penjual akan memberikan Transmisi Bisnis pemberitahuan tertulis 15 (lima belas) hari sebelum Tanggal Pengiriman Pertama. Jika tanggal penyelesaian terjadi lebih dari 30 (tiga puluh) hari setelah Hari Pengiriman Pertama, terlepas dari terjadinya keadaan kahar apapun dan jika bukan karena kelalaian atau kesalahan BPA, maka Penjual akan mengganti BPA berupa pembayaran yang dilakukan untuk layanan transmisi selama 30 hari setelah Tanggal Pengiriman Pertama dan berlanjut sampai Tangal Penyelesaian; asalkan Transmisi Bisnis bertindak secara wajar dalam hal komersial untuk meminimalkan biaya yang berkaitan dengan jasa transmisi tersebut

1. Perjanjian Pengaturan Pengiriman

Transmisi bisnis akan melakukan satu atau lebih dari satu Perjanjian dengan Operator Sistem Transmisi dan/atau dengan orang lain yang menyediakan penerimaan Output Energi pada Titik Pengiriman dan untuk transmisi dan pengiriman seperti Output Energi tersebut ke titik-titik diluar Titik Pengiriman (perjanjian tersebut harus berupa “Perjanjian Pengaturan Pengiriman”). Transmisi Bisnis bertanggung jawab penuh untuk melakukan negosiasi, dan memelihara selama masa berlakunya Perjanjian ini, Perjanjian Pengaturan Pengiriman. Penjual harus bekerja sama dengan Transmisi Bisnis dalam negosiasi ini.

1. Provisi-Provisi lain yang berkaitan dengan Interkoneksi Listrik
2. Akses ke Fasilitas

Perwakilan dari BPA harus memiliki akses ke Fasilitas, termasuk ruang kontrol dan Fasilitas Interkoneksi untuk melakukan semua inspeksi, perawatan, servis dan ulasan operasional yang sesuai untuk memudahkan kinerja PPA. Sedangkan di Fasilitas, perwakilan harus memperhatikan tindakan pengamanan yang layak sesuai dengan yang mungkin diminta oleh Penjual dan harus melakukannya sendiri dengan cara tertentu serta tidak mengganggu konstruksi, operasi, atau pemeliharaan Fasilitas.

1. Alat Pengukur
2. Semua alat pengukur milik Penjual yang digunakan untuk mengukur Output Energi harus mendapatkan Persetujuan dari BPA dan dipasang sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Interkoneksi. Penjual dengan biaya dari Penjual, memasang peralatan komunikasi yang memungkinkan BPA untuk dapat membaca Alat Pengukur dari lokasi yang jauh (contohnya Kantor Pusat BPA) tanpa adanya batasan waktu. Alat Pengukur harus dikelola langsung oleh Penjual atau oleh agen atau sub-kontraktor langsung dibawah kendali Penjual atau dengan Operator Sistem Transmisi. Semua alat pengukur digunakan untuk mengukur Output Energi berdasarkan Perjanjian ini harus disegel dan segel hanya bisa rusak jika Alat Pengukur tersebut diperiksa, dan diuji, dan/atau disesuaikan.
3. Semua Alat Pengukur harus dipelihara, dikalibrasi, dan diuji sesuai dengan kebijakan Operator Sistem Transmisi dan persyaratan dari Perjanjian Fasilitas Interkoneksi. Penjual harus mengatur pengujian Alat Pengukur minimal setahun sekali. BPA dimungkinkan untuk mengharuskan Penjual memulai pengujian dan inspeksi Alat Pengukur dengan biaya sendiri. Penjual mengizinkan seorang perwakilan dari BPA untuk sebagai saksi dan memverifikasi pemeriksaan dan tes tersebut, dengan ketentuan, bagaimanapun BPA harus mematuhi semua standar keselamatan dari Penjual. Penjual harus menyediakan salinan untuk BPA dari pemeriksaan berkala atau pemeriksaan khusus atau laporan pengujian yang berkaitan dengan Alat Pengukur.
4. BPA dapat memilih untuk memasang dan memelihara, dengan biaya sendiri, Alat Pengukur dan pengumpulan data dan peralatan komunikasi yang digunakan untuk memantau, merekam, atau mengirimkan data yang berkaitan dengan Output Energi dari Turbin Angin BPA. Penjual harus mengatur lokasi dalam kendali rumah kontrol Cabang Fasilitas dapat diakses oleh Penjual dan BPA, untuk mengumpulkan data tersebut dan peralatan komunikasi yang mungkin dipasang.
5. Penjual harus memberitahukan BPA dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah Penjual menerima pemberitahuan aktual bahwa ada ketidakakuratan atau cacat pada Alat Pengukur. Penjual akan menyesuaikan Alat Pengukur, diperbaiki, diganti, dan/atau dikalibrasi ulang sedekat mungkin ke kondisi dimana tanpa adanya kesalahan dengan mengorbankan Penjual atau Pihak yang memiliki perangkat rusak atau tidak akurat.
6. Penyesuaian Apabila Pengukuran Tidak Akurat

Jika Alat Pengukur gagal teregister atau ditemukan pada saat pengujian tidak akurat lebih dari seperempat persen (0,25%), penyesuaian harus dilakukan untuk memperbaiki semua pengukuran dengan Alat Pengukur yang tidak akurat atau tidak tepat, untuk kedua jumlah dan periode ketidaktepatan, dengan cara berikut :

1. Apabila Alat Pengukur ditemukan tidak efektif atau rusak dan faktor penyesuaian untuk alat pengukur tidak dapat diandalkan untuk menghitung, Para Pihak akan menggunakan pengukuran dari Alat Pengukur milik BPA jika sudah terpasang, beroperasi penuh dan dikalibrasi. Apabila Alat Pengukur milik BPA belum dipasang atau jika dipasang, namun tidak beroperasi penuh atau dikalibrasi, maka Para Pihak harus menggunakan data produksi dari Sistem Pengawasan Komputer Penjual untuk menentukan jumlah ketidakakuratan tersebut.
2. Dalam hal Sistem Pengawasan Komputer milik Penjual ditemukan tidak akurat lebih dari dua persen (2,0%), Para Pihak harus memperkirakan jumlah penyesuaian yang diperlukan dengan menggunakan situs informasi meteorologi untuk periode dari ketidakakuratan berdasarkan pengiriman Output Energi dari Turbin Angin BPA selama keadaan operasi yang hampir sama ketika Alat Pengukur sedang meregister secara akurat. Penyesuaian harus dilakukan untuk periode tersebut di mana pengukuran yang tidak akurat dilakukan.
3. Dalam hal Para Pihak tidak dapat setuju dengan periode yang sebenarnya di mana pengukuran yang tidak akurat dilakukan, pada periode tersebut pengukuran harus disesuaikan menjadi lebih pendek dari :
4. Setengah periode dari pengujian terakhir dari Alat Pengukur sampai telah dilakukan pengujian terhadap Alat Pengukur rusak atau tidak akurat; atau
5. Dalam periode 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum adanya pengujian terhadap Alat Pengukur menjadi rusak atau tidak akurat.
6. Sejauh ini apabila periode penyesuaian tumpang tindih dengan periode pengiriman yang pembayarannya telah dilakukan oleh BPA kepada Penjual, BPA harus menggunakan pengukuran yang telah dikoreksi untuk menghitung ulang jumlah yang harus dibayar selama periode ketidakakuratan dan harus dikurangi pembayaran sebelumnya oleh BPA untuk periode tersebut sesuai dengan jumlah penghitungan ulang. Jika perbedaannya adalah jumlah positif, selisihnya harus dibayar oleh BPA kepada Penjual; jika perbedaannya adalah jumlah negatif, perbedaan itu harus dibayar oleh Penjual kepada BPA, atau atas kebijaksanaan BPA, selisih tersebut mungkin terjadinya pengambilan bentuk ganti rugi (*offset)* untuk pembayaran kepada Penjual oleh BPA. Pembayaran selisih tersebut dilakukan oleh Pihak yang berhutang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pihak yang menerima pemberitahuan jumlah yang terhutang, kecuali BPA memilih pembayaran melalui ganti rugi (*offset).*
7. Standar Keandalan

Penjual mengoperasikan Turbin Angin BPA dengan tata cara yang sesuai dengan persyaratan operasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Fasilitas Interkoneksi.

1. **Kewajiban untuk Membeli dan Menjual Listrik**
2. Kewajiban untuk Membeli Listrik

Penjual harus mencapai Tanggal Penyelesaian, atau pada tanggal yang diizikan karena Keadaan Kahar atau penundaan yang disebabkan oleh Transmisi Bisnis. Bagaimanapun, terlepas dari Keadaan Kahar, Penjual harus mencapai Tanggal Penyelesaian selambat-lambatnya pada tanggal yang telah disepakati. BPA dapat mengajukan solusi apabila terjadi pelanggaran.

1. Penjualan dan Pembelian

BPA akan membeli setiap atau semua Output Energi yang dihasilkan oleh Turbin Angin BPA dan dikirim ke Titik Pengiriman sebelum Tanggal Penyelesaian. Dimulai pada Tanggal Penyelesaian dan sepanjang periode PPA, Penjual akan memasok dari Fasilitas dan menjual ke BPA, dan BPA akan menerima dan membeli, seluruh Output Energi dari Turbin Angin BPA sesuai dengan ketentuan dalam PPA. Penjual harus memberikan Output Energi ke, dan membuat Output Energi seperti itu tersedia pada Titik Pengiriman BPA. Kedua belah pihak tidak membatasi atau mengganggu pengiriman, penerimaan, penjualan dan/atau pembelian Output Energi untuk alasan ekonomi.

1. Titik Pengiriman

Titik Pengiriman harus diadakan di tempat yang disepakati oleh para pihak.

1. Pengecualian (*exception)*

BPA tidak berkewajiban untuk membeli Output Energi yang tidak dapat dikirim karena gangguan, kerusakan, kegagalan sistem dan/atau kegagalan mekanis, pemeliharaan atau perbaikan, termasuk, dikarenakan Keadaan Kahar, kepada Cabang Fasilitas dan/atau *grid*; asalkan ketidakmampuan pengiriman bukan karena keseluruhan atau sebagian, atas kelalaian BPA atau pelanggaran kebijakannya, atau secara umum berdasarkan PPA atau Perjanjian Pengaturan Pengiriman. Seperti antara BPA dan Penjual, Penjual tidak berhak untuk memulihkan pendapatan yang hilang untuk kejadian yang bukan dikarenakan BPA.

1. Yang Tidak Termasuk (*exclusions*)

Para Pihak mengetahui bahwa Turbin Angin BPA memiliki potensi untuk menghasilkan kredit karbon dioksida yang substansial dan kredit kualitas lingkungan udara lainnya dan kredit atau manfaat pengurangan emisi terkait (ekonomi dan sebaliknya) terkait dengan pembangkitan energi setelah Operasi Komersial. Para Pihak sepakat bahwa setiap dan semua kredit atau tunjangan tersebut harus menjadi milik BPA. Sebagai kelanjutan dari hal tersebut diatas, Penjual dengan ini mentransfer ke BPA berdasarkan hak BPA, dengan judul dan minat dari Penjual telah atau akan, untuk, dan dibawah kredit atau keuntungan semacam itu. Penjual setuju untuk memberikan hak bukti lebih lanjut, hak dan kepentingan BPA dalam bentuk kredit atau tunjangan tersebut, dan informasi tersebut berkenaan dengan kredit atau tunjangan tersebut, yang perlu dilakukan oleh BPA.

1. **Pembayaran Listrik**
2. Harga Listrik Pada Saat Tanggal Jatuh Tempo

Sebelum Tanggal Penyelesaian, BPA setuju untuk membeli salah satu Output Energi dari Penjual yang dihasilkan oleh Penjual pada tingkatan per *kilowatt-hour.* Untuk periode setelah 30 (tiga puluh) hari yang ditentukan sampai dengan Tanggal Penyelesaian, Penjual bertanggung jawab atas pembayaran semua biaya tetap yang disyaratkan dalam Perjanjian Pengaturan Pengiriman untuk Penggunaan *Grid,* kecuali karena adanya penundaan yang disebabkan oleh kelalaian BPA atau pelanggarannya, atau kelalaian berdasarkan Perjanjian ini atau Perjanjian Pengaturan Pengiriman.

1. Harga Listrik Pada Saat Setelah Tanggal Jatuh Tempo

Setelah Tanggal Penyelesaian, Penghitungan Pembayaran Energi untuk Output Energi sesuai dengan yang akan dinegosiasikan oleh para pihak.

1. **Penagihan dan Pembayaran**
2. Pernyataan Tagihan dan Faktur Tagihan

Periode penagihan setiap bulannya paling lambat 15 (lima belas) hari setelah akhir dari setiap bulan, Penjual harus mempersiapkan, dan memberikan kepada BPA, sebuah pernyataan yang menunjukkan Keluaran Energi dan sebuah faktur untuk berapapun jumlah yang terhutang oleh BPA kepada Penjual, untuk periode penagihan bulan sebelumnya. Pernyataan dan faktur akan dikirim kealamat yang telah disepakati dan Formulir dari faktur harus seperti yang dilampirkan pada Ekshibit C.

1. Data Meteran Penagihan

Semua data tagihan berdasarkan pengiriman pengukuran ke BPA dikumpulkan oleh Alat Pengukur.

1. Tanggal Pembayaran; Tanggal Keterlambatan Pembayaran

Pembayaran dikarenakan oleh Penjual atau BPA, apabila berlaku, akan jatuh tempo dan harus dibayar melalui transfer dana elektronik, atau dengan *wire transfer,* pada atau sebelum hari ke 30 (tiga puluh) mengikuti Pihak penerima faktur penagihan dari tagihan yang terhutang. Jika jumlah yang jatuh tempo tidak dibayar pada atau sebelum tanggal jatuh tempo, biaya keterlambatan pembayaran harus ditagih bersamaan dengan yang belum dibayar dan harus ditambahkan ke faktur yang berikutnya. Keterlambatan pembayaran dihitung berdasarkan tingkat suku bunga tahunan yang sesuai dengan Undang-Undang Pembayaran Mendesak (*Prompt Payment Act (31 U.S.C. §§* *3901-3909)*) dan berlaku efektif pada bulan tersebut dimana faktur diberikan.

1. Sengketa Penagihan
2. BPA atau Penjual dapat mengajukan sejumlah tagihan yang dianggap wajar berdasarkan selisih penagihan. Pihak lawan harus memberitahukan secara tertulis kepada perwakilan dari pihak lain untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dari penerimaan faktur yang disengketakan.
3. Bagian dari tagihan yang wajib dibayar pada atau sebelum tanggal jatuh tempo atau akan dikenakan biaya keterlambatan pembayaran bunga yang telah disepakati.
4. **Operasi dan Pemeliharaan**
5. Kondisi yang Mendahului Tanggal Penyelesaian Fasilitas

Penjual harus menginformasikan kepada BPA secara tertulis ketika Penjual yakin bahwa semua Kondisi Preseden telah atau akan segera selesai. Dengan begitu, Penjual harus memberikan bukti yang diminta oleh BPA mengenai peristiwa dari semua Kondisi Preseden. BPA harus menggunakan usaha terbaiknya untuk merespon secara tertulis dalam 2 (dua) hari kerja (namun dalam keadaan apapun harus dijawab dalam waktu 6 (enam) hari kerja) dari pemberitahuan tertulis oleh Penjual atau mengkonfirmasikan kepada Penjual bahwa semua Syarat Preseden telah terpenuhi atau telah terjadi atau dinyatakan dengan spesifik bahwa Kondisi tersebut diutamakan dan BPA percaya, dengan itikad baik, belum yakin atau belum pernah terjadi. Konfirmasi dari BPA tidak boleh ditahan atau ditunda, dan Kegagalan BPA untuk merespon dalam waktu 6 (enam) hari kerja kepada Penjual atau adanya semua Kondisi Preseden. Peristiwa dari masing-masing tersebut harus berupa “Kondisi Preseden” sampai Tanggal Penyelesaian :

1. Penjual telah tersertifikasi kepada BPA secara tertulis bahwa semua Turbin Angin BPA di Fasilitas telah mencapai Operasi Komersial dan Tanggal Operasi Komersial dari setiap Turbin Angin;
2. Fasilitas sesuai dengan persetujuan pada Perjanjian Fasilitas Interkoneksi;
3. Sertifikat asuransi atau polis asuransi yang disyaratkan telah diperoleh dan diserahkan kepada BPA;
4. Semua konstruksi dan pengujian Fasilitas Interkoneksi ada dan telah sesuai dengan standar Perjanjian Fasilitas Interkoneksi dan Ketentuan Praktik Utilitas Industri;
5. Penjual mematuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku dalam PPA; dan
6. Penjual telah menyediakan salinan seluruh material sewa tanah dan izin utama yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan Fasilitas kepada BPA dan dapat dihapus atau menghapus istilah rahasia komerisal yang terkandung di dalamnya.
7. Standar Operasi dan Keandalan Fasilitas

Penjual harus menjaga Fasilitas dengan cara yang sesuai dengan peraturan untuk keamanan dan keandalan yang tercantum pada Perjanjian Fasilitas Interkoneksi dan Ketentuan Praktik Utilitas Industri. Penjual harus mematuhi semua hukum, peraturan, dan tata cara Federal dan Negara Bagian maupun daerah, termasuk, namun tidak terbatas pada semua Undang-Undang Federal, Negara Bagian, dan daerah yang berlaku saat ini atau mungkin diundangkan selama masa PPA masih berlaku. Penjual harus mengatur, mengawasi, dan mengoperasikan Fasilitas secara konsisten sepanjang waktu dengan Prosedur Operasi yang dirujuk dibawah ini, antara lain :

1. Penjual harus menyediakan jadwal pemeliharaan Fasilitas untuk tahun pertama dari operasi setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum Tanggal Penyelesaian. Setelah itu, Penjual harus tunduk pada perawatan tahunan BPA dengan jadwal selambat-lambatnya tidak melewati tanggal 1 (satu) Oktober dari setiap tahun yang mencakupi 12 (dua belas) bulan dalam periode dari 1 (satu) Januari sampai dengan akhirnya yaitu 31 (tiga puluh satu) Desember dan perawatan jangka panjang yang mencakup perawatan 4 (empat) tahun berikutnya. BPA harus memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keberatan terhadap jadwal perawatan tahunan yang diusulkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan kegagalannya menjadi keberatan yang harus dianggap sebagai persetujuan jadwal pemeliharaan tahunan. Penjual akan memberikan BPA pemberitahuan awal mengenai adanya perubahan yang wajar dalam jadwal pemeliharaan tahunan. Pemberitahuan yang masuk akal dari perubahan apapun dalam jadwal pemeliharaan tahunan yang melibatkan keseluruhan dari Fasilitas adalah :

|  |  |
| --- | --- |
| Durasi Penjadwalan yang Diharapkan   1. Kurang dari 2 hari 2. 2 sampai 5 hari 3. Pemeriksaan Besar (lebih   dari 5 hari) | Pemberitahuan Awal kepada BPA  Setidaknya 24 jam  Setidaknya 7 hari  Setidaknya 90 hari |

1. Penjual tidak akan menjadwalkan pemadaman yang direncanakan untuk pemeliharaan seluruh Fasilitas selama hari kerja di *on peak month* tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BPA agar tidak ditahan secara tidak wajar, tertunda atau terkondisi.
2. Arsip Operasi

Penjual harus menjaga pencatatan operasi, yang meliputi informasi mengenai Rata-Rata Hasil Tahunan dari Turbin Angin BPA, pemadaman listrik yang direncanakan dan yang tidak direncanakan, operasi pemutusan arus yang membutuhkan reset manual, peralatan dalam keadaan *derating* (operasinya tidak dalam keadaan maksimal), dan kejadian penting lainnya berkaitan dengan pengoperasian Turbin Angin BPA. Catatan Operasi harus tersedia untuk di inspeksi oleh BPA berdasarkan permintaan diawal yang masuk akal, dan Penjual akan membuat data tersebut tersedia dalam waktu yang sesungguhnya melalui akses jarak jauh untuk BPA, apabila BPA memperoleh peralatan dan lisensi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengolah data melalui akses jarak jauh.

1. Laporan Bulanan

Penjual wajib memberikan laporan bulanan kepada BPA, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari setiap bulan dengan informasi dan formulir yang diminta oleh BPA, melalui surat elektronik dan dengan salinan dalam bentuk cetak, mengenai pengoperasian Turbin Angin BPA. Setiap bulannya laporan harus mencakup semua informasi pelaporan yang dipelihara dalam catatan operasi, data dalam Turbin Angin selama bulan tersebut, sebuah perbandingan tersedianya energi yang dihasilkan oleh Turbin Angin dengan hasil sebenarnya dari Turbin Angin yang dihasilkan selama sebulan, dan output perjam dari Turbin Angin milik BPA. Laporan bulanan juga mencakup estimasi output bulanan untuk tahun tersebut dan informasi lainnya berkaitan dengan pengoperasian Turbin Angin BPA yang diminta oleh BPA.

1. Komite Operasi dan Prosedur Operasi
2. BPA dan Penjual masing-masing menunjuk satu delegasi dan satu wakil untuk bertindak atas hal-hal yang berkaitan dengan pengoperasian Turbin Angin BPA berdasarkan PPA. Delegasi tersebut merupakan Komite Operasi. Para Pihak harus saling memberitahukan secara tertulis apabila terdapat perubahan dalam penunjukkan. Operasi Komite tidak berwenang untuk mengubah persyaratan atau ketentuan dari PPA.
3. Komite Operasi harus bertindak secara wajar untuk mengembangkan prosedur operasi secara tertulis berdasarkan (“Prosedur Operasi”) di Amerika Serikat menggunakan draft formulir paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Tanggal Penyelesaian. Prosedur Operasi harus mencakup, namun tidak terbatas pada : metode komunikasi sehari-hari, pengukuran, telemetering, telekomunikasi, dan prosedur akuisisi data, dan hal-hal lain yang dapat disepakati bersama oleh Para Pihak. Prosedur Operasi yang disepakati harus disediakan dan didistribusikan dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah Tanggal Penyelesaian.
4. **Kelalaian dan Penghentian**
5. Perihal Penjual
6. Hal-hal yang akan terjadi apabila Keadaan Lalai tanpa ada kesempatan oleh Penjual untuk memulihkan, antara lain :
7. Pemutusan Penjual atau likuidasi;
8. Penugasan Penjual atas Perjanjian dari hak-hak dibawahnya untuk kepentingan kreditur;
9. Penjual mengajukan permohonan konstruksi dan/atau operasi untuk Fasilitas; dan
10. Penjual mengajukan permohonan petisi untuk kebangkrutan atau pailit atau untuk reorganisasi atau pengaturan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat atau dibawah tindakan pailit suatu negara, atau Penjual secara sukarela mengambil keuntungan dari hukum atau tindakan semacam itu atau sebaliknya.
11. Hal-hal yang akan terjadi apabila Keadaan Lalai oleh Penjual dan Penjual telah memulihkan Keadaan Lalai tersebut dalam 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterima pemberitahuan tertulis dari BPA kepada Penjual :
12. Kegagalan Penjual untuk memenuhi Tanggal Penyelesaian (tergantung perpanjangan waktu yang tersedia oleh Penjual);
13. Penugasan Penjual atas Perjanjian ini atau hak Penjual manapun berdasarkan Perjanjian ini atau penjualan atau pengalihan pemungutan suara oleh Penjual atau penjualan Penjual atau pengalihan material dalam porsi apapun dari kepentingannya di Fasilitas tanpa memperoleh persetujuan tertulis dari BPA sebelumnya;
14. Pengajuan kasus dalam hal kebangkrutan atau proses apapun dibawah hukum kepailitan lainnya terhadap Penjual sebagai debitur atau afiliasi lain yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Penjual untuk melakukan kewajibannya asalakan Penjual tidak mendapatkan tempat tinggal atau penghentian pengarsipan dalam 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal pengajuan tersebut;
15. Setelah Tanggal Penyelesaian, Penjual mengalami gangguan dengan atau Penyesuaian Alat Pengukur untuk Turbin Angin BPA dengan cara yang tidak diizinkan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati;
16. Setelah Tanggal Penyelesaian, penjualan oleh Penjual kepada pihak ketiga, atau pengalihan oleh Penjual untuk penggunaan apapun, dari Output Energi berkomitmen terhadap BPA dengan izin tertulis sebelumnya dari BPA untuk pengalihan atau penggunaan semacam itu;
17. Setelah Tanggal Penyelesaian, kegagalan Penjual untuk mempertahankan dampak dari kesepakatan material yang diperlukan untuk mengirim Output Energi ke Titik Pengiriman;
18. Dimulai dari 1 (satu) tahun pertama dari Tanggal Penyelesaian, kegagalan Penjual untuk menggunakan usaha yang wajar secara memperoleh secara komersial, untuk Turbin Angin BPA, Ketersediaan Rata-Rata lebih dari tujuh puluh lima persen (75%) tepat sebelum 12 (dua belas) bulan berturut-turut, asalkan kegagalan tersebut bukan merupakan Keadaan Kahar;
19. Kegagalan Penjual untuk mendapatkan atau memelihara izin yang diperlukan untuk membangun dan mengoperasikan Fasilitas;
20. Kegagalan Penjual untuk mendapatkan atau mempertahankan untuk mengakses, membangun, dan mengoperasikan Fasilitas; atau
21. Penjual gagal memenuhi kewajiban material lain yang telah disepakati.
22. Kegagalan pembayaran yang dilakukan oleh Penjual ketika diperlukan berdasarkan PPA merupakan Keadaan Lalai oleh Penjual kecuali jika :
23. Penjual telah kembali ke keadaan semula dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penerimaan oleh Penjual dengan adanya pemberitahuan tertulis dari BPA; atau
24. Penjual memiliki itikad baik dalam Sengketa Penagihan berkaitan dengan hal-hal yang dibayar dan jumlah yang belum dipenuhi.
25. Perihal Kelalaian BPA
26. Keadaan Lalai yang disebabkan oleh BPA dan masa pemulihan tidak berlaku, antara lain :
27. Pembubaran atau likuidasi BPA, dengan ketentuan pembagian BPA tersebut menjadi beberapa entitas bukan merupakan pembubaran atau likuidasi; atau
28. Penugasan umum BPA atas PPA atau haknya berdasarkan kepentingan untuk kreditur.
29. Keadaan Lalai oleh BPA terhadap suatu kejadian kecuali telah pulih dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah BPA menerima pemberitahuan secara tertulis dari Penjual, antara lain :
30. BPA gagal untuk membeli seluruh Output Energi Turbin Angin BPA;
31. BPA lalai atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengaturan Pengiriman, dan kelalaian tersebut membuat Penjual tidak dapat mengirimkan Output Energi pada Titik Pengiriman atau mempengaruhi hak Penjual untuk menerima pembayaran berdasarkan PPA untuk pengiriman di Titik Pengiriman untuk Output Energi;
32. Penugasan BPA atau hak BPA manapun berdasarkan PPA tanpa mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya oleh Penjual; atau
33. Kegagalan BPA untuk memenuhi kewajiban material lainnya setelah menerima pemberitahuan secara tertulis.
34. Kegagalan BPA untuk melakukan pembayaran apabila diperlukan, merupakan Keadaan Lalai kecuali :
35. BPA telah pulih dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan secara tertulis oleh BPA; atau
36. BPA telah mengajukan permohonan penagihan terhadap sengketa berkaitan dengan jumlah yang belum dibayarkan dan tetap sesuai dengan kesepakatan yang berkaitan dengan sengketa penagihan.
37. Penghentian Oleh Sebab Tertentu

Selain hak atau pengampunan lain dalam bidang hukum atau ekuitas berdasarkan PPA, termasuk hak untuk mencari dampak buruk dari pelanggaran PPA, Pihak yang tidak berhak dapat, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain, mengakhiri Perjanjian ini jika ada satu atau beberapa Keadaan Lalai yang dideskripsikan dalam PPA terjadi dan tidak pulih dalam periode yang telah ditentukan. Dalam hal terjadinya penghentian oleh BPA karena adanya Peristiwa Lalai, tidak ada Pihak yang memiliki kewajiban lebih lanjut atau keharusan kepada Pihak lainnya berkaitan dengan PPA, kecuali Penjual, setelah menerima penggantian dari BPA secara rinci, perincian dan deskripsi secara tertulis, sesuai dengan Perjanjian Pengaturan Pengiriman. Para Pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian ini kecuali sebagaimana ditentukan pada saat terjadinya Peristiwa Lalai yang dijelaskan diatas atau sebaliknya secara eksplisit disediakan dalam PPA. Semua pemulihan akan bertahan dalam penghentian atau pembatalan PPA dan berlaku kumulatif.

1. Tanpa Kerusakan Konsekuensial

Dalam hal apapun, salah satu Pihak tidak bertanggung jawab atas dugaan orang lain yang kehilangan keuntungan atau kerugian konsekuensial lainnya, asalkan jumlah apapun yang diberikan secara jelas disini untuk dilunasi tidak dapat ditafsirkan sebagai kehilangan keuntungan atau kerugian konsekuensial.

1. **Penghentian untuk Kenyamanan**
2. Penghentian untuk Kenyamanan BPA

BPA dapat memberitahukan penghentian Perjanjian ini demi kenyamanan BPA selama periode antara eksekusi PPA dan tanggal dimana Penjual menerima pemberitahuan secara tertulis, dalam formulir pada Ekshibit B, bahwa Fasilitas siap untuk konstruksi (“Periode Awal”), atau setelah Fasilitas tersebut telah mencapai Operasi Komersial (“Periode Operasi”).

1. Selama Periode Awal, BPA harus menyampaikan maksudnya untuk mengakhiri PPA setidaknya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penghentian yang sebenarnya.
2. Selama Periode Operasi, BPA harus memberitahukan maksudnya untuk mengakhiri PPA setidaknya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal penghentian yang sebenarnya.
3. Apabila penghentian terjadi dikarenakan untuk kenyamanan BPA, maka BPA harus membayar kepada Penjual sejumlah yang telah dinegosiasikan.
4. Penghentian dikarenakan BPA

Penghentian PPA dikarenakan BPA harus membebaskan Para Pihak untuk segala kewajiban lebih lanjut berdasarkan PPA dan pembayaran penuh oleh BPA secara keseluruhan dan yang terhutang berdasarkan Ketentuan Penghentian untuk Kenyamanan BPA dan Ekshibit D.

1. **Administrasi Kontrak dan Pemberitahuan**
2. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan, tuntutan atau komunikasi lain yang diperlukan dari atau diberikan oleh Pihak harus diberikan kepada Pihak lainnya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Semua pemberitahuan, tuntutan atau komunikasi lain yang diperlukan dibawah ini harus diberikan atau dibuat secara tertulis dan disampaikan secara pribadi, dikirim melalui faksimili, dikirim melalui jasa kurir, atau dikirim melalui surat yang tersertifikasi, atau dikirim melalui surat yang sudah terdaftar, ongkos kirim harus sudah dibayar dimuka. Kepada pihak yang akan menerima pemberitahuan dengan format pengiriman seperti ini :

Apabila kepada Penjual : [Alamat]

Nama Perusahaan : \_\_\_

Nomor Telp. : \_\_\_

Nomor Fax : \_\_\_

Apabila kepada BPA : *Bonneville Power Administration*

*905 N.E. 11th Street (97232)*

*P.O Box 3621*

Nama Perusahaan : *Wind Project*

*Manager-PGC-6*

Nomor Telp. : 503-230-4386

Nomor Fax : 503-230-4973

Pemberitahuan yang diberikan secara langsung, dikirimkan secara telegrafik, atau dikirim melalui telecopy dianggap diberikan pada hari dikirim. Pemberitahuan dikirim oleh jasa kurir sebagaimana ditentukan disini akan dianggap diberikan di Hari Kerja ketiga setelah tanggal dikirimkan atau pada tanggal aktual penerimaan, atau mana saja yang lebih awal.

1. Representatif Pemberitahuan

Masing-masing Pihak harus menunjuk perwakilan yang ditunjuk untuk menerima pemberitahuan. Perwakilan tersebut dapat berupa pilihan dari masing-masing Pihak, orang yang sama sebagai perwakilan Para Pihak atau perwakilan representatif alternatif pada Komite Operasi, atau orang yang berbeda. Setiap Pihak dapat memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya, perubahan perwakilan atau alamat dimana pemberitahuan dan komunikasi tersebut akan dikirim.

1. Otoritas Representatif

Perwakilan Para Pihak diatas harus memiliki wewenang untuk bertindak sesuai dengan prinsip masing-masing dalam semua hal teknis berkaitan dengan kinerja PPA dan untuk mencoba menyelesaikan perselisihan atau potensi perselisihan. Namun, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengamandemen atau memodifikasi ketentuan dalam PPA.

1. Arsip Operasi

Penjual dan BPA masing-masing menyimpan catatan yang lengkap dan akurat dan data yang dibutuhkan lainnya oleh masing-masing Pihak untuk keperluan administrasi berdasarkan Perjanjian ini, termasuk catatan yang mungkin diminta oleh negara atau otoritas pengatur Federal.

1. Arsip Penagihan dan Pembayaran

Untuk memudahkan pembayaran dan verifikasi, Penjual dan BPA menyimpan semua buku dan catatan yang diperlukan untuk penagihan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan pembayaran listrik dan memberikan akses yang masuk akal kepada Pihak lainnya.

1. Pemeriksaan Arsip

Penjual dan BPA dapat memeriksa catatan operasi dan penagihan dan data yang disimpan oleh yang lain berkaitan dengan transaksi dan administrasi kapan saja selama periode yang dibutuhkan untuk tetap dijaga, atas permintaan dan selama jam kerja pada umumnya.

1. **Penyelesaian Sengketa**
2. Para Pihak harus berusaha dengan itikad baik untuk menegosiasikan sebuah resolusi perselisihan sebelum memulai proses pengaduan. Selama terjadi perselisihan kontrak atau adanya masalah kontrak antara Para Pihak yang timbul dari Persetujuan ini, Para Pihak harus melanjutkan kinerja berdasarkan Perjanjian ini sambil menunggu solusi dari perselisihan, kecuali jika tidak mungkin untuk dilakukan atau tidak praktis. Cadangan hak Penjual untuk mencari dan penyelesaian yudisial terhadap setiap perselisihan yang timbul dibawah Perjanjian ini yang tidak tunduk pada arbitrase.
3. Tindakan final yang diatur pada Pasal 9 (e) Undang-Undang Ketenagalistrikan *Northwest* tidak tunduk pada arbitrase yang mengikat dan tetap berada dalam lingkungan yurisdiksi eksklusif di *United States Ninth Circuit Court of Appeals.* Sengketa apapun mengenai hak-hak Para Pihak berdasarkan kebijakan BPA manapun, termasuk penerapan kebijakan tersebut, tidak tunduk pada arbitrase. Penjual berhak untuk mendapatkan solusi sengketa peradilan yang timbul berdasarkan Perjanjian ini yang tidak tunduk pada arbitrase. Kebijakan BPA berarti dokumen tertulis apapun yang diadopsi oleh BPA sebagai tindakan akhir dalam sebuah catatan keputusan atau catatan keputusan yang menetapkan kebijakan penerapan umum, atau membuat sebuah penentuan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Jika salah satu Pihak menegaskan bahwa sengketa dikeluarkan dari arbitrase, salah satu Pihak dimungkinkan untuk mendaftarkan ke Pengadilan Federal yang memiliki yurisdiksi untuk menentukan apakah sengketa tersebut tunduk pada arbitrase.
4. Setiap sengketa kontrak atau permasalahan berkaitan dengan kontrak antara Para Pihak yang timbul dari Perjanjian ini, kecuali sengketa yang dikecualikan pada ketentuan (a) diatas, tunduk pada arbitrase yang mengikat. Para Pihak harus beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebelum memulai arbitrase. Selama arbitrase, Para Pihak akan melanjutkan kinerjanya berdasarkan PPA sambil menunggu penyelesaian sengketa, kecuali jika tidak mungkin atau tidak praktis untuk dilakukan.
5. Setiap arbitrase harus dilakukan di *Portland, Oregon,* kecuali para Pihak setuju sebaliknya. Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa CPR memiliki prosedur untuk arbitrase komersial, dan *non-administered arbitration rules* (aturan CPR), harus digunakan untuk setiap perselisihan; asalahkan, bagaimanapun, bahwa :
6. Para Pihak harus memiliki hak penemuan yang diberikan dalam aturan Federal mengenai Prosedur Sipil kecuali jika Para Pihak menyetujui hal sebaliknya; dan
7. Untuk klaim sebesar 1 (satu) juta dollar Amerika atau lebih, setiap arbitrase harus dilakukan oleh pengadilan yang dipimpin oleh 3 (tiga) arbiter yang netral. Para Pihak harus memilik para arbiter dari daftar yang berisi 15 nama orang yang berkualifikasi sesuai kualifikasi dari Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa CPR. Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui ketiga arbiter yang telah dipilih dalam 20 (dua puluh) hari kerja, Para Pihak harus bergiliran untuk memilih nama dari arbiter yang diusulkan. Pihak yang memulai arbitrase akan melakukan pemilihan pertama. Proses ini harus diulang sampai tiga arbiter tetap masuk kedalam daftar, dan orang-orang tersebut akan ditunjuk sebagai arbiter. Untuk perselisihan yang melibatkan kurang dari 1 (satu) juta dollar Amerika, satu arbiter netral harus dipilih sesuai dengan Pasal 6 dari Peraturan CPR.
8. Kecuali untuk putusan arbitrase, yang menyatakan hak dan kewajibannya Para Pihak, pembayaran yang pasti bersifat eksklusif tersedia dalam proses arbitrase apapun. Dalam keadaan apapun harus memiliki kinerja yang spesifik untuk pemulihan terhadap BPA. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah Pihak, kecuali salah satu Pihak dapat pengajukan banding berdasarkan alasan yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase Federal, 9 U.S.C. § 1-16 (1988). Penghakiman terhadap putusan yang diberikan oleh arbiter dapat melalui pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi yang diperbolehkan.
9. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas biaya arbitrasenya sendiri, termasuk biaya hukum. Para Arbiter dapat membagi semua biaya arbitrase lainnya antara Para Pihak dengan cara yang dianggap pantas dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaksanaan Para Pihak selama proses, dan hasil dari arbitrase.
10. **Keadaan Tidak Terduga**
11. Definisi Keadaan Tidak Terduga

Istilah “Keadaan Kahar” berdasarkan PPA ini berarti penyebab atau peristiwa diluar kendali yang wajar, dan tanpa kesalahan atau kelalaian dari Pihak yang mengklaim Keadaan Kahar, termasuk, namun tidak terbatas pada :

* tindakan mendadak seperti banjir, gempa bumi, angin topan, kecepatan angin melebihi batas kerja yang aman, atau tornado yang merupakan tindakan diluar kuasa manusia;
* sabotase, vandalisme diluar kendali Penjual;
* terorisme;
* perang;
* kerusuhan;
* kebakaran;
* ledakan;
* cuaca dingin atau panas atau salju yang parah atau kondisi cuaca yang ekstrim atau parah lainnya;
* halangan, pemberontakan, penyerangan, semakin pelan, atau gangguan tenaga kerja (bahkan apabila kesulitan seperti itu bisa diakui apabila diakui oleh tutunan kelompok buruh);
* persyaratan, tindakan, atau kegagalan untuk bertindak oleh Operator Sistem Transmisi, tetapi hanya jika seperti itu persyaratannya, tindakan atau kegagalan untuk bertindak mencegah atua menunda kinerja;
* adopsi atau perubahan peraturan atau putusan pengadilan yang secara sah diberlakukan oleh Federal, Negara, atau badan pemerintah daerah;
* ketidakmampuan, meski sudah jatuh tempo, untuk mendapatkan lisensi yang dibutuhkan, izin, atau persetujuan ini konstruksi dan pengoperasian Fasilitas berdasarkan ketentuan pada Perjanjian ini; dan
* kerusakan mekanis atau peralatan dari *Grid* sejauh tidak disebabkan oleh pihak yang mengklaim Keadaan Kahar.

Istilah “Keadaan Kahar” tidak termasuk pengurangan penuh atau parsoal dalam Output listrik dari Fasilitas yang dikarenakan oleh tindakan atau tindakan pihak ketiga manapun, termasuk, namun tidak terbatas pada, setiap vendor, penyedia material, konsumen, atau pemasok Penjual, kecuali jika tindakan atau tindakan tersebut dimaklumi dengan alasan Keadaan Kahar.

Istilah “Keadaan Kahar” tidak termasuk pengurangan penuh atau sebagian dalam output listrik di Fasilitas yang disebabkan oleh atau timbul dari kerusakan mekanis atau peralatan Fasilitas, atau kebakaran, ledakan, atau kecelakaan atau kejadian atau kondisi lainnya yang disebabkan oleh keausan atau kekurangan normal yang terkait dengan Fasilitas.

1. Penerapan Keadaan Tidak Terduga

Kedua belah Pihak tidak bertanggung jawab atau berkewajiban atas keterlambatan atau kegagalan kinerja dikarenakan Keadaan Kahar (kecuali apabila setiap dan semua kewajiban untuk membayar tidak akan terjadi, tertunda, atau dimaklumi oleh kondisi atau Keadaan Kahar), dengan ketentuan bahwa :

1. Pihak yang tidak mengerjakan memberi peringatan tertulis kepada Pihak lainnya menggambarkan kejadian terjadinya Keadaan Kahar;
2. Penghentian kinerja tidak lebih luas dan tidak lagi berdurasi lebih dari yang dibutuhkan oleh Keadaan Kahar;
3. Pihak yang tidak mengerjakan melakukan *due diligence* yang wajar untuk memperbaiki ketidakmampuannya untuk melakukan dan memberikan laporan kemajuaan setiap minggunya ke Pihak lain yang menggambarkan tindakan yang diambil untuk mengakhiri Keadaan Kahar; dan
4. Pihak yang tidak bekerja harus memberikan pemberitahuan tertulis mengenai kemampuannya untuk melanjutkan pekerjaan dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.
5. Keterbatasan Dampak dari Keadaan Kahar

Dalam hal apapun tidak ada penundaan atau kegagalan kinerja yang disebabkan oleh kondisi apapun atau Keadaan Kahar memperpanjang PPA diluar masa berlakunya. Dalam keadaan dimana terjadi keterlambatan atau kegagalan yang diakibatkan oleh kondisi atau Keadaan Kahar, yang sebaliknya merupakan Peristiwa Kelalaian sesuai dengan ketentuan mengenai Kelalaian dan Penghentian, ketentuan dari Kelalaian dan Penghentian tidak berlaku dan keterlambatan atau kegagalan kinerja tersebut, jika belum diperbaiki, akan diperpanjang hari demi hari apabila Keadaan Kahar terjadi; asalakan keterlambatan atau kegagalan yang menjadi Peristiwa Lalai tersebut 1 (satu) tahun dari tanggal pemberitahuan yang dijelaskan pada ketentuan Kelalaian dan Penghentian. Pihak lainnya dimungkinkan untuk kapan saja pada saat berakhirnya periode satu tahun tersebut untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan adanya pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang terkena dampak, tanpa adanya kewajiban lebih lanjut oleh Pihak yang mengakhiri kecuali mengenai biaya dan ongkos yang belum dibayar sebelum tanggal efektif penghentian tersebut. Pihak lain mungkin, tetapi tidak wajib untuk memperpanjang periode 1 (satu) tahun tersebut, untuk waktu tambahan tersebut, pada kebijaksanaan tunggal, dianggap tepat, jika Pihak yang terkena dampak dilatih dengan tekun dalam upayanya untuk memulihkan kondisi atau Keadaan Kahar.

1. Keterlambatan Atribusi ke BPA

Penjual dapat dimaafkan karena keterlambatan dalam memenuhi tenggat waktu kinerja, setiap hari, untuk setiap keterlambatan yang diakibatkan oleh BPA, termasuk, tanpa batasan, penundaan BPA untuk mendapatkan izin yang diperlukan, persetujuan, atau mendapat persetujuan dan kesepakatan, termasuk, namun tidak terbatas pada Perjanjian Pengaturan Pengiriman, dari pemerintah atau pihak ketiga yang diminta oleh BPA untuk melaksanakan kewajibannya. Penjual harus memberikan pemberitahuan tertulis BPA dengan tepat waktu bahwa penundaan ditangguhkan dikarenakan oleh BPA telah terjadi atau diperkirakan akan terjadi. Pemberitahuan harus menginformasikan panjangnya perpanjangan apapun sampai batas waktu kinerja Penjual dimana Penjual merasa berhak.

1. **Representasi dan Garansi**
2. Representasi dan Garansi untuk Penjual

Penjual mewakili dan menjamin bahwa :

1. Penjual adalah perusahaan [negara bagian] yang telah diatur, benar adanya dan bereputasi baik dibawah hukum Negara Bagian tempat Penjual beroperasi, dan memang memenuhi syarat untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan PPA di [negara bagian dimana Fasilitasnya berada] dan di masing-masing yurisdiksi dimana kegagalan untuk memenuhi syarat akan menimbulkan dampak negatif material terhadap bisnis atau kondisi keuangan Penjual; dan Penjual memiliki semua persyaratan kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan bisnisnya, untuk memiliki properti, dan melaksanakan, mengirim, dan menjalankan kewajibannya.
2. Pelaksanaan, pengiriman, dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian dibawah ini oleh Penjual telah diberi kuasa oleh semua pihak yang diperlukan berupa tindakan korporasi, dan tidak dan tidak akan :
3. Memerlukan persetujuan atau sepengetahuan anggota dari Penjual selain yang telah diperoleh dan memiliki kekuatan penuh;
4. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum, peraturan, regulasi, perintah, surat perintah, putusan, surat peringatan, dekrit, penetapan, atau keputusan juri yang memberikan dampak untuk harus diterapkan kepada Penjual atau melanggar provisi apapun dalam dokumen Penjual, pelanggaran yang bisa memberikan dampak kerugian material pada kemampuan Penjual dalam melakukan kewajibannya;
5. Hasil dari pelanggaran atau merupakan kelalaian berdasarkan hak khusus milik Penjual, atau berdasarkan perjanjian apapun yang berkaitan dengan manajemen atau urusan Penjual atau surat peminjaman rangkap dua atau persetujuan kredit, atau perjanjian lainnya, sewa, atau instrument dimana Penjual adalah pihak dimana Penjual atau propertinya atau asetnya dapat diikat atau terpengaruh, pelanggaran atau kelalaian yang cukup dapat diharapkan untuk memiliki efek samping material pada kemampuan Penjual untuk melakukan kewajiban dibawah Perjanjian ini; atau
6. Hasil, atau dibutuhkannya kreasi atau pengenaan hipotek apapun, akta kepercayaan, janji, hak gadai, kepentingan keamanan, atau biaya lainnya atau pembebanan apapun (selain mungkin dimaksud pada PPA) atas atau sehubungan dengan apapun dari aset atau properti Penjual yang sekarang dimiliki atau diperoleh setelahnya, kreasi atau pengenaan yang cukup masuk akal diharapkan memiliki efek yang merugikan dalam bidang material pada kemampuan Penjual melakukan kewajibannya.
7. PPA adalah kewajiban yang mengikat Penjual.
8. Pelaksanaan dan performa dari PPA tidak akan bertentangan dengan atau melanggar kontrak apapun ataupun kesepakatan dalam bentuk apapun yang mana Penjual merupakan pihak atau putusan, pesanan, Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku bagi Penjual atau Fasilitas.
9. Pengetahuan terbaik, semua persetujuan, otorisasi, persetujuan, atau tindakan lain yang diminta oleh otoritas pemerintah untuk memberi kuasa eksekusi, pengiriman, dan kinerja Penjual berdasarkan Perjanjian ini telah diperoleh dengan tepat dan memiliki kekuatan dan pengaruh penuh.
10. Representasi dan Garansi untuk BPA

BPA dengan ini menyatakan dan menjamin sebagai berikut :

1. BPA diberi wewenang oleh Undang-Undang Federal, termasuk Undang-Undang Ketenagalistrikan *Northwest,* dan hukum lainnya yang berlaku, untuk menjual tenaga listrik yang dihasilkan pada berbagai proyek pembangkit listrik tenaga air milik Federal di *Pasific Northwest* atau diperoleh dari sumber lain, termasuk fasilitas energi angin.
2. Eksekusi dan pelaksanaan kewajiban BPA kuasa untuk semua tindakan yang diperlukan dan tidak dan tidak akan :
3. Meminta persetujuan atau persetujuan lebih lanjut dari instansi;
4. Sepengetahuan BPA, melanggar ketentuan hukum Federal, peraturan, regulasi, perintah, surat perintah, keputusan, tekad, atau dekrit yang saat ini berlaku untuk diterapkan oleh BPA, atau bertentangan dengan atau merupakan pelanggaran atau kelalaian berdasarkan kontrak atau kesepakatan apapun BPA selaku Pihak, pelanggaran konflik, atau pelanggaran atau kegagalan yang bisa memiliki efek merugikan secara material pada kemampuan BPA untuk melakukan kewajibannya.
5. PPA merupakan kewajiban yang benar dan mengikat BPA.
6. **Asuransi dan Ganti Rugi**
7. Bukti Asuransi
8. Selama pembangunan Fasilitas, Penjual harus, pada pengeluaran Penjual melakukan pemeliharaan berupa asuransi kerusakan properti yang mencakup semua fasilitas pembangkit listrik tenaga angin di Fasilitas dengan basis “semua risiko”, untuk penggantian penuh terhadap nilai fasilitas tersebut.
9. Dimulai dari Tanggal Penyelesaian, Penjual harus, pada pengeluaran Penjual, memelihara atau mempertahankan properti yang sesuai dan asuransi korban kehilangan untuk nilai Fasilitas, dan asuransi lainnya yang sesuai untuk Fasilitas sesuai dengan praktik kehati-hatian dalam industri angin, termasuk sebagai berikut :
10. Kewajiban Umum Komersial meliputi cedera fisik dan kerusakan properti, alat untuk mendidihkan dan mesin, produk/operasi yang sudah selesai, pertanggungjawaban kontrak dan cedera pribadi, dengan batas tidak kurang dari 5 (lima) juta dollar yang merupakan gabungan dari satu limit per kejadian;
11. Asuransi properti berisiko termasuk gempa bumi, tornado, dan banjir, tunduk pada sublimit yang sesuai, yang mencakup kerugian fisik atau kerusakan pada semua properti nyata dan pribadi yang berada di lokasi Fasilitas.
12. Pihak asurani harus mengakui petugas, agen, karyawan, dan penerus BPA sebagai tambahan tertanggung.
13. Asuransi tidak mempengaruhi kewajiban Penjual berdasarkan ketentuan surat ganti rugi dalam PPA dan tidak akan berakhir, kadaluarsa atau tidak diubah secara material kecuali dalam 30 (tiga puluh) hari pemberitahuan sebelumnya kepada BPA dan dengan persetujuan tertulis dari BPA. Persetujuan semacam itu tidak diperkenankan untuk ditahan secara tidak masuk akal.
14. Sebagai bukti bahwa kebijakan sebenarnya menyediakan cakupan yang disyaratkan dan batas asuransi dan memiliki kekuatan dan dampak penuh, Penjual, dan/atau kontraktor atau perwakilannya, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Tanggal Penyelesaian memberikan BPA sertifikat asuransi.
15. Limitasi Pada Kewajiban

BPA maupun Penjual (“Pihak Pertama”) tidak bertanggung jawab, baik dalam garansi, gugatan, atau tanggung jawab yang ketat, kepada Pihak lainnya (“Pihak Kedua”) untuk cedera, atau cedera kematian untuk siapapun, atau untuk kerugian atau kerusakan apapun, yang disebabkan oleh atau yang timbul dari gangguan listrik pada sistem listrik Pihak Pertama, apakah gangguan listrik tersebut berasal dari Pihak Pertama ataupun tidak lalai atau lalai. Setiap saat Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari, dan akan membebaskan Pihak Pertama dari, kewajiban apapun. Seperti yang digunakan dalam kesepakatan ini, yaitu :

1. istilah “Pihak” berarti, selain Pihak itu sendiri, agen, direktur, petugas, kontraktor, dan karyawannya;
2. istilah “kerusakan” berarti semua kerusakan, termasuk kerusakan konsekuensial; dan
3. istilah “orang” berarti setiap orang, termasuk yang tidak terhubung dengan salah satu Pihak dalam Perjanjian ini.
4. **Yurisdiksi Regulasi dan Pelaksanaan Regulasi**
5. Yurisdiksi Pemerintahan dan Pelaksaan Regulasi

Setiap pihak harus selalu mematuhi semua hukum, tata cara, peraturan, dan peraturan yang berlaku untuk itu. Sebagaimana berlaku, masing-masing pihak harus memberi semua pemberitahuan yang dibutuhkan, harus menyediakan dan memelihara semua izin pemerintah, lisensi, dan inspeksi yang diperlukan untuk kinerja Perjanjian ini, dan harus membayar biaya dan ongkos masing-masing dari hal-hal yang berkaitan tersebut.

1. Ketentuan yang Mendukung

Penjual harus menyediakan, atas permintaan yang wajar dari BPA, setiap personil dari Penjual dan setiap catatan yang berkaitan dengan Fasilitas tersebut sejauh yang dibutuhkan oleh BPA untuk memenuhi peraturan syarat pelaporan, atau untuk membantu BPA dalam proses pengadilan, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, proses sebelum Komisi Regulator Utilitas. BPA harus menyediakan Permintaan yang masuk akal, setiap personil BPA dan catatan yang berkaitan dengan Fasilitas sejauh yang dibutuhkan oleh Penjual untuk memenuhi peraturan syarat pelaporan yang dibutuhkan, atau untuk membantu Penjual dalam proses pengadilan, termasuk, namun tidak terbatas pada, proses sebelum komisi regulator utilitas.

1. **Penyerahan dan Pembatasan Transfer Lain**

PPA mengikat dan menjamin keuntungan atau kemungkinan yang akan dilakukan oleh, penerus dan penunjukan Para Pihak. Tidak ada Pihak yang dimungkinkan untuk menetapkan atau mengalihkan hak atau kewajibannya kecuali jika telah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak lainnya. Penjual dapat menetapkan dan/atau mendelegasikan atau mengizinkan pengalihan semua ataupun sebagian dari kepentingannya di Fasilitas atau pada Perjanjian, kepada siapapun atau entitas manapun setelah mendapat persetujuan tertulis dari BPA, yang seharusnya tidak ditahan secara tidak masuk akal, tertunda atau dikondisikan; asalkan hal tersebut diasumsikan oleh orang atau entitas lainnya, atau sebaliknya terikat untuk melakukan, semua kewajiban Penjual.

Tidak ada tugas, delegasi, jaminan, atau transfer yang harus membebaskan Penjual sampai batas tertentu dari kewajiban pra-transfernya. Tidak ada tugas, jaminan, atau transfer lainnya oleh Pihak manapun harus beroperasi untuk membebaskan pemberi tugas, pemberi jaminan, atau pengalihan dari kewajibannya kecuali jika disetujui untuk pelepasan, yang tidak boleh ditahan secara tidak wajar, tertunda atau dikondisikan, diberikan secara tertulis oleh Pihak lainnya.

1. **Informasi Konfidensial**
2. Ketersediaan

Para Pihak telah dan akan mengembangkan informasi, proses, pengetahuan, teknik dan prosedur mengenai Fasilitas (secara kolektif, “informasi”) yang mereka anggap rahasia dan eksklusif.

Terlepas dari sifat rahasia dan kepemilikan informasi tersebut, BPA dan Penjual (masing-masing, “Pihak yang Mengungkapkan”) dapat membuat informasi ini tersedia untuk yang lain (masing-masing, “Pihak Penerima”) tunduk pada ketentuan dalam informasi konfidensial.

1. Penunjukkan

Pada saat penyempurnaan atau kemungkinan untuk pemeriksaan rahasia atau Informasi kepemilikan, Pihak yang mengungkap secara tegas ditunjuk oleh label, cap, atau komunikasi lisan (dikonfirmasi secara tertulis) informasi dianggap rahasia dan/atau eksklusif.

1. Kewajiban

Kewajiban Pihak Penerima sehubungan dengan penggunaan atau pengungkapan informasi tersebut selanjutnya akan seperti yang tercantum dalam ketentuan informasi konfidensial.

1. Keadaan dan Pembatasan

Setelah menerima atau mempelajari Infromasi yang ditunjuk sebagai rahasia dan/atau yang dimiliki oleh Pihak Pengungkapan, Pihak Penerima harus :

1. Meperlakukan Informasi tersebut sebagai rahasia dan menggunakan kewaspadaan yang wajar untuk tidak melakukannya sampai Informasi tersebut sampai kepada pihak ketiga kecuali sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang, tunduk pada batasan yang ditetapkan;
2. Membatasi akses terhadap Informasi tersebut kepada karyawan (dan orang lain yang setuju untuk terikat pada Perjanjian ini) yang aksesnya cukup diperlukan dalam pengembangan Fasilitas dan untuk keperluan PPA;
3. Menggunakan Informasi tersebut semata-mata untuk tujuan pengembangan Fasilitas dan untuk tujuan PPA; dan
4. Setelah penghentian PPA, hancurkan atau kembalikan informasi tersebut dalam bentuk tertulis atau bentuk lainnya dan salinannya, jika diminta secara tertulis oleh Pihak yang mengungkapkan.
5. Pengecualian

Pembatasan dalam Pasal ini tidak berlaku untuk :

1. Isi PPA yang menajdi dokumen publik setelah dieksekusi;
2. Informasi yang, atau menjadi, diketahui atau tersedia untuk umum selain melalui tindakan Pihak Penerima yang melakukan pelanggaran dari PPA;
3. Informasi yang dimiliki oleh Pihak Penerima sebelum penerimaan dari Pihak yang mengungkapkan atau dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima; asalkan orang atau orang yang sama-sama berkembang belum memiliki akses terhadap Informasi tersebut; atau
4. Informasi yang menurut pendapat yang wajar oleh Pihak Penerima, diminta untuk diungkapkan sesuai dengan yang Undang-Undang atau regulasi yang berlaku (termasuk permintaan Undang-Undang Kebebasan Informasi); Namun, diberikan bahwa Pihak Penerima, sebelum pengungkapan tersebut, harus memberikan pemberitahuan uang muka yang wajar kepada Pihak yang mengungkapkan dalam waktu dan ruang lingkup yang dimaksud untuk mengizinkan Pihak yang mengungkapkan untuk mendapatkan perintah untuk mendapat perlindungan atau sebaliknya berusaha untuk mencegah atau membatasi ruang lingkup atau menerapkan kondisi diatas pengungkapan tersebut.
5. Ketentuan-Ketentuan Wajib

Kewajiban Para Pihak berdasarkan ketentuan informasi konfidensial akan tetap berlaku penuh dan berlaku selama 2 (dua) tahun setelah berhentinya PPA.

1. **Lain-Lain**
2. Pengabaian

Kegagalan dari salah satu Pihak untuk menegakkan atau menuntut kepatuhan atau mengetatkan kinerja dari salah satu persyaratan atau ketentuan, atau untuk mengambil keuntungan dari hak-haknya, bukan merupakan pembebasan atau melepaskan segala syarat, syarat, atau hak, namun hal yang sama harus dilakukan dan tetap ada setiap saat dengan kekuatan dan dampak yang maksimal.

1. Pajak

Penjual harus bertanggung jawab terhadap setiap dan semua pajak Federal, negara bagian, pajak kota, atau pajak lainnya pada masa kini maupun yang akan datang secara sah karena alasan kepemilikan dan pengoperasian Fasilitas dan penjualan energi dan semua pajak yang sesuai dengan harga berkaitan dengan Fasilitas dan Fasilitas Interkoneksi.

1. Penolakan Hak Penerima Manfaat oleh Pihak Ketiga

BPA tidak, dan tidak harus ditafsirkan, memperpanjang dukungan kredit atau finansial untuk keuntungan pihak ketiga manapun dengan meminjamkan uang ke atau melakukan transaksi lain dengan Penjual. PPA ini tidak ditafsirkan untuk menciptakan kewajiban, atau standar perawatan dengan referensi, atau pertanggungjawaban kepada, siapa pun yang bukan Pihak dalam PPA.

1. Hubungan Para Pihak

Antara para pihak tidak boleh menginterpretasikan PPA untuk membuat sebuah asosiasi, gabungan usaha, atau kemitraan antara Para Pihak atau untuk memaksakan kemitraan apapun atau kewajiban terhadap salah satu Pihak. Kedua belah pihak tidak berhak, atau berkuasa, atau berwewenang untuk melakukan Perjanjian atau bertindak sebagai agen atau perwakilan dari, Pihak lainnya.

Penjual bertanggung jawab terhadap pembayaran semua upah, pajak, dan biaya lainnya berkaitan dengan pekerjaan setiap orang yang melakukan layanan tersebut, termasuk semua pendapatan Federal, negara bagian, dan lokal, jaminan sosial, gaji, dan pajak kerja dan kompensasi perkerja yang diamanatkan secara *statutorily. Statutorily* adalah sesuai yang dimandatkan oleh atau berdasarkan undang-undang yang telah disahkan oleh legislatif.[[125]](#footnote-125) Tidak satupun orang yang dipekerjakan oleh Penjual harus dipertimbangkan sebagai karyawan BPA untuk tujuan apapun; Penjual juga tidak mewakili siapapun bahwa ia akan menjadi pegawai BPA.

1. Kelangsungan Kewajiban

Pembatalan, kadaluarsa, atau penghentian sebelumnya dari Perjanjian ini tidak bisa membebaskan Para Pihak dari kewajiban yang menurut sifatnya harus bertahan seperti pembatalan, kadaluarsa, atau penghentian, termasuk, namun tidak terbatas, jaminan, ganti rugi, atau tanggungan.

1. Keputusasaan

Dalam hal persyaratan, perjanjian, atau keadaan dari PPA, Ekshibit, atau penerapan persyaratan, atau ketentuan tersebut harus dianggap tidak benar, tidak sah, atau tidak dapat diberlakukan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi, semua syarat lain, persyaratan, dan kondisi dari Perjanjian dan penerapan mereka tidak terpengaruh oleh hal-hal tersebut akan tetap diberlakukan dan memberi dampak, asalkan ketentuan tersebut tetap berlaku dan berlaku secara sah mempertahankan esensi tawar-menawar dari Para Pihak.

1. Interpretasi

Kecuali apabila dalam konteks PPA mensyaratkan lain, yaitu :

* 1. kata-kata apapun berkatian dengan gender masing-masing pihak;
  2. kata-kata yang menggunakan bentuk tunggal atau jamak;
  3. istilah “disini”, “dengan ini” dan kata turunan atau kata-kata yang serupa dalam seluruh Perjanjian ini termasuk Ekshibit;
  4. istilah “Pasal” atau “Ekshibit” mengacu pada Pasal atau Ekshibit dari PPA; dan
  5. apapun yang mengacu pada keseluruhan atau bagian manapun dari PPA akan merujuk amandemen, tambahan, atau penggantian apapun yang sama. Kapanpun PPA mengacu pada sejumlah hari, nomor tersebut harus seusai dengan hari kecuali Hari Kerja yang ditentukan.

1. Perjanjian Lengkap; Amandemen

Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PPA direferensikan berdasarkan dokumen yang merupakan keseluruhan dari Perjanjian antara BPA dan Penjual dan akan menggantikan semua komunikasi, representasi, atau perjanjian, baik lisan atau tertulis, antara BPA dan Penjual sehubungan dengan penjualan kapasitas listrik dan energi dari Fasilitas. Persetujuan ini dapat diamandemen, diubah, dimodifikasi, atau dialihkan; asalkan amandemen, pengubahan, modifikasi, atau pengalihan harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

1. Akibat Perikatan

PPA dapat diubah dari waktu ke waktu, mengikat dan menjamin keuntungan masing-masing Pihak penerus-minat, perwakilan hukum, dan penugasan.

1. Tujuan

Keterangan dan judul yang digunakan dalam Perjanjian hanya untuk memudahkan referensi.

1. Rekan-Rekan

PPA dapat dilaksanakan dengan sejumlah rekan kerja, dan masing-masing rekan kerja yang sudah diputuskan harus memiliki kekuatan dan efek yang sama seperti instrumen aslinya.

1. Domisili Hukum

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Negara Bagian Oregon (tanpa mengacu pada pilihan doktrin hukum), kecuali sejauh hak dan kewajiban Para Pihak wajib diatur oleh Undang-Undang Federal Amerika Serikat, maka hak dan kewajiban tersebut akan diatur oleh Undang-Undang Federal Amerika Serikat.

1. Sertifikasi Pemenuhan Kesempatan Kerja yang Sama Rata

Penjual mengetahui bahwa BPA tunduk pada berbagai Undang-Undang Federal, Perintah Eksekutif, dan peraturan mengenai kesempatan kerja yang setara dan tindakan afirmatif. Hanya sejauh Undang-Undang Federal, Perintah Eksekutif, dan peraturan yang berlaku untuk Penjual selaku vendor untuk BPA karena penjualan Output Energi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Federal, Perintah Eksekutif dan peraturan, termasuk, namun tidak terbatas pada 41 C.F.R § 60-1,4 (a) (1-7) adalah digabungkan dengan referensi.

PPA di Amerika Serikat khususnya dalam hal ini PPA dengan pembangkit listrik tenaga angin juga harus memuat lampiran yang terdiri dari :

1. Deskripsi Fasilitas dan Denah Fasilitas.

Dalam ekshibit ini dijelaskan dengan detail turbin pembangkit listrik yang digunakan, jarak antar turbin, dan deskripsi lengkap mengenai fasilitas dan fasilitas interkoneksi beserta dengan denahnya.

1. Formulir Pemberitahuan.

Formulir yang akan digunakan oleh BPA dan Penjual ketika akan memberitahukan pemberitahuan ketelambatan dikarenakan keadaan lalai maupun keadaan kahar.

1. Formulir Faktur.

Formulir yang digunakan oleh Penjual untuk mengajukan tagihan yang harus dibayarkan oleh BPA.

1. Terminasi Jadwal Pembayaran.

Jadwal pembayaran yang telah disepakai oleh para pihak.

**3.1.3 Persamaan dan Perbedaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (*Power Purchase Agreement*) di Indonesia dan di Amerika Serikat**

Persamaan dari ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau yang dalam bahasa Inggris adalah *Power Purchase Agreement* (PPA) antara di Indonesia dan di Amerika Serikat (AS), antara lain :

1. Para Pihak adalah Negara dan Swasta;
2. Definisi Umum dari istilah-istilah dalam PPA;
3. Syarat efektivitas dan syarat dasar;
4. Ringkasan Deskripsi Fasilitas;
5. Lokasi Fasilitas;
6. Kewajiban untuk membeli dan menjual listrik diantara para pihak;
7. Penagihan dan pembayaran tagihan berkaitan dengan sengketa penagihan;
8. Operasi pemeliharaan berkaitan dengan kondisi yang mendahului tanggal penyelesaian;
9. Kelalaian dan penghentian dikarenakan oleh pihak penjual maupun pembeli;
10. Penyelesaian sengketa antara para pihak;
11. Keadaan kahar;
12. Representasi atau garansi bagi penjual dan pembeli;
13. Yurisdiksi dan pelaksanaan regulasi;
14. Penyerahan dan pembatasan pengalihan hak; dan
15. Hal-hal lain yang berkaitan dengan domisili hukum bagi para pihak.

Perbedaan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau yang dalam bahasa Inggris adalah *Power Purchase Agreement* (PPA) antara di Indonesia dan di Amerika Serikat (AS), antara lain :

1. Jangka waktu di Indonesia diatur dengan maksimal selama 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan di AS sesuai dengan kesepakatan para pihak;
2. Indonesia mengatur ketentuan pokok dari PPA melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, sedangkan di AS pemerintah telah menyediakan format PPA di website pemerintah yang dalam penelitian ini diwakili oleh *Bonneville Power Administration* (BPA);

Perbedaan ketentuan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau yang dalam bahasa Inggris adalah *Power Purchase Agreement* (PPA) yang tidak diatur di Indonesia namun diatur di Amerika Serikat (AS), antara lain :

1. Masa berlaku syarat efektivitas dan syarat dasar;
2. Lampiran;
3. Desain secara umum dan desain konstruksi;
4. Fasilitas interkoneksi dan pengukuran, termasuk didalamnya perjanjian fasilitas interkoneksi, perjanjian pengaturan pengiriman, dan provisi lainnya;
5. Pengecualian dalam kewajiban untuk membeli dan menjual listrik diantara para pihak;
6. Pembayaran listrik pada saat tanggal jatuh tempo dan setelah tanggal jatuh tempo;
7. Penagihan dan pembayaran tagihan berkaitan dengan pernyataan tagihan, faktur tagihan, dan data meteran penagihan;
8. Operasi pemeliharaan berkaitan dengan standar operasi, keandalan fasilitas, arsip operasi, laporan bulanan, komite operasi, dan prosedur operasi;
9. Penghentian PPA dikarenakan untuk kepentingan Pemerintah selaku pembeli;
10. Administrasi kontrak dan pemeritahuan berkaitan dengan pemberitahuan, representatif pemberitahuan, otoritas representatif, arsip operasi, arsip penagihan dan pembayaran, serta pemeriksaan arsip;
11. Asuransi dan ganti rugi;
12. Infromasi konfinesial berkaitan dengan kewajiban, keadaan dan pembatasan, pengecualian, dan ketentuan wajib; dan
13. Hal-hal lain berkaitan dengan pengabaian, pajak, penolakan hak penerima manfaat oleh pihak ketiga, hubungan para pihak, kelangsungan kewajiban, keputusasaan, interpretasi, perjanjian beserta amandemnya, akibat dari perikatan, tujuan, rekan-rekan, sertifikasi pemenuhan kesempatan kerja yang sama rata.

Perbandingan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau yang dalam bahasa Inggris adalah *Power Purchase Agreement* (PPA) antara di Indonesia dan di Amerika Serikat (AS) dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ketentuan yang diatur pada PPA** | **Indonesia** | **Amerika Serikat** |
| Jangka Waktu | Maksimal 30 (tiga puluh) tahun. | Sesuai dengan kesepakatan para pihak. |
| Dasar Hukum | Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik | - |
| Para Pihak adalah Negara dan Swasta | diatur | diatur |
| Definisi Umum | diatur | diatur |
| Syarat efektivitas dan syarat dasar | diatur | diatur |
| Masa berlaku syarat efektivitas dan syarat dasar | tidak diatur | diatur |
| Lampiran | tidak diatur | diatur |
| Ringkasan Deskripsi Fasilitas | diatur | diatur |
| Lokasi Fasilitas | diatur | diatur |
| Desain secara umum dan desain konstruksi | tidak diatur | diatur |
| Fasilitas interkoneksi dan pengukuran, termasuk didalamnya perjanjian fasilitas interkoneksi, perjanjian pengaturan pengiriman, dan provisi lainnya. | tidak diatur | diatur |
| Kewajiban untuk membeli dan menjual listrik diantara para pihak. | diatur | diatur |
| Pengecualian dalam kewajiban untuk membeli dan menjual listrik diantara para pihak. | tidak diatur | diatur |
| Pembayaran listrik pada saat tanggal jatuh tempo dan setelah tanggal jatuh tempo. | tidak diatur | diatur |
| Penagihan dan pembayaran tagihan berkaitan dengan pernyataan tagihan, faktur tagihan, dan data meteran penagihan. | tidak diatur | diatur |
| Penagihan dan pembayaran tagihan berkaitan dengan sengketa penagihan. | diatur | diatur |
| Operasi pemeliharaan berkaitan dengan kondisi yang mendahului tanggal penyelesaian. | diatur | diatur |
| Operasi pemeliharaan berkaitan dengan standar operasi, keandalan fasilitas, arsip operasi, laporan bulanan, komite operasi, dan prosedur operasi. | tidak diatur | diatur |
| Kelalaian dan penghentian dikarenakan oleh pihak penjual maupun pembeli. | diatur | diatur |
| Penghentian PPA dikarenakan untuk kepentingan Pemerintah selaku pembeli. | tidak diatur | diatur |
| Administrasi kontrak dan pemeritahuan berkaitan dengan pemberitahuan, representatif pemberitahuan, otoritas representatif, arsip operasi, arsip penagihan dan pembayaran, serta pemeriksaan arsip. | tidak diatur | diatur |
| Penyelesaian sengketa antara para pihak. | diatur | diatur |
| Keadaan kahar | diatur | diatur |
| Representasi atau garansi bagi penjual dan pembeli. | diatur | diatur |
| Asuransi dan ganti rugi. | tidak diatur | diatur |
| Yurisdiksi dan pelaksanaan regulasi. | diatur | diatur |
| Penyerahan dan pembatasan pengalihan hak. | diatur | diatur |
| Infromasi konfinesial berkaitan dengan kewajiban, keadaan dan pembatasan, pengecualian, dan ketentuan wajib. | tidak diatur | diatur |
| Hal-hal lain berkaitan dengan pengabaian, pajak, penolakan hak penerima manfaat oleh pihak ketiga, hubungan para pihak, kelangsungan kewajiban, keputusasaan, interpretasi, perjanjian beserta amandemnya, akibat dari perikatan, tujuan, rekan-rekan, sertifikasi pemenuhan kesempatan kerja yang sama rata. | tidak diatur | diatur |
| Hal-hal lain yang berkaitan dengan domisili hukum. | diatur | diatur |

Berdasarkan perbandingan diatas apabila dikaitkan dengan teori kontrak yang merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hubungan atau persetujuan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak yang lain berhak atas sesuatu.[[126]](#footnote-126)

Vollmar, H.F.A. mengemukakan pendapatnya mengenai Teori Momentum Terjadinya Kontrak[[127]](#footnote-127) atau yang dalam bahasa Inggris adalah *theory momentum the occurrence of contract*. Teori yang menganalisis dan mengkaji tentang saat terjadinya kontrak yang dibuat oleh para pihak ini terdiri dari 4 (empat) teori[[128]](#footnote-128), yaitu Teori Pernyataan, Teori Pengiriman, Teori Pengetahuan, dan Teori Penerimaan.

Penandatanganan PPA antara *seller* dan *buyer* tentunya melalui adanya kesepakatan yang terjadi antara pihak yang menerima penawaran menandatangani PPA maka pihak tersebut telah menyatakan menerima dan kesepakatan telah terjadi. *Seller* di Amerika Serikat dapat menandatangani sebuah perjanjian yang telah dirancang oleh pemerintah Amerika Serikat yang dalam hal ini diwakili oleh BPA, ketika *seller* dapat memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan maka kesepakatan tersebut telah terjadi apabila dikaitkan dengan teori pernyataan dan teori penerimaan. Namun yang membedakan adalah teori penerimaan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Hal tersebut biasa terjadi di Indonesia dengan mekanisme penunjukan langsung.

Teori pengiriman beranggapan bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram. Kritik terhadap teori ini, bagaimana hal itu bisa diketahui. Hal ini tidak dapat diterapkan dalam pernyataan sepakat antara para pihak dalam PPA karena teori ini dianggap sangat teoritis karena terjadinya kesepakatan dianggap terjadi secara otomatis dan tidak berdasarkan pengiriman telegram atau surat elektronik.

Kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung). Teori pengentahuan ini tidak dapat dikaitkan dengan proses kesepakatan antara *seller* dan *buyer* karena bagaimana salah satu pihak dapat mengetahui isi penerimaan apabila belum menerima.

Perjanjian terjadi apabila ada persetujuan antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah teori kehendak menurut Van Dunne dan Van der Burght. [[129]](#footnote-129) Sedangkan dalam teori pernyataan kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi, yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi. Teori kehendak ini tidak sesuai dengan perbandingan diatas karena teori ini menimbulkan kesulitan apabila tidak ada persesuaian antara kehendak dan penryataan. Namun dalam teori pernyataan apabila terjadi perbedaan antara kehendeak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi. Teori kehendak dan Teori pernyataan ini tidak sesuai dengan proses pendandatangan PPA antara *seller* dan *buyer* di Indonesia dan di Amerika Serikat karena pada dasarnya para pihak dapat bersepakat apabila persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah selaku *buyer* telah dipenuhi oleh *seller* dan untuk di Indonesia *seller* harus merupakan penjual dengan harga terrendah apabila dibandingkan dengan pemohon lainnya.

Teori Berdasarkan Para Pihak (*party-based theories*) didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban. Randy E. Barnett[[130]](#footnote-130) membagi teori ini menjadi 2 (dua) yaitu Teori Kehendak (*will theories*) dan Teori Ketergantungan (*reliance theories*). Teori kehendak menyatakan bahwa pernyataan dapat diberlakukan atau dilaksanakan karena *seller* menghendaki atau memilih untuk terikat pada pernyataannya. Sedangkan teori ketergantungan adalah kewajiban kontraktual para pihak sebagai upaya untuk melindungi ketergantungan dari *seller* (orang yang ditujukan terhadap kehendak atau niat tersebut) pada pihak lainnya. Hal ini dimaksudkan bahwa pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik masyarakat tentunya dapat secara otomatis tercipta ketergantungan dengan *seller* sebagai pemasok listrik swasta.

Randy E. Barnett mengemukakan teori berdasarkan standar penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi atau menilai substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, apakah sesuai dengan standar penilaian. Standar utama untuk melakukan penilaian, yaitu pada efisiensi ekonomi dan keadilan substantif. Teori ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu Teori Efisiensi (*efficiency theories*) dan Teori Kewajaran Substantif (*substantive fairness theories*). Teori efisiensi merupakan upaya untuk memaksimalkan beberapa konsep antara kekayaan sosial atau kesejahteraan. Istilah efisiensi ini merujuk pada hubungan antara kemanfaatan dan biaya secara keseluruhan. Hal ini diatur dalam PPA di Amerika Serikat karena PPA di Amerika Serikat mengedepankan pemanfaatan biaya seminim mungkin namun tetap dengan kualitas keamanan dan keselamatan yang terbaik. Sedangkan teori kewajaran substantif merupakan teori yang mengkaji atau mengevaluasi standar nilai pada substansi kontrak secara objektif, apakah kontrak tersebut sudah adil atau tidak. Apabila dibandingkan PPA antara di Indonesia dan di Amerika Serikat mungkin Indonesia tampat kurang adil bagi *seller* karena harga listrik ditentukan oleh pemerintah selaku *buyer,* namun yang perlu diperhatikan adalah daya beli masyarakat di Indonesia yang mengakibatkan pemerintah harus mengatur harga listrik tersebut.

Teori Berdasarkan Proses (*process-based theories*) difokuskan pada prosedur atau proses dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, serta menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada ini sesuai dengan PPA di Indonesia dan di Amerika Serikat.

Wayne Barnes mengemukakan bahwa *subjective theory of contract* difokuskan pada bertemunya kehendak atau keinginan para pihak. Para pihak harus benar-benar menyetujui kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya. Teori kontrak ini hanya mengikat antara *seller* dan *buyer* yang telah ditentukan secara jelas dan subjeknya bertujuan mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya. Dengan demikian, kebebasan para pihak di atas segala-galanya. Teori yang berkembang pada abad ke-19 ini berbunyi : [[131]](#footnote-131)

“*The subjective theory, which is said to be represented by the French Legal System is concerned with the actual meeting of the minds or literal intentions of the parties. Both parties had to actually essent to an agreement for there to be a contract and external manifestations of assent are taken merely as evidence of the actual intent of the contracting parties. Proponents of this theory only wish to bind those who clearly and subjectively intended to be bound and accordingly promote the freedom of contract above all other principles. They response on the contention that individuals need not be compelled to perform an obligation to which they haven’t given their consent.*”

Wayne Barnes juga mengemukakan tentang pengertian dan fokus teori kontrak objektif, ia mengemukakan bahwa :[[132]](#footnote-132)

“*The central premise to the objective theory of contracts is that contractual assent is determined by analyzing external evidence, and evidence of subjective, internal intention is therefore unimportant. That is, contract formation is concerned with communication, not cognition. Thus, modern objective theory provides that objective manifestations of intent of [a] party should generally be viewed from the vantage point of a reasonable person in the position of the other party such as principles of fairness and protection of reliance, freedom of contract, and personal autonomy.*”

Dalam konstruksi ini, premis utama teori kontrak objektif adalah pada mengikatnya kontrak ditentukan dengan menganalisis dan mengkaji dari bukti-bukti atau petunjuk yang bersifat eksternal dan bukti-bukti subjektif seperti bukti pemeritahuan apabila salah satu pihak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan PPA. Niat para pihak tidak penting. Ini berarti bahwa pembentukan kontrak ditentukan oleh adanya komunikasi, bukan kognisi. Dalam teori kontrak objektif modern, bahwa maksud para pihak harus ditentukan dari sudut pandang yang wajar dalam posisi pihak lainnya.

Andrew S. Gold[[133]](#footnote-133) membagi teori kontrak otonomi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : *Promissory theories, Reliance theories, dan Transfer theories.* Berdasarkan *Promissory theories* mengikatnya kontrak karena adanya persetujuan para pihak. Persetujuan merupakan komponen dasar dari kontrak yang dalam hal ini adalah PPA. Persetujuan itu sebagai dasar di dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak. Teori ini dibangun atas dasar pendekatan moral. *Reliance theories* fokus pada kepentingan *buyer. Buyer,* yaitu orang menerima penawaran dari penawar (*seller*). Idenya, bahwa *seller* meminta kepada *buyer* untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Sedangkan *Transfer theories* adalah pelaksanaan kontrak karena *buyer* harus memindahkan atau melaksanakan kewajiban kontraktualnya.

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang pembebasan kewajiban berprestasi dari debitur kepada kreditor yang disebabkan karena adanya keadaan memaksa adalah teori overmacht. Teori ini sesuai dengan pelaksanaan PPA di Indonesia dan di Amerika Serikat karena PPA di kedua negara ini mengatur hal-hal berkaitan dengan keadaan memaksa dan keadaan kahar. Teori ketidakmungkinan dan teori penghapusan atau peniadaan kesalahan merupakan 2 (dua) teori yang membahas mengenai keadaan memaksa. [[134]](#footnote-134) Teori ketidakmungkinan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu ketidakmungkinan absolut atau objektif dan ketidakmungkinan subjektif. Ketidakmungkinan absolut atau objektif merupakan suatu ketidakmungkinan sama sekali dari *seller* untuk melakukan prestasinya kepada *buyer.* Ketidakmungkinan relatif atau subjektif adalah suatu ketidakmungkinan relatif dari *seller* untuk memenuhi prestasinya. Teori Penghapusan atau peniadaan kesalahan adalah dengan adanya *overmacht* terhapuslah kesalahan *seller* atau *overmacht* peniadaan kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh/bisa dipertanggungjawabkan.

**3.2 Perbandingan Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat**

**3.2.1 Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia**

Penyelesaian sengketa bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik di Indonesia secara khusus diatur pada Pasal 27 Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2017. Apabila penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat, maka perselisihan akan diserahkan kepada ahli yang disepakati oleh para pihak untuk mendapatkan putusan ahli.

Putusan ahli diatas tidak mengikat para pihak, karena ketika para pihak tidak dapat menerima putusan ahli, maka para pihak dapat menentukan salah satu Badan Arbitrase berikut untuk mendapatkan putusan akhir yang mengikat kedua belah pihak, antara lain :

1. **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);**

Dalam ranah hukum perdata sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa ketika terjadi sengketa terdapat beberapa pranata sebagai lembaga yang menjadi penyelesai sengketa. Pencarian metode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan sengekta adalah sesuatu yang urgen dalam masyarakat. Para ahli non hukum banyak mengeluarkan energi dan inovasi untuk mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa.[[135]](#footnote-135)

1. **Pengajuan Permohonan Arbitrase**

Pengajuan suatu persoalan arbitrase melalui BANI harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui bahwa segala sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui BANI, klausul yang disarankan BANI berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi : “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.”

Berdasarkan Pasal 2 BANI *Rules and Procedures* dalam hal ini jika para pihak telah sepakat dalam perjanjian untuk membawa segala sengketa keperdataan (baik wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum) untuk diselesaikan melalui forum arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.

Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa, para pihak dalam perjanjian atua sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atua sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

Prosedur arbitrase dimulai dengan pemohon arbitrase sebagai pihak yang memulai arbitrase ini harus mendaftarkan dan menyamnpaikan terlebih dahulu permohonan arbitrase kepada sekretariat BANI berdasarkan Pasal 6 ayat 1 BANI *Rules and Procedures.* Kemudian setelah Majelis Arbitrase terbentuk, diteruskan kepada Ketua Majelis Arbitrase dan setiap anggota Majelis Arbitrase serta para pihak. Permohonan arbitrase memuat sekurang-kurangnya beberapa hal berikut :[[136]](#footnote-136)

1. Identitas lengkap para pihak (nama, alamat, beserta keterangan penunjukan atas kuasa hukumnya apabila memang diketahui telah menggunakan kuasa hukum).
2. Uraian singkat mengenai duduk perkara yang menjadi dasar dan alasan pengajuan permohonan arbitrase (keterangan fakta-fakta yang mendukung permohonan arbitrase dan butir-butir permasalahannya).
3. Tuntutan (besarnya kompensasi dan lainnya).
4. Bukti-bukti yang digunakan sebagai dasar pembuktian dari pemohon.

Isi dari suatu permohonan arbitrase dapat dikatakan mirip dengan isi dari suatu surat gugatan dalam perkara keperdataan di Pengadilan Negeri yang juga berisi identitas lengkap para pihak yang berperkara, uraian duduk perkara (posita), dan apa yang dituntut (petitum). Suatu permohonan arbitrase harus disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya-biaya ini harus dilunasi oleh para pihak terlebih dahulu sebelum pemeriksaan perkara arbitrase dimulai, jika belum dilunasi, maka pemeriksaan perkara tidak akan dilaksanakan. Hal ini seusuai dengan Pasal 6 ayat 4 BANI *Rules and Procedures.*

Sedangkan pada Pasal 6 ayat 3 BANI *Rules and Procedures* maish berkaitan dengan permbayran administrasi, apabila ada pihak ketiga diluar perjanjian arbitrase turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase seperti yang dimaksud oleh Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak ketiga tersebut juga diwajibkan untuk membayar biaya administrasi dalam biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut.

Setelah pendaftaran, pemohon kemudian mengisi formulir permohonan yang berisi uraian berikut ini : nama pemohon, alamat pemohon, nama termohon, alamat termohon, nama arbiter, dan alamat arbiter apabila arbiter ditunjuk dari luar daftar BANI dan disetujui oleh Ketua BANI.

Kuasa pemohon dan termohon harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan juga Perjnjian Arbitrase yang berisi klausul yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan melalui BANI. Jika tidak ada perjanjian tersebut, maka BANI berhak untuk tidak menerima Permohonan Arbitrase terkait.

Setelah menerima permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus mendaftarkan permohonan itu dalma register BANI. (Pasal 7 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*) Badan Pengurus BANI akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenagan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut. (Pasal 7 ayat 2 BANI *Rules and Procedures*)

Sedangkan pada Pasal 8 ayat 1 BANI *Rules and Procedures* menyatakan bahwa apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI berwenang untuk memeriksa setelah permohonan tersebut didaftarkan, harus ditunjuk seorang atau lebih sekretaris majelis untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.

1. **Ketentuan-Ketentuan Umum Persidangan BANI**
2. Kewenangan Majelis Arbitrase

Majelis Arbitrase pada umumnya terdiri dari 3 orang arbiter dimana 2 orang diantaranya merupakan arbiter yang dapat dipilih sendiri oleh masing-masing pihak, kemudian kedua arbiter tersebut mengusulkan 1 arbiter lainnya sebagai ketua Majelis Arbitrase/*tribunal* kepada BANI, di sini BANI yang mempunyai kewenangan untuk menunjuk Ketua Majelis Arbitrase tersebut. (Pasal 10 ayat 3 BANI *Rules and Procedures*)

Terkait dengan penunjukan arbiter ini, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menunjuk sendiri arbiter mereka saat pengajuan permohonan arbitrase (untuk pemohon arbitrase) dan saat pengajuan jawaban atas permohonan arbitrase (untuk termohon arbitrase). (Pasal 6 ayat 2 BANI *Rules and Procedures*)

Apabila kedua pihak tidak menunjuk arbiter mereka masing-masing dalam batas waktu yang telah ditetapkan maka dalam jangka waktu 14 hari sejak pemeritahuan atau permohonan, Ketua BANI mempunyai kewenangan untuk menunjuk arbiter atas nama pihak yang bersangkutan. (Pasal 10 ayat 2 BANI *Rules and Procedures*)

Selain komposisi Majelis Arbitrase yang berjumlah 3 orang tersebut, Majelis Arbitrase juga dapat hanya terdiri atas seorang arbiter tunggal. Terkait dengan penunjukannya tergantung kepada kesepakatan pihak pemohon dan termohon, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka Ketua BANI berwenang untuk menunjuk arbiter tunggal tersebut. (Pasal 10 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*)

Walaupun para pihak dapat menunjuk sendiri arbiter yang diinginkan, akan tetapi keputusan finalnya akan berada di tangan Ketua BANI sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk menyetujui atau tidaknya penunjukan arbiter tersebut. (Pasal 10 ayat 6 BANI *Rules and Procedures*) Pada dasarnya arbiter yang terdapat dalam daftar BANI baik arbiter domestik maupun arbiter asing merupakan arbiter yang memiliki sertifikat ADR, baik pakar hukum dan pakar non hukum yang memenuhi syarat.[[137]](#footnote-137)

Setelah Majelis Arbitrase terbentuk, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas sengketa dimaksud. Sebelum dan selama masa persidangan Majelis Arbitrase dapat mengusahakan upaya perdamaian antara para pihak, akan tetapi upaya tersebut tidak akan mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan, yaitu 180 hari sejak Majelis Arbitrase terbentuk. (Pasal 4 ayat 7 BANI *Rules and Procedures*)

1. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Proses penyelesaian sengketa melalui metode arbitrase memiliki kelebihan, salah satunya adalah adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak. Selain itu, proses persidangan arbitrase dilakukan dengan tertutup untuk umum (*close door session*), terjamin kerahasiaan para pihak (*confidentiality*) dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan di antara para pihak, para arbiter, dan BANI harus dijaga kerahasiaannya, kecuali oleh peraturan perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui oleh semua pihak yang bersengketa. Dengan berlakunya Pasal 13 ayat 2 BANI *Rules and Procedures* ini, maka tidak akan ada pihak yang dipermalukan atas sengketa yang terjadi, dan tentu saja bagi para pelaku bisnis, reputasi merupakan salah satu modal terpenting dalam melakukan usaha.

1. Lokasi Sidang

Pada dasarnya BANI dan juga kesepakatan para pihak yang menentukan tempat dilakukannya sidang, tetapi persidangan tersebut dapat pula dilakukan di tempat lain jika memang hal tersebut dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Majelis Arbitrase dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa aset-aset, barang-barang lain, atau dokumen-dokumen pada setiap waktu dan di tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para pihak untuk memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui media internet (*VoIP, Video Conference,* dan lainnya) apabila Majelis memang menganggap perlu dilakukan hal tersebut. (Pasal 13 ayat 4 BANI *Rules and Procedures*) VoIP adalah *Voice over Internet Protocol* yang dikenal sebagai IP Telephony, Internet Telephony atau Digital Phone adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet.[[138]](#footnote-138)

1. Bahasa yang digunakan

BANI *Rules and Procedures* mengatur yang berkaitan dengan bahasa, yaitu sebagai berikut :

1. Bahasa Pemeriksaan

Permeriksaan perkara di BANI dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utamanya, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan dipakainya bahasa lainnya seperti bahasa Inggris (umumnya, mengingat bahasa ini merupakan bahasa internasional yang paling banyak dipakai) atau bahasa lainnya.

Hal ini dimungkinkan apabila memang Majelis setelah mempertimbangkan keadaan misalnya adanya pihak-pihak asing dan/atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat maupun yang fasih berbahasa Indonesia, dan/atau di mana transaksi yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain, oleh karenannya Majelis menganggap perlu penggunaan bahasa asing selama proses pemeriksaan. (Pasal 14 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*)

Apabila Majelis dan/atau masing-masing pihak kemudian memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, maka hal tersebut harus disediakan oleh BANI atas permintaan Majelis (dalam hal ini para pihak yang membutuhkan harus menyampaikan permintaan untuk menggunakan penerjemah kepada Majelis), dan biaya pernerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai dengan ketetapan Majelis. (Pasal 14 ayat 3 BANI *Rules and Procedures*)

1. Bahasa Dokumen

Apabila terdapat dokumen aslimaupun fotokopi yang diajukan atau dijadikan dasar oleh para pihak sebagai bukti dalam kasus terkait tidak dibuat dalam bahasa Indonesia namun dibuat dalam bahasa asing yang biasanya bahasa Inggris, maka majelis berhak untuk menentukan apakah dokumen-dokumen dalam bahasa asing tersebut harus disertai terjemahannya kedalam bahasa Indonesia disertai terjemahannya dalam bahasa asing. Hal ini tentu saja semata-mata untuk kepentingan baik para pihak maupun majelis arbitrase sendiri, yaitu untuk mempermudah dan memperlancar proses persidangan aritrase terkait.

Apabila para pihak setuju atau majelis menentukan bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah bahasa selain bahasa Indonesia, maka majelis dapat meminta agar dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia disertai terjemahan dari penerjemah tersumpah dalam bahasa inggris atau bahasa lain yang digunakan. (Pasal 14 ayat 2 BANI *Rules and Procedures*)

Jadi yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah perlu ada terjemahan ke bahasa Indonesia ataupun ke bahasa lainnya adalah Majelis Arbitrase, baik itu atas persetujuan dan permintaan kedua belah pihak atau apabila Majelis menentukan perlu untuk itu.

1. Bahasa Putusan

Suatu putusan arbitrase, selayaknya suatu putusan pengadilan yang dibuat dalma bahasa Indonesia, tetapi selain bahasa Indonesia suatu putusan dapat dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, apabila hal ini diminta oleh suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh majelis. Namun, dalma hal naskah asli putusan dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BANI untuk maksud-maksud pendaftaran yang mana biaya untuk itu harus ditanggung oleh para pihak berdasarkan penetapan Majelis. (Pasal 14 ayat 4 BANI *Rules and Procedures*)

1. Hukum yang diberlakukan

Terkait dnegan penentuan hukum mana yang berlaku atau dipakai sebagai dasar pemeriksaan terhadap sengketa dalam suatu proses arbitrase tergantung kepada hukum apa atau hukum mana yang dipilih dalam perjanjian oleh para pihak terkait. Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian komersial bersangkutan yang menimbulkan sengketa antara para pihak.

Dalam hal oleh para pihak dalam perjanjian tidak ditetapkan tentang hukum yang mengatur, para pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam hal kesepakatan itu tidak ada, Majelis berhak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap perlu, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut permasalahannya. (Pasal 15 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*)

Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan. (Pasal 15 ayat 2 BANI *Rules and Procedures*)

Majelis dapat menerapkan kewenangan yang bersifat *amicable compositeur* dan/atau memutuskan secara *ex aequo et bono,* apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu. (Pasal 15 ayat 3 BANI *Rules and Procedures*) Menurut Fadia Fitriyanti dalam disertasinya beliau menyatakan bahwa istilah *ex aequo et bono* sering diartikan sama dengan istilah *amicable compositeur* yaitu istilah hukum yang berarti apa yang adil dan wajar atau menurut keadilan dan hati nurani*,* walaupun ada negara yang membedakan kedua istilah tersebut dan ada yang mengartikan kedua istilah tersebut sama.[[139]](#footnote-139)

Pokok-pokok pengertian dari pertimbangan dan putusan berdasarkan *ex* *aequo et bono* merupakan istilah dalam sistem *civil law*, *amiable compositeur/amicables compounders* merupakan istilah dalam sistem *common law*, atau keadilan dan kepatutan yang merupakan istilahdalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu :[[140]](#footnote-140)

1. Pertimbangan dan putusan Berdasarkan keadilan dan kepatutan tidak didasarkan pada aturan-aturan hukum yang ketat/kaku, malahan dapat menyampingkan aturan-aturan hokum yang ketat/kaku itu; dan
2. Keadilan dan kepatutan adalah sama dengan keadilan alamiah *(natural equity)*, yaitu keadilan, martabat, atau moralitas dalam hubungan bisnis, atau perasaan naluri manusia tentang kebenaran dan permainan yang jujur *(fair play)*.
3. **Majelis Arbitrase**

Komposisi Majelis Arbitrase terdiri atas 3 orang maupun hanya 1 orang arbiter. Terkait dengan arbiter ini, dalam BANI *Rules and Procedures* yang diakui untuk bertindak selaku arbiter dan dapat dipilih oleh para pihak hanya mereka yang termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau memiliki sertifikat ADR/arbitrase yang diakui oleh BANI. Daftar arbiter BANI tersebut terdiri atas para arbiter yang memnuhi syarat, bertempat tinggal di Indonesia dan di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum dan pakar non-hukum seperti para ahli teknik, arsitek, dan lainnya yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditunjauh kembali, ditambah, atau diubah oleh Badan Pengurus. (Pasal 9 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*)

Jadi kedua belah pihak masing-masing telah menunjuk seorang arbiter, maka Ketua BANI akan menunjuk ketua dari majelis arbitrase yang bersangkutan dengan memperhatikan usulan-usulan dari para arbiter masing-masing pihak dan mereka ini dipersilahkan mengajukan 2 calon yang dipilih dari para anggota BANI atau dari luar daftar arbiter BANI. Dalam hal ini BANI menyarankan agar sekurang-kurangnya seorang arbiter adalah seorang sarjana atau praktisi hukum yang mengetahui dengan baik hukum Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia. (Pasal 9 ayat 5 BANI *Rules and Procedures*)

Namun apabila para pihak tidak menunjuk sendiri arbiternya maka Ketua BANI yang akan menunjuk suatu tim yang terdiri dari para anggota BANI untuk memeriksa dan memutuskan sengketa tersebut atau menunjuk seorang arbiter tunggal apabila sengketa tersebut dianggap sederhana dan mudah. Salah satu pihak dapat mengajukan keberatan terhadap seorang arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua BANI dengan memberikan alasannya. Apabila alasan tersebut diterima, maka Ketua BANI akan menunjuk arbiter yang lain.

Untuk menjadi seorang arbiter yang diakui oleh BANI, maka orang tersebut harus mempunyai sertifikat Arbitrase/ADR yang dikeluarkan maupun yang diakui oleh BANI serta memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut : (Pasal 9 ayat 3 BANI *Rules and Procedures*)

1. Berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun.
3. Tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan masing-masing dari para pihak bersengketa.
4. Tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap hasil penyelesaian arbitrase.
5. Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai secara aktif bidang yang dihadapi.
6. Tidak sedang menjalani atau berindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

Terkait dengan syarat minimum diatas, antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan BANI *Rules and Procedures* hampir tidak berbeda, bahkan dapat dikatakn serupa hanya penulisannya saja yang dibedakan. Berikut adalah syarat minimum untuk seseorang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu :

1. Cakap melakukan tindakan hukum.
2. Berumur paling rendah 35 tahun.
3. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa.
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase.
5. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.
6. Tidak berprofesi sebagai hakim, jaksa, panitera maupun pejabat peradilan lainnya.

Setelah penunjukan tersebut dilakukan, maka dalam jangka waktu maksimal 7 hari sejak penunjukan, arbiter tersebut harus menyampaikan kepada BANI riwayat hidup/pekerjaannya dan suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan bertindak sebagai arbiter. Apabila diperlukan, arbiter yang ditunjuk harus menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau kemandiriannya. (Pasal 10 ayat 7 BANI *Rules and Procedures*)

Apabila dalam penunjukan seorang arbiter, terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian (*conflict of interest*) arbiter tersebut, maka para pihak dapat mengajukan penolakan atas arbiter yang terkait. (Pasal 11 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*) Secara garis besar prosedurnya adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang ingin mengajukan pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran tersebut. Lain halnya, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, apabila keterangan yang menjadi dasar juga diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan tersebut diketahui pihak lawan. (Pasal 11 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*)
2. BANI wajib meneliti bukti-bukti tersebut melalui suatu tim khusus dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain yang berkaitan dengan pengingkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, atau pihak lain menerima pengingkaran tersebut, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan arbiter yang mengundurkan diri atau jika sebaliknya, BANI dapat, namun tidak diharuskan, menyetujui pengingkaran tersebut, Ketua BANI harus menunjuk arbiter pengganti. (Pasal 11 ayat 2 BANI *Rules and Procedures*)

Dalam hal pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu, dan ketua BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter. (Pasal 11 ayat 3 BANI *Rules and Procedures*) Kemudian dimungkinkan juga bagi pihak yang menunjuk arbiter, untuk mengingkari arbiter tersebut. Hal ini dapat dilakukan atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan untuk pengingkaran setelah penunjukan dilakukan. (Pasal 11 ayat 4 BANI *Rules and Procedures*)

1. **Proses Beracara BANI**
2. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan pada tahap proses pemeriksaan sidang pertama di mana para pihak yang bersengketa hadir dengan lengkap dan dapat dilakukan sebelum dan selama masa persidangan. Dalam usaha mendamaikan ini, majelis arbitrase dapat memberi saran dan bantuk untuk menyusun perumusan perdamaian.

Jika majelis berhasil mengusahakan perdamaian, dan para pihak telah menyusun rumusan isi perdamaian yang mereka sepakati, isi perdamaian dituangkan majelis dalam bentuk akta yang disebut “putusan akta perdamaian”. Akta perdamaian adalah *final* dan *binding,* dalam arti setiap putusan akta perdamaian memiliki keadaan dan kualitas yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Upaya perdamaian tidak menghentikan proses pemeriksaan arbitrase, masa upaya perdamaian tidak termasuk ke dalam batas jangka waktu 180 hari. Jika perdamaian tidak tercapai, maka proses pemeriksaan arbitrase akan kembali dilanjutkan.

Pasal 13 ayat (1) BANI *Rules and Procedures* :

“… Sebelum dan selama masa persidangan Majelis dapat mengusahakan adanya perdamaian diantara para pihak. Upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.”

Pada praktiknya upaya perdamaian tetap dapat berjalan apabila disepakati oleh para pihak, sepanjang majelis arbitrase belum menjatuhkan putusan. Selain itu, dalam praktik walau upaya perdamaian mengalami kegagalan, namun hal-hal yang telah disepakati dalam upaya perdamaian dapat dimasukkan dalam putusan arbitrase apabila hal tersebut diminta dan disepakati oleh para pihak. Sedangkan terhadap hal-hal yang belum disepakati dalam upaya perdamaian diminta oleh para pihak untuk diteruskan, diperikso oleh majelis arbitrase dan kemudian diputus.

1. Replik dan Duplik

Kedua belah pihak diberi kesempatan untuk saling menjelaskan pendiriannya. BANI mempersilahkan kedua belah pihak untuk menjelaskan masing-masing pendirian tiada lain daripada memberi kesempatan kepada mereka untuk saling mengajukan *amendment* atau *supplement* terhadap apa-apa yang sudah diajukan dalam *statement of claim* dan *statement of defence.* (Pasal 14 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*)

Pada praktiknya penyerahan replik dan duplik dapat dilakukan melalui pengiriman dokumen saja tanpa perlu dilakukan persidangan dengan dihadiri majelis arbitrase dan para pihak. Jadwal penyerahan replik dan duplik ditetapkan oleh majelis arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak. Replik dan duplik diserahkan ke panitera perkara tersebut, untuk kemudian oleh panitera perkara dikirimkan kepada majelis arbitrase dan pihak lawan.

1. Pembuktian

Acuan dalam menentukan alat bukti yang sah dalam pemeriksaan sengketa di depan forum arbitrase, tergantung pada alat-alat bukti yang ditentukan dalam perundang-undangan tertentu. Penetapan acuan ini digantungkan pada klausul arbitrase. Dalam praktik arbitrase mengenai alat bukti dan penilaian pembuktian, bisa beragam penerapannya. Tergantung pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam klausul arbitrase.

Para pihak menunjuk hukum acara Indonesia sebagai ketentuan yang berlaku tentang aturan, pembuktian dalam klausul arbitrase, yang dianggap sah sebagai alat bukti merujuk kepada Pasal 164 HIR. Alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 164 HIR, terdiri atas :

1. Alat bukti surat;
2. Alat bukti saksi;
3. Alat bukti persangkaan;
4. Alat bukti pengakuan; dan
5. Alat bukti sumpah.

Mengenai beban pembuktian, sistem pembebanan proses pemeriksaan BANI, persis sama dengan apa yang dipraktikkan dalam lingkungan pengadilan, dengan asas dan konsekuensi sebagai berikut :

1. Pihak pemohon wajib membuktikan dalil *statement of claim,* amandemen maupun *additional statement.*
2. Sebaliknya, pihak termohon wajib membuktikan dalil *statement of defence* maupun *additional defence* serta *counterclaim* (rekonpensi).
3. Dalam hal dalil berada dalam keadaan seimbang, bukti wajib dibagi dua. *Claimant* membuktikan dalil tuntutan, dan pihak *respondent* wajib membuktikan dalil bantahan dengan cara menitikberatkan pembeanan wajib bukti kepada pihak yang paling mudah untuk membuktikan dalil. Misalnya antara dalil sewa dengan dalil beli, menurut hukum dan pengalaman, dalil beli jauh lebih mudah membuktikan daripada dalil sewa.

Terdapat dua asas berkaitan dengan pembuktian menurut Frans Hendra Winata, antara lain :

1. Asas Mencapai Batas Maksimal Pembuktian

Menurut asas ini bahwa agar alat bukti yang diajukan salah satu pihak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat dijadikan landasan mendukung keterbukaan suatu dalil atau bantahan adalah apabila alat bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian.

1. Asas Nilai Kekuatan Pembuktian Masing-Masing Alat Bukti

Maksud nilai kekuatan pembuktian adalah nilai pembuktian yang dianggap cukup mendukung keterbuktian sesuatu dihubungkan dengan cara penerapan nilai kekuatan pembuktian itu sendiri.

1. Kesimpulan

Konklusi (*conlusie*) adalah kesimpulan yang dibuat oleh masing-masing pihak setelah jawab-menjawab dan pembuktian, sehingga akhirnya dapat diambil suatu kesimpulan. Kesimpulan yang berisikan kesimpulan jawab-menjawab, kesimpulan dari bukti-bukti tertulis, kesimpulan dari saksi, dan lain-lain.

Pada praktiknya, penyerahan kesimpulan sama dengan replik dan duplik, yaitu dapat dilakukan melalui pengiriman dokumen saja tanpa perlu dilakukan persidangan dengan dihadiri majelis arbitrase dan para pihak. Kesimpulan diserahkan ke panitera perkara tersebut, untuk kemudian oleh panitera perkara dikirimkan kepada majelis arbitrase dan pihak lawan.

1. **Pendapat yang Mengikat dalam BANI**

Pendapat yang mengikat selain diatur dalam Pasal 52 jo. 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, juga diatur dalam peraturan prosedur BANI. Tanpa adanya suatu sengketa, para pihak dalam perjanjian atas kesepakatan bersama dapat mengajukan suatu permintaan ke BANI, dan BANI dapat menerima permintaan tersebut untuk kemudian memberikan pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai suatu persoalan yang berkenaan dengan perjanjian tersebut, yaitu diantaranya mengenai penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lain-lain. Dikeluarkannya pendapat yang mengikat tersebut, mengikat para pihak dan akan dianggap melanggar perjanjian apabila bertindak bertentangan dengan pendapat yang mengikat tersebut.[[141]](#footnote-141)

1. **Jenis-Jenis Putusan Arbitrase**

Majelis Arbitrase berhak menetapkan 3 macam putusan berdasarkan BANI *Rules and Procedures,* antara lain :

1. Putusan Sela

Dalam keadaan biasa, Majelis akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi sebagai suatu putusan sela. Namun, apabila dipandang perlu Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan akhir. (Pasal 18 ayat 4 BANI *Rules and Procedures*)

Majelis berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang kepada pihak ketiga, atua menjual barang-barang yang tidak dapat tahan lama maupun mudah rusak. Dalam hal ini Majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut. (Pasal 19 ayat 5 BANI *Rules and Procedures*)

1. Putusan Akhir

Majelis Arbitrase wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang. (Pasal 25 BANI *Rules and Procedures*)

Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara para pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerim apenunjukan terjadi suatu perjanjian perdata. Penunjukan tersebut mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Putusan akhir diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada suatu hari tertentu dan tempat tertentu pula. Putusan yang telah ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase yang bersangkutan.

Dalam hal majelis terdiri atas tiga (atau lebih) arbiter, setiap putusan atau putusan lain dari majelis harus ditetapkan berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter. (Pasal 27 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*) Tentang perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, hal itu harus dicantumkan dalam putusan. (Pasal 27 ayat 2 BANI *Rules and Procedures*)

Apabila diantara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai putusan yang akan diambil, putusan ketua majelis yang dianggap berlaku. (Pasal 27 ayat 3 BANI *Rules and Procedures*) Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat kesepakatan mayoritas (dan jika majelis menguasakan untuk hal tersebut), ketua majelis dapat memutuskan atas pertimbangannya sendiri. (Pasal 28 BANI *Rules and Procedures*)

Putusan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut, kecuali para pihak setuju bahwa pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusan tersebut tidak perlu dicantumkan. (Pasal 29 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*) Demikian pula dengan putusan majelis ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (Pasal 27 ayat 2 BANI *Rules and Procedures*), untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* atau *amicable compositeur*) jika diminta oleh para pihak yang bersengketa. (Pasal 15 ayat 3 BANI *Rules and Procedures*) Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya. Apabila terdapat tiga arbiter dan satu diantaranya tidak menandatangani, dalam putusan tersebut harus dinyatakan alasannya. (Pasal 30 BANI *Rules and Procedures*)

Merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, suatu putusan arbitrase harus memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.
2. Nama lengkap dan alamat para pihak.
3. Uraian singkat sengketa.
4. Pendirian para pihak.
5. Nama lengkap dan alamat arbiter.
6. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa.
7. Pendapat tiap-tiap arbitrase dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.
8. Amar putusan.
9. Tempat dan tanggal putusan.
10. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Putusan bersifat final dan mengikat para pihak, yang harus menjamin akan langsung melaksanakan putusan tersebut. (Pasal 32 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*) Dalam putusan tersebut, majelis menetapkan batas waktu pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan, disertai sanksi dan/atau denda dan/atau tingkat bunga dalam jumlah yang wajar jika pihak yang kalah lalai melaksanakannya. (Pasal 32 ayat 2 BANI *Rules and Procedures*)

Untuk pembetulan kesalahan-kesalahan, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI (dalam waktu paling lama empat belas hari setelah diterimanya putusan), agar majelis memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus sesuatu, jika dalam putusan tersebut suatu tuntutan tidak disinggung. (Pasal 34 BANI *Rules and Procedures*) Akhirnya, walaupum proses arbitrase bersifat rahasia, hal ini tidak mencegah keharusan mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri ataupun mengajukannya ke pengadilan negeri dimana pun pihak yang menang dapat meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi putusan tersebut. (Pasal 33 BANI *Rules and Procedures*)

1. Putusan Persetujuan Perdamaian

Upaya perdamaian merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh arbiter maupun Majelis Arbitrase sebelum dan selama masa persidangan. Perdamaian tersebut dapat dilakukan atas upaya dari para pihak sendiri, dengan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen, atau dengan bantuan Majelis jika disepakati oleh para pihak. (Pasal 20 ayat 1 BANI *Rules and Procedures*)

Dalam hal ini apabila tercapai upaya perdamaian, maka arbiter atua majelis arbitrase akan menyiapkan suatu memorandum mengenai persetujuan damai tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara yang sama sebagai suatu Putusan dari Majelis (Pasal 20 ayat 2 BANI *Rules and Procedures*) atau dengan kata lain memorandum tersebut merupakan suatu putusan yang berkekuatan eksekutorial, final, dan juga mengikat kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai dengan ketentuan Prosedural BANI. (Pasal 35 BANI *Rules and Procedures*)

Namun harus diperhatikaan bahwa upaya perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan perkara arbitrase terkait, jadi pemeriksaan tetap harus dilakukan dalam jangka waktu 180 hari.

1. ***The United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL); atau**

UNCITRAL adalah singkatan dari *United Nations Commission on International Trade Law.* Komisi ini membentuk UNCITRAL *Arbitrase Rules* melalui Resolusi Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 15 Desember 1976 dengan *Resultion 31/98 (Adopted by The General Assembly in 15 December 1976).* Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani resolusi yang dimaksud. Dengan demikian UNCITRAL *Arbitrase Rules* yang menjadi lampiran resolusi, telah menjadi salah satu sumber hukum internasional di bidang arbitrase. Tujuan PBB membentuk UNCITRAL *Arbitrase Rules* adalah untuk menginternasionalisasikan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa-sengketa antara negara dalam transaksi perdagangan internasional.

Alinea pertama resolusi berbunyi “*Recognizing the value of arbitration as a method of settling disputes arising in the context of international commercial relations.*” Menurut pendapat para penandatangan resolusi, sangat dibutuhkan suatu aturan yang seragam dalam bidang arbitrase antara negara-negara yang sistem hukum, sosial, dan ekonominya berbeda sebagai sumbangan untuk mendorong terwujudnya perkembangan yang harmonis dalma hubungan perdagangan internasional. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah memprakarsai terciptanya suatu aturan arbitrase (*arbitration rules*) melalui konsultasi-konsultasi yang dilakukan oleh *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL).[[142]](#footnote-142)

Pada saat Indonesia yang belum meratifikasi konvensi-konvesi produk UNCITRAL terpilih dalam periode 2013-2016 Abdul Kadir berpendapat bahwa terpilihnya indonesia akan berdampak juga pada regulasi terkait dengan hukum perdagangan. Sedangkan menurut Prof Huala Adolf berpendapat bahwa perlu atau tidak dalam meratifikasi konvensi-konvensi UNCITRAL harus dikembalikan kepada kebutuhan dari pemerintah dan konvensi UNCITRAL dirasa perlu untuk diratifikasi karena regulasi terkait perdagangan di Indonesia telah jauh ketinggalan dibandingkan dengan perkembangan internasional.[[143]](#footnote-143)

1. **Tata Cara Penyelesaian Sengketa UNCITRAL**

Pasal 3 UNCITRAL *Arbitration Rules* yang berbunyi :

“*The party or parties initiating recourse to arbitration (hereinafter called the “claimant” shall communicate to the other party or parties (hereinafter called the “respondent”) a notice of arbitration.*”

Menjelaskan bahwa adanya ketentuan sebutan bagi para pihak yang mengambil inisiatif untuk meminta penyelesaian kepada arbitrase disebut *claimant,* dan pihak yang diajukan sebagai tergugat atau disebut *respondent* (tergugat). Adapula hal lain yang diatur berkenaan dengan gugatan arbitrase adalah perhitungan tenggang waktu mulai terjadinya proses arbitrase, terhitung sejak surat gugatan diterima pihak tergugat. Setiap surat gugatan arbitrase harus mengikuti ketentuan berikut :

* + 1. Gugatan ditujukan atau diserahkan kepada arbitrase;
    2. Mencantumkan nama dan tempat kediaman para pihak;
    3. Menyet dan atau mencantumkan klausula arbitrase;
    4. Menunjuk perselisihan yang timbul dari perjanjian semula;
    5. Mencantumkan pokok-pokok utama gugatan;
    6. Cara penyelesaian yang diminta;
    7. Mengenai jumlah arbiter satu atau lebih sekiranya hal itu belum disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Para pihak dapat diwakili oleh seorang kuasa atau asisten yang dikehendakinya. Nama dan tempat tinggal kuasa atau asisten harus diberi tahu secara “tertulis” kepada pihak lawan. Penunjukan kuasa seperti itu pada dasarnya sama prosedurnya dengan yang diterapkan dalam peradilan. Oleh karena itu, meskipun salah satu pihak telah menunjuk kuasa, sama sekali hal itu tidak mengurangi hak pihak pemberi kuasa untuk membela secara langsung kepentingannya. Bahkan, dalam hal-hal yang dianggap penting, pemberi kuasa dapat dipanggil Mahkamah Arbitrase untuk menghadap sendiri tanpa didampingi oleh kuasanya. (Pasal 4 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

Aturan tentang jumlah arbiter pada prinsipnya dapat disepakai sebelumnya oleh para pihak dalam perjanjian. Dalam perjanjian mereka boleh menyepakai arbiter yang akan menyelesaikan perselisihan. Seandainya para pihak tidak menentukan jumlah arbiter dalam perjanjian, apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sesudah tergugat menerima gugatan belum juga dapat disepakati arbiter hanya terdiri atas seorang saja, harus ditunjuk “tiga” orang arbiter. (Pasal 5 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

Tata cara penunjukan arbiter berdasarkan Pasal 6 UNCITRAL *Arbitration Rules* antara lain :

1. Jika dalam perjanjian para pihak menyetujui arbiter tunggal, tetapi cara penunjukan belum mereka tentukan atau belum menunjuknya dalam perjanjian, tata cara penunjukan dilakukan oleh salah satu pihak mengajukan usulan kepada pihak lain seorang atau beberapa orang calon arbiter tunggal, atau mengajukan tawaran untuk menunjuk satu badan atau beberapa badan kuasa atau yang dikenal dengan *arbitrase institutional* yang akan bertindak sebagai pemegang kuasa yang berwenang menyelesaikan penunjukan arbiter.
2. Apabila usulan yang diajukan satu pihak tidak tercapai kata sepakat atas penunjukan arbiter tunggal, mereka dapat menyepakati untuk mengangkat suau badan kuasa yang akan bertindak menunjuk arbiter. Cara penunjukan badan kuasa yang akan disepakati para pihak bisa lahir berdasar usulan yang diajukan salah satu pihak kepada pihak yang lain. Pihak yang menerima usulan demikian dapat menyetujui usulan penunjukan arbiter yang ditawarkan kepadanya. Sebaliknya, dia dapat menolak.
3. Apabila para pihak gagal menyepakati penunjukan arbiter tunggal, juga gagal menyepakati suatu badan kuasa yang akan bertindak menunjuk arbiter tunggal maka penunjukan arbiter beralih menjadi kewenangan *Permanent Court of Arbitration* yang selanjutnya disingkat PCA yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Namun untuk itu harus lebih dahulu ada gugatan dari salah satu pihak. Salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Sekretaris Jendral PCA Den Haag.
4. **Penunjukan Majelis Arbiter UNCITRAL**

Penunjukan arbiter yang terdiri dari tiga orang arbiter berdasarkan Pasal 7 UNCITRAL *Arbitration Rules* menggunakan tata cara penunjukan yang membebaskan para pihak untuk menunjuk seorang arbiter yang mereka kehendaki dan kedua arbiter yang ditunjuk oleh masing-masing pihak akan menunjuk arbiter ketiga yang akan bertindaks ebagai Ketua Majelis Mahkamah Arbitrase.

Tanpa mengurangi prinsip penunjukan arbiter yang dikemukakan, penunjukan salah seorang anggota majelis arbiter dilakukan oleh badan kuasa yang ditunjuk berdasar kesepakatan para pihak. Tata cara penunjukan yang seperti itu terjadi apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, salah satu pihak belum menunjuk arbiternya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu, penunjukan arbiter yang bersifat majelis yang terdiri dari tiga orang diberi hak kepada masing-masing pihak untuk menunjuk seorang arbiter yang dikehendaki. Namun jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan atas penunjukan arbiter pihak lawan, tetapi juga belum memberi tahu arbiter yang ditunjuknya, pihak pertama dapat mengajukan gugatan kepada badan kuasa yang disepakati para pihak untuk menunjuk anggota arbiter yang kedua. Dalam hal ini, badan kuasa bertindak mengambil alih hak pihak yang tidak mempergunakan haknya menunjuk arbiter. Dengan demikia hak pihak tersebut gugur untuk menunjuk arbiter yang dikehendaki.

1. **Perlawanan Terhadap Arbiter UNCITRAL**

Seorang arbiter yang ditunjuk duduk dalam Mahkamah Arbitrase harus benar-benar terhindar dari sikap dan tindakan memihak. Arbiter tersebut harus bebas memberi pendapat dan pertimbangan jika tampak tanda dan isyarat yang memberi keraguan atas sikap independensinya.

Pasal 9 dan Pasal 10 UNCITRAL *Arbitration Rules* menegaskan upaya bagi para pihak untuk mengajukan perlawanan atas penunjukan arbiter yang bersangkutan. Setiap arbiter yang ditunjuk dapat dilawan agar dapat diganti dengan arbiter lain. Upaya perlawanan harus berdasarkan adanya keadaan yang mencurigakan berkaitan dengan sikap yang bersifat memihak. Upaya perlawanan tidak hanya dapat dilakukan oleh salah satu pihak terhadap arbiter yang ditunjuk pihak lawan, tetapi terbuka juga kepada pihak untuk melawan arbiter yang ditunjuknya sendiri namun dengna syarat apabila dugaan atas sikap memihak arbiter tersebut baru diketahui sesudah ditunjuk. Jika sejak sebelum penunjukan pihak yang menunjuk sudah tahu akan sikap memihak yang ada pada arbiter, tetapi ia tetap menunjuknya maka ia tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap arbiter yang ditunjuknya sendiri.

Pihak yang bermaksud untuk mengajukan perlawanan terhadap seorang arbiter harus menyampaikan maksudnya sebagai pemberitahuan yang hanya dapat dilakukan dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari dari tanggal penunjukan arbiter yang hendak dilawan. Pemberitahuan perlawanan disampaikan kepada pihak lawan, kepada arbiter yang hendak dilawan dan juga kepada anggota arbiter yang lain namun bukan merupakan lawan. Pemberitahuan harus berbentuk tertulis dan mencantumkan alasan perlawanan. Apabila perlawanan ditujukan terhadap arbiter yang ditunjuk pihak lawan, ia dapat menolak atau menyetujui perlawanan. Jika pihak lawan menyetujui perlawanan, maka arbiter akan segera digantikan oleh *substitute arbiter.*  (Pasal 11 ayat 3 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

Apabila pihak lawan menyetujui perlawanan, arbiter yang dilawan berhak untuk mengajukan pengunduran diri dan segera ada penunjukkan arbiter pengganti. Apabila perlawanan tidak disetujui dan arbiter yang dilawan juga tidak mengundurkan diri maka putusan atas perlawanan dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditentukan berdasarkan Pasal 12 UNCITRAL *Arbitration Rules* bahwa :

1. Apabila pengangkatan semula atas arbiter yang dilawan dilakukan oleh badan kuasa yang disepakati oleh para pihak, keputusan perlawanan diambil oleh badan kuasa yang bersangkutan.
2. Apabila penunjukan semula atas arbiter yang dilawan tidak dilakukan badan kuasa yang ditunjuk, tetapi penunjukan arbiter yang dilawan dilakukan setelah badan kuasa yang bersangkutan telah dicalonkan atau telah ditunjuk oleh kesepakatan para pihak, keputusan atas perlawanan diambil oleh badan kuasa tersebut.

Arbiter pengganti adalah penyelesaian fungsi arbitrase yang belum seluruhnya terselesaikan, salah seorang arbiter meninggal atau meletakkan jabatan. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka harus segera ditunjuk penggantinya. Penunjukan arbiter pengganti juga bisa dilakukan karena keadaan yang nyata bahwa salah seorang arbiter telah gagal melaksanakan fungsinya sebagai arbiter. Kegagalan juga bisa menimpa seluruh anggota arbiter yaitu para parbiter tidak bisa memutus sengketa dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penggantian salah seorang arbiter bisa juga dilakukan apabila berada secara *de facto*  atau *de jure* dalam keadaan imposibilitas dalam melaksankan fungsi arbiter. (Pasal 6 dan 7 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

1. **Proses Mahkamah Arbiter UNCITRAL**

Proses pemeriksaan arbitrase harus berpedoman pada beberapa asas dan harus dipedomani oleh para arbiter pada pemeriksaan sengketa, antara lain : (Pasal 15 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

1. Para pihak diperlakukan dalam kedudukan yang sama; dan

Para pihak harus diperhatikan sama dalam setiap tingkatan pemeriksaan dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan permasalahannya. Memberikan kesempatan yang penuh dan berimbang kepada pihak penggugat atau tergugat untuk membela dan mempertahankan kepentingan masing-masing dengan cara memberi kebebasan kepada mereka mengemukakan permasalahannya yang dianggapnya penting.

1. Mengabulkan permintaan *hearing* pada setiap tingkat pemeriksaan.

Apabila ada permintaan dari salah satu pihak untuk mengemukakan bukti kesaksian maka Mahkamah Arbitrase harus mengabulkan serta menetapkan pemeriksaan untuk hal tersebut. Permintaan demikian dapat diajukan oleh masing-masing pihak dalam setiap tahap pemeriksaan.

Namun apabila dari para pihak tidak ada yang meminta adanya *hearing,* maka Mahkamah Arbitrase sendiri yang akan menetapkan jadwal pemeriksaan keterangan para saksi. Setiap dokumen dan keterangan diberi tahu kepada para pihak. Tata cara proses pemeriksaan yang lain, menyampaikan dan memberi tahu secara timbal balik atas setiap dokumen atau keterangan yang diajukan dan disampikan. Setiap dokumen atau informasi yang diajukan salah satu pihak kepada sidang arbitrase, harus ditunjukkan dan disampikan keapda pihak lawan secara timbal balik pada saat proses pemeriksaan belangsung.

1. **Tempat Arbitrase UNCITRAL**

Berdasarkan Pasal 16 UNCITRAL *Arbitration Rules* tempat kedudukan Mahkamah Arbitrase tergantung pada kesepakatan para pihak. Hal ini dapat dicantumkan dalam perjanjian para pihak. Para pihak boleh memilih tempat di negara ketiga atau di salah satu negara para pihak. Jika para pihak tidak menentukan sendiri maka tempat kedudukan Mahkamah Arbitrase akan ditentukan oleh Mahkamah Arbitrase dengan memperhatikan keadaan yang berkaitan dengan kepentingan pemeriksaan. Seperti fasilitas yang memungkinkan kelancaran pemeriksaan para pihak, saksi, dan dokumen. Mahkamah juga dapat menentukan kedudukan lokal dalam negara yang disepakati oleh para pihak untuk mendengar keterangan saksi dan juga bisa mengadakan pertemuan konsultasi antara para pihak.

Apabila mahkamah bermaksud mengadakan permeriksaan pada salah satu tempat, para pihak harus diberitahukan secara resmi dan layak. Dalam pemberitahuan tersebut, mahkamah harus meminta para pihak agar hadir dalam pemeriksaan setempat. Meskipun mahkamah diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan lokal di luar pusat kedudukan yang telah ditentukan untuk mengadakan pemeriksaan setempat pada tempat yang dianggap patut, putusan arbitrase yang akna dijatuhkan tetap harus diambil di tempat kedudukan utama mahkamah.

1. **Bahasa yang digunakan UNCITRAL**

Proses pemeriksaan Mahkamah Arbitrase harus menggunakan bahasa yang telah ditenukan. Penentuan bahasa apa yang akan digunakan dalam proses pemeriksaan, bertitik tolak dari kesepakatan para pihak. Berdasarkan kesepakatan tersebut Mahkamah Arbitrase menetapkan satu atau beberapa bahasa yang akan digunakan. Penetuan bahasa akan segera dilakukan oleh Mahkamah Arbitrase setelah mereka ditunjuk. Penentuan bahasa resmi dalam proses pemeriksaan harus ditetapkan para pihak dalam setiap pernyataan dan menjawab secara tertulis. Penerapannya juga berlaku sepenuhnya dalam proses pemeriksaan secara lisan baik dalam pemeriksaan keterangan saksi maupun pada saat pemeriksaan keterangan para pihak. Dokumen, pernyataan, jawaban, atau bandatahan diperkenankan adalam bahasa asli para pihak. Namun tetap mewajibkan mereka untuk menerjemahkan ke dalam bahasa yang telah ditetapkan. (Pasal 17 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

1. **Yurisdiksi UNCITRAL**

Mahkamah Arbitrase memiliki kewenangan untuk memutus perlawanan tentang masalah yurisdiksi yang diajukan pihak *respondent*. Begitu juga mengenai perlawanan yang diajukan oleh *respondent* tentang sah atau tidaknya klausula arbitrase, Mahkamah Arbitrase berwenang untuk menetapkannya. Namun berdasarkan Pasal 21 UNCITRAL *Arbitration Rules* perlawanan yang dapat dilakukan hanya berkaitan dengan berwenangnya Mahkamah Arbitrase untuk memeriksa persengketaan yang timbul dari perjanjian atau perlawanan berkaitan dengan ketidakabsahan klausula arbitrase.

Apabila perlawanan atas yurisdiksi, putusan arbitrase dapat meliputi pernyataan yang menyatakan perjanjian batal demi hukum atau *null* dan *void.* Maka putusan tersebut tidak dengan sendirinya meliputi ketidakabsahan klausula arbitrase. Ketentuan tersebut bertentangan dengan keberadaan klausula arbitrase perjanjian asesor yang melekat pada perjanjian pokok. Jika berpegang pada prinsip klausula arbitrase sebagai perjanjian asesor, batalnya perjanjian pokok dengan sendirinya perjanjian arbitrase juga batal, tidak ada lagi tempat berpijak pada klausula arbitrase. (Pasal 21 ayat 2 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan harus dilakukan bersamaan dengan jawaban bantahan atau pada pengajuan tuntutan balik. Lewat dari itu, perlawanan yurisdiksi dianggap tidak sah. (Pasal 21 ayat 3 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

Mahkamah Arbitrase harus mengeluarkan pernyataan atau pemberitahuan kepada para pihak bahwa mereka diberikan kesempatan dalam tempo 20 (dua puluh) hari untuk mengajukan tambahan terhadap jawaban gugatan dan bantahan. Jangka waktu pemberian kesempatan untuk mengajukan tambahan dan bantahan yang di dapat ditetapkan Mahkamah Arbitrase dengan jangka waktu tidak melebihi 45 (empat puluh lima) hari, tetapi batas jangka waktu tersebut dapat dilampaui jika menurut Mahkamah Arbitrase hal itu penting untuk penyelesaian pemeriksaan. (Pasal 23 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

1. **Keterangan Saksi UNCITRAL**

Dalam tata cara pemeriksaan pendengaran keterangan secara lisan atau *oral hearing* Mahkamah Arbitrase harus memberi kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak dalam menerapkan makna kesempatan yang sama termasuk hari, waktu, dan tempat kepada para pihak. Apabila hendak dilakukan pemeriksaan keterangan saksi maka paling tidak 15 (lima belas) hari sebelum hari pemeriksaan, pihak yang mengajukan saksi menyampaikan hal itu kepada Mahkamah Arbitrase, dan kepada pihak lawan. Dalam surat pemberitahuan, dicantumkan nama dan tempat tinggal saksi yang hendak diajukan. Pemberitahuan juga harus menjelaskan bahasa yang akan dipergunakan saksi dalam memberi keterangan. Sehubungan dengan pemeriksaan saksi syarat berdasarkan Pasal 25 ayat 4 UNCITRAL *Arbitration Rules* antara lain :

1. Pemeriksaan keterangan saksi harus diabadikan dengan kamera atau foto. Namun apabila para pihak sepakat, ketentuan tersebut boleh disingkirkan.
2. Selama pemeriksaan berlangsung Arbitrase dapat mengabulkan pengunduran diri salah seorang atau semua saksi.
3. Mahkamah Arbitrase bebas menentukan saksi mana yang diperiksa dan didengarkan keterangannya.

Keterangan saksi juga diperkenankan secara tertulis dan memenuhi syarat formal dengan keterangan tertulis harus dibuat sendiri oleh saksi dan ditandatangani oleh saksi yang bersangkutan. Setiap alat bukti yang diajukan para pihak harus dinilai dan dipertimbangkan secara seksama dan menyeluruh oleh Mahkamah Arbitrase. Dalam menilai dan mempertimbangkan sepenuhnya berwenang menentukan alat bukti mana yang dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang relevan. (Pasal 25 ayat 5 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

1. **Tindakan Sementara UNCITRAL**

Mahkamah Arbitrase memeriksa suatu sengketa harus memperhatikan hal-hal yang termasuk ke dalam tindakan sementara, yaitu : tindakan penyitaan barang yang berkaitan dengan pokok sengketa, memerintahkan pendepositan kepada para pihak yang dilakukan oleh pihak ketiga, dan menjual barang-barang yang mudah rusak. Mahkamah Arbitrase dapat melakukan tindak sementara apabila ada gugatan dari salah satu pihak dan permintaan tersebut akan disetujui apabila Mahkamah menganggap hal tersebut penting jika dikaitkan dengan pokok yang dipersengketakan. Hanya saja perlu dipertanyakan apakah terhadap setiap tindakan sementara mesti didasarkan pada syarat adanya permintaan salah satu pihak, yang berarti Mahkamah tidak memiliki kebebasan untuk itu tanpa ada permintaan. (Pasal 26 ayat 1 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

Setiap tindakan sementara dapat berbentuk putusan sela atau insidentil. Namun tidak harus dibuat seperti itu, dan boleh dalam bentuk surat penetapan. Apabila Mahkamah Arbitrase mengambil tindakan sementara, dia harus menetapkan jaminan yang cukup untuk membiayai tindakan tersebut. (Pasal 26 ayat 2 UNCITRAL *Arbitration Rules*)

1. **Putusan Arbitrase UNCITRAL**

Sistem pengambilan putusan didasarkan pada dua sistem yang digabung secara “prioritas berkala alternatif”, yaitu prioritas pertama yang mendasarkan pada sistem mayoritas dan apabila tidak tercapai, putusan dapat diambil berdasarkan sistem *umpire.* Dalam hal ini Ketua Majelis Arbiter dapat memutus sendiri atas nama Mahkamah. Syarat formil putusan selain harus dalam bentuk tertulis dan ditandatangani, juga harus tercantum tanggal dan tempat putusan dijatuhkan serta dalam pembuatan putusan akhir harus dimasukkan putusan sela yang pernah diambil dalam proses pemeriksaan. Sedangkan syarat materiilnya menetukan adanya pertimbangan yang cukup. Arti dari pertimbangan yang cukup adalah harus berdasarkan alasan alasan yang cukup, pertimbangan putusan mesti dengan seksama, cermat, dan menyeluruh dalam menilai semua fakta yang ditemukan dalam menilai semua fakta yang ditemukan selama proses pemeriksaan berlangsung.[[144]](#footnote-144)

1. **Badan Arbitrase lainnya yang ditunjuk oleh para pihak.**

**3.2.2 Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Amerika Serikat**

Penyelesaian sengketa bagi para pihak yang melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik di Amerika Serikat berdasarkan *Power Purchase Agreement* dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Para Pihak harus berusaha dengan itikad baik untuk menegosiasikan sebuah resolusi perselisihan sebelum memulai proses pengaduan. Selama terjadi perselisihan kontrak atau adanya masalah kontrak antara Para Pihak yang timbul dari PPA, Para Pihak harus melanjutkan kinerja berdasarkan PPA sambil menunggu solusi dari perselisihan, kecuali jika tidak mungkin untuk dilakukan atau tidak praktis. Cadangan hak Penjual untuk mencari dan penyelesaian yudisial terhadap setiap perselisihan yang timbul dibawah PPA yang tidak tunduk pada arbitrase berdasarkan *Federal Arbitration Act*.

Undang-Undang Arbitrase Amerika Serikat yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Federal Arbitration Act* adalah sebuah tindakan dari Kongres yang memfasilitasi pengadilan dalam bidang penyelesaian sengketa privat melalui arbitrase. Hal ini berlaku di pengadilan negeri dan pengadilan federal dan berlaku dimana transaksi yang dipertimbangkan oleh para pihak yang melibatkan perdagangan antarnegara dan didasarkan pada pelaksanaan dan didasarkan pada pelaksanaan kekuatan Klausul Perdagangan yang diberikan kepada Kongres dalam Konstitusi AS.[[145]](#footnote-145)

Pada tanggal 5 Desember 1980, Kongres mengeluarkan Undang-Undang Perencanaan dan Konservasi Tenaga Listrik Northwest Pacific, yang memberi wewenang kepada empat negara bagian Idaho, Montana, Oregon, dan Washington untuk membentuk Dewan Konservasi dan *Northwest Power*. *Northwest Power Act*  mengarahkan Dewan untuk mempersiapkan sebuah rencana untuk melindungi, mengurangi dan meningkatkan ikan dan satwa liar di cekungan sungai Columbia yang telah terpengaruh oleh pembangunan dan pengoperasian bendungan tenaga air sementara juga meyakinkan *Pacific Northwest* adalah lingkungan yang memadai, efisien, ekonomis dan penyediaan listrik yang handal.[[146]](#footnote-146)

Tindakan final yang diatur pada yang berkaitan dengan Operasi dan Pemeliharaan tunduk pada Undang-Undang Ketenagalistrikan *Northwest* tidak tunduk pada arbitrase yang mengikat dan tetap berada dalam lingkungan yurisdiksi eksklusif di *United States Ninth Circuit Court of Appeals.* Sengketa apapun mengenai hak-hak Para Pihak berdasarkan kebijakan BPA manapun, termasuk penerapan kebijakan tersebut, tidak tunduk pada arbitrase. Penjual berhak untuk mendapatkan solusi sengketa peradilan yang timbul berdasarkan PPA yang tidak tunduk pada arbitrase. Kebijakan BPA berarti dokumen tertulis apapun yang diadopsi oleh BPA sebagai tindakan akhir dalam sebuah catatan keputusan atau catatan keputusan yang menetapkan kebijakan penerapan umum, atau membuat sebuah penentuan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Jika salah satu Pihak menegaskan bahwa sengketa dikeluarkan dari arbitrase, salah satu Pihak dimungkinkan untuk mendaftarkan ke Pengadilan Federal yang memiliki yurisdiksi untuk menentukan apakah sengketa tersebut tunduk pada arbitrase.

Setiap sengketa kontrak atau permasalahan berkaitan dengan kontrak antara Para Pihak yang timbul, kecuali sengketa yang dikecualikan, tunduk pada arbitrase yang mengikat. Para Pihak harus beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebelum memulai arbitrase. Selama arbitrase, Para Pihak akan melanjutkan kinerjanya berdasarkan PPA sambil menunggu penyelesaian sengketa, kecuali jika tidak mungkin atau tidak praktis untuk dilakukan.

Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa CPR memiliki prosedur untuk arbitrase komersial, dan *non-administered arbitration rules* (aturan CPR) yang dalam bahasa Inggris adalah The CPR Institute for Dispute Resolution’s arbitration procedures for commercial arbitration. Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa CPR adalah lembaga internasional untuk pencegahan dan resolusi konflik adalah organisasi nirlaba independen yang membantu bisnis global dan penasihat mereka mencegah dan menyelesaikan perselisihan komersial secara lebih efektif baik secara langsung, dengan meningkatkan kemampuan mereka, dan secara tidak langsung,dengan meningkatkan kapasitas ADR di seluruh dunia.[[147]](#footnote-147)

Setiap arbitrase harus dilakukan di *Portland, Oregon,* kecuali para Pihak setuju sebaliknya. Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa CPR (*The CPR Institute for Dispute Resolution’s Arbitration Procedures for commercial arbitration*) memiliki prosedur untuk arbitrase komersial, dan *non-administered arbitration rules* (aturan CPR), harus digunakan untuk setiap perselisihan; asalahkan, bagaimanpun, bahwa :

1. Para Pihak harus memiliki hak penemuan yang diberikan dalam aturan Federal mengenai Prosedur Sipil kecuali jika Para Pihak menyetujui hal sebaliknya; dan
2. Untuk klaim sebesar 1 (satu) juta dollar Amerika atau lebih, setiap arbitrase harus dilakukan oleh pengadilan yang dipimpin oleh 3 (tiga) arbiter yang netral. Para Pihak harus memilik para arbiter dari daftar yang berisi 15 nama orang yang berkualifikasi sesuai kualifikasi dari Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa CPR. Jika Para Pihak tidak dapat menyetujui ketiga arbiter yang telah dipilih dalam 20 (dua puluh) hari kerja, Para Pihak harus bergiliran untuk memilih nama dari arbiter yang diusulkan. Pihak yang memulai arbitrase akan melakukan pemilihan pertama. Proses ini harus diulang sampai tiga arbiter tetap masuk kedalam daftar, dan orang-orang tersebut akan ditunjuk sebagai arbiter. Untuk perselisihan yang melibatkan kurang dari 1 (satu) juta dollar Amerika, satu arbiter netral harus dipilih sesuai dengan Pasal 6 dari Peraturan CPR. Pasal 6 tentang penentuan arbiter dari Peraturan CPR yang berbunyi :[[148]](#footnote-148)

*6.1 Whenever (i) a party has failed to designate its arbitrator to be appointed by CPR; (ii) the parties have failed jointly to designate the arbitrator(s) to be appointed by CPR; (iii) the parties have agreed that the party-designated arbitrators who have been appointed by CPR shall designate the third arbitrator, and such arbitrators have failed to designate the third arbitrator; (iv) the parties have provided that one or more arbitrators shall be appointed by CPR; or (v) the multi-party nature of the dispute calls for CPR to appoint all members of a three-member Tribunal pursuant to Rule 5.5, the arbitrator(s) required to complete the Tribunal shall be selected as provided in this Rule 6.*

*6.2 Except where a party has failed to designate its arbitrator to be appointed by CPR, CPR shall proceed as follows:*

1. *At its discretion, CPR shall jointly convene the parties by telephone to discuss the selection of the arbitrator(s).*
2. *Thereafter, CPR shall provide to the parties a list, drawn in whole or in part from the CPR Panels, of not less than five candidates if one arbitrator is to be selected, and of not less than seven candidates if two or three arbitrators are to be selected. If either party shall so request, such candidates shall be of a nationality other than the nationalities of the parties. Such list shall include a brief statement of each candidate’s qualifications, availability and disclosure in writing of any circumstances that might give rise to justifiable doubt regarding the candidate’s independence or impartiality as provided in Rule 7. Each party shall number the candidates in order of preference, shall note any objection it may have to any candidate, and shall deliver the list so marked to CPR, which, on agreement of the parties, shall circulate the delivered lists to the parties. Any party failing without good cause to return the candidate list so marked within 10 days after receipt shall be deemed to have assented to all candidates listed thereon. CPR shall appoint as arbitrator(s) the nominee(s) willing to serve for whom the parties collectively have indicated the highest preference and who appear to meet the standards set forth in Rule 7. If a tie should result between two candidates, CPR may designate either candidate. If this procedure for any reason should fail to result in designation of the required number of arbitrators or if a party fails to participate in this procedure, CPR shall appoint a person or persons whom it deems qualified to fill any remaining vacancy, and whom, if either party shall so request, shall be of a nationality other than the nationalities of the parties.*

*6.3 Where a party has failed to designate its arbitrator to be appointed by CPR, CPR shall appoint a person whom it deems qualified to serve as such arbitrator, taking into account the nationalities of the parties and any other relevant circumstances*

Kecuali untuk putusan arbitrase, yang menyatakan hak dan kewajibannya Para Pihak, pembayaran yang pasti bersifat eksklusif tersedia dalam proses arbitrase apapun. Dalam keadaan apapun harus memiliki kinerja yang spesifik untuk pemulihan terhadap BPA. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah Pihak, kecuali salah satu Pihak dapat pengajukan banding berdasarkan alasan yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase Federal, 9 U.S.C. § 1-16 (1988). Penghakiman terhadap putusan yang diberikan oleh arbiter dapat melalui pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi yang diperbolehkan.

Undang-Undang Arbitrase Federal, 9 U.S.C. § 1-16 (1988) yang berbunyi sebagai berikut :

“*If the parties in their agreement have agreed that a judgment of the court shall be entered upon the award made pursuant to the arbitration, and shall specify the court, then at any time within one year after the award is made any party to the arbitration may apply to the court so specified for an order confirming the award, and thereupon the court must grant such an order unless the award is vacated, modified, or corrected as prescribed in sections 10 and 11 of this title. If no court is specified in the agreement of the parties, then such application may be made to the United States court in and for the district within which such award was made. Notice of the application shall be served upon the adverse party, and thereupon the court shall have jurisdiction of such party as though he had appeared generally in the proceeding. If the adverse party is a resident of the district within which the award was made, such service shall be made upon the adverse party or his attorney as prescribed by law for service of notice of motion in an action in the same court. If the adverse party shall be a nonresident, then the notice of the application shall be served by the marshal of any district within which the adverse party may be found in like manner as other process of the court.*”

Undang-Undang Arbitrase Federal, 9 U.S.C. § 1-16 (1988) tersebut diatas mengatur mengenai penentuan abitrator, konfirmasi, yurisdiksi, dan prosedur. Apabila para pihak dalam kesepakatan mereka telah sepakat bahwa keputusan pengadilan akan dimasukkan atas pemberian yang dibuat sesuai dengan arbitrase, dan harus menentukan pengadilan, maka kapanpun dalam waktu satu stahun setelah pemberian penghargaan dilakukan, pihak arbitrase dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sehingga ditetapkan untuk sebuah perintah yang mengkonfirmasikan penghargaan tersebut, dan kemudian pengadilan harus memberikan perintah tersebut kecuali jika penghargaan tersebut dikosongkan, dimodifikasi, atau diperbaiki seperti yang ditentukan pada pasal 10 dan 11. Jika tidak ada pengadilan yang ditentukan dalam kesepakatan para pihak, maka permohonan semacam itu dapat diajukan ke pengadilan AS dan untuk di distrik dimana penghargaan tersebut dibuat. Pemberitahuan permohonan diajukan pada pihak yang merugikan, dan kemudian pengadilan memiliki yurisdiksi partai tersebut seolah-olah ia telah tampil secara umum dalam persidangan. Jika pihak yang merugikan adalah penduduk di distrik dimana penghargaan tersebut dibuat, maka harus dilakukan atas pihak yang merugikan atau pengacaranya seabgaimana ditentukan oleh undang-undang untuk pemberitahuan tindakan dalam pengadilan yang sama. Jika pihak yang merugikan adalah orang yang bukan merupakan penduduk, maka pemberitahuan permohonan tersebut harus dilayani oleh setiap pengadilan dari setiap distrik dimana pihak yang merugikan dapat ditemukan dengan cara yang sama seperti proses pengadilan lainnya.

Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas biaya arbitrasenya sendiri, termasuk biaya hukum. Para Arbiter dapat membagi semua biaya arbitrase lainnya antara Para Pihak dengan cara yang dianggap pantas dilakukan dalam keadaan tertentu, pelaksanaan Para Pihak selama proses, dan hasil dari arbitrase.

**3.2.3 Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak berdasarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat**

Persamaan dari penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau yang dalam bahasa Inggris adalah *Power Purchase Agreement* (PPA) antara di Indonesia dan di Amerika Serikat (AS) adalah dalam hal biaya arbitrase dan upaya akhir apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang telah ditentukan atau yang telah disepakati oleh para pihak.

Biaya arbitrase di Indonesia dan di AS sama-sama ditanggung oleh para pihak, sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam PPA, atau dibebankan kepada pihak yang menimbulkan kerugian pihak lainnya. Upaya akhir di Indonesia dan di AS apabila sengketa tidak dapat diselesaikan maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum untuk di Indonesia, sedangkan di AS salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Federal.

Perbandingan penyelesaian sengketa bagi para pihak berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) atau yang dalam bahasa Inggris adalah *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat akan dijelaskan dalam bentuk tabel berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Penyelesaian Sengketa** | **Indonesia** | **Amerika Serikat** |
| Dasar Hukum | Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, BANI *Rules and Procedures*), dan UNCITRAL *Arbitration Rules.* | *Federal Arbitration Act* dan *CPR Rules*. |
| Upaya Penyelesaian secara musyawarah dan mufakat | Mengupayakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. | Mengupayakan agar dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. |
| Lembaga Arbitrase yang ditentukan | BANI, UNCITRAL, dan Badan Arbitrase lainnya sesuai kesepakatan para pihak. | Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa CPR dan Badan Arbitrase lainnya sesuai kesepakatan para pihak. |
| Biaya Arbitrase | Ditanggung oleh para pihak atau sesuai dengan kesepakatan atau dibebankan pada pihak yang merugikan. | Ditanggung oleh para pihak atau sesuai dengan kesepakatan atau dibebankan pada pihak yang merugikan. |
| Upaya Akhir | Mengajukan gugatan ke pengadilan umum. | Mengajukan gugatan ke pengadilan federal. |

Berdasarkan perbandingan diatas apabila dikaitkan dengan teori penyelesaian sengketa yang merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut.[[149]](#footnote-149)

Teori penyelesaian sengketa pada tahun 1958-an dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf yang mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa berorientasi pada struktur dan institusi sosial, berdasarkan hal tersebut muncul teori sengketa dan teori konsensus. Teori Sengketa[[150]](#footnote-150) menurut Ralf Dahrendorf yang menganalisa mengenai sengketa kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama dihadapan tekanan itu. Apabila dikaitkan dengan penyelesaian sengketa di Indonesia dan di Amerika Serikat kurang sesuai karena memang pada dasarnya sengketa yang terjadi antara *seller* dan *buyer* adalah sengketa kepentingan namun tidak dengan menggunakan kekerasan.

Penyelesaian sengketa berdsarkan *Power Purchase Agreement* (PPA) di Indonesia dan di Amerika Serikat apabila dikaitkan dengan teori hubungan masyarakat tidak sesuai karena teori hubungan masyarakat mengemukakan bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah polarisasi (kelompok yang berlawanan) yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sedangkan dalam dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat di masing-masing negara, PPA mengatur hubungan antara *seller*  dan *buyer* energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit dengan mekanisme *Independent Power Producers* (IPPs).

Teori negosiasi prinsip sesuai dengan penyelesaian sengketa berdasarkan PPA di Indonesia dan di Amerika Serikat karena dalam perselisihan yang akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase yang disepakati oleh para pihak tentunya disebabkan oleh posisi atau keadaan yang tidak selaras diantara para pihak yang menyebabkan timbulnya sengketa.

Sama halnya dengan teori negosiasi prinsip, dalam teori transformasi sengketa juga sesuai dikarenakan masalah-masalah berkaitan dengan sosial, budaya, dan ekonomi tentunya tidak dapat dihindari. Namun dapat diselesaikan sebaik dan seadil mungkin. Teori transformasi sengketa mengemukakan bahwa sengketa terjadi disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

Sengketa antara *seller* dan *buyer* dapat dimungkinkan karena adanya salah satu pihak yang dirugikan atau merasa terancam, contohnya apabila *seller* tidak mengirimkan hasil energi output secara tepat waktu atau *buyer* yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal ini sesuai dengan teori identitas yang beranggapan bahwa terjadinya sengketa disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan.

Pelaksanaan PPA oleh para pihak yaitu *seller* dan *buyer,* terdapat kemungkinan terjadinya kesalahpahaman antara para pihak apabila *seller* merupakan investor asing di Indonesia maupun Amerika Serikat. Hal tersebut sesuai dengan teori kesalahpahman yang berasumsi bahwa sengketa terjadi disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda.

Teori kebutuhan manusia menurut Simon Fisher, dkk, yang dikutip oleh Imam Taufik berasumsi bahwa penyebab terjadinya sengketa adalah oleh kebutuhan dasar manusia, baik fisik, mental, dan sosial yang tidak terpenuhi atau dihalangi.[[151]](#footnote-151) Teori ini dapat diterapkan karena pada dasarnya kebutuhan manusia dalam hal ini adalah *seller* dan *buyer* untuk mendapatkan hal-hal yang telah disepakati berdasarkan PPA merupakan kebutuhan dasar dari masing-masing pihak.

Teori strategi penyelesaian sengketa apabila dikaitkan kurang sesuai dengan ketentuan pokok yang diatur di Indonesia dan di Amerika Serikat. Karena tahapan dari masing-masing negara adalah menyelesaikan permasalahan secara musyawarah mufakat, melalui lembaga arbitrase yang telah ditentukan dalam PPA, melalui lembaga arbitrase sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan apabila tidak ditemukan kesepakatan akhir maka salah satu pihak dapat mengajukan perkara ke Pengadilan Umum untuk di Indonesia dan Pengadilan Federal untuk di AS. Sedangkan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin[[152]](#footnote-152) mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) strategi dalam penyelesaian sengketa yaitu *contending* (bertanding), *yielding* (mengalah), *problem solving* (pemecahan masalah), *with drawing* (menarik diri), dan *inaction* (diam). Teori strategi penyelesaian sengketa tersebut kurang sesuai pada bagian *with drawing* (menarik diri) dan *inaction* (diam), apabila salah satu pihak melakukan hal tersebut maka sengketa tidak dapat terselesaikan dengan hubungan antara *seller* dan *buyer* yang tetap harmonis.

Praktik penyelesaian sengketa antara *seller* dan *buyer* di Indonesia dan di Amerika Serikat jika dikaitkan dengan pendapat dari Laura Nader dan Harry F. Todd Jr. [[153]](#footnote-153) yang berpendapat bahwa terdapat 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat berdasarkan cara penyelesaian sengketa oleh masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, antara lain :

1. Membiarkan saja *(lumping it)*;

Membiarkan saja yaitu keadaan dimana pihak yang merasa diperlakukan tidak adil gagal mendapatkan keadilan dan ia memutuskan untuk membiarkan saja masalah tersebut dikarenakan berbagai kemungkinan seperti kurangnya informasi mengenai bagaimana proses ke peradilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungan yang akan diperoleh dalam hal materiil maupun kejiwaan. Hal ini dapat terjadi antara *seller* dan *buyer,* namun dalam PPA telah diatur bahwa para pihak harus menyelesaikan sengketa dimulai dari musyawarah sampai dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Keadaan membiarkan saja ini tentunya dapat dihindari oleh para pihak yang melaksanakan PPA.

1. Mengelak *(avoidance)*;

Pihak yang merasa dirugikan memilih untuk mengurangi hubungan dengan pihak yang merugikannya atau sama sekali menghentikan hubungan dengan pihak yang merugikan. Penghentian seperti ini dapat terjadi antara para pihak dalam PPA di Indonesia namun tidak dapat terjadi dalam PPA di Amerika Serikat karena PPA Amerika Serikat mengatur dengan rinci hubungan antara para pihak dalam rangka memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa. Isu yang menimbulkan keluhan apabila dielakkan oleh salah satu pihak berdasarkan PPA di Amerika Serikat maka pihak tersebut akan mendapatkan sanksi yang telah disepakati dalam PPA. Contoh sanksinya adalah penghentian sebagian maupun keseluruhan dari hubungan kerja antara para pihak.

1. Paksaan *(coercion)*;

Paksaan untuk memecahkan sengketa kepada pihak lain ini bersifat unilateral. Tindakan memaksa atau ancaman menggunakan kekerasan pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara dalam. Hal ini dapat terjadi antara para pihak dalam PPA, namun penyelesaian sengketa kemungkinan besar akan diselesaikan melalui pengadilan umum untuk di Indonesia dan pengadilan federal di Amerika Serikat.

1. Perundingan *(negotiation)*;

Pemecahan masalah atau sengketa melalui perundingan antara para pihak tanpa adanya pihak ketiga yang mencampuri dengan cara kedua belah pihak berupaya untuk saling meyakinkan dengan membuat aturan mereka sendiri dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.

1. Mediasi *(mediation)*;

Mediasi merupakan sarana yang membantu keduabelah pihak yang berselisih pendapat menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ditentukan oleh para pihak yang apabila di Indonesia melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

1. Arbitrase *(arbitration)*; dan

Para pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga yang dikenal sebagai arbitrator yang sejak semula telahs etuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator itu.[[154]](#footnote-154) Apabila di Indonesia adalah melalui UNCITRAL *Arbitration Rules,* atau lembaga arbitrase lain sesuai kesepakatan para pihak,sedangkan di Amerika Serikat melalui Lembaga Arbitrase Penyelesaian Sengketa CPR dan Badan Arbitrase lainnya sesuai kesepakatan para pihak.

1. Peradilan *(adjudication)*.

Peradilan merupakaan keadaan dimana pihak ketiga memiliki wewenang untuk mencampuri penyelesaian sengketa terlepas dari keingin para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut juga berhak membuat keputusan dan mengakkan keputusan itu berupaya keputusan tersebut dilaksanakan. Hal ini merupakan upaya akhir bagi para pihak berdasarkan PPA. Apbila salah satu pihak yang merasa dirugikan di Indonesia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan umum, sedangkan di Amerika Serikat pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan federal.

**BAB IV**

**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa secara keseluruhan perbandingan antara Perjanjian Jual Beli Listrik dan *Power Purchase Agreement* antara Indonesia dan AS dapat disimpulkan bahwa AS mengatur isi dari PPA lebih detail dibandingkan dengan Indonesia. Jangka waktu dari PPA di Indonesia maksimal selama 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan untuk AS disesuaikan dengan kesepakatan dari para pihak. Indonesia menetapkan dasar hukum berkaitan dengan PJBL yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Sedangkan, di AS melalui *Bonneville Power Administration* menyediakan format perjanjian bagi para calon produsen dan dapat diunduh dari website resmi milik *Bonneville Power Administration.* Perbedaan yang signifikan antara PJBL dan PPA antara lain hal-hal yang berkaitan dengan masa berlaku syarat efektivitas, lampiran, desain konstruksi secara umum, fasilitas interkoneksi dan pengukuran, termasuk didalamnya perjanjian fasilitas interkoneksi, perjanjian pengaturan pengiriman, provisi-provisi lain, pengecualian dalam kewajiban untuk membeli dan menjual listrik diantara para pihak, pembayaran listrik pada saat tanggal jatuh tempo dan setelah tanggal jatuh tempo, penagihan dan pembayaran tagihan berkaitan dengan pernyataan tagihan, faktur tagihan, dan data meteran penagihan, operasi pemeliharaan berkaitan dengan standar operasi, keandalan fasilitas, arsip operasi, laporan bulanan, komite operasi, prosedur operasi, penghentian PPA dikarenakan untuk kepentingan Pemerintah selaku pembeli, administrasi kontrak dan pemeritahuan berkaitan dengan pemberitahuan, representatif pemberitahuan, otoritas representatif, arsip operasi, arsip penagihan dan pembayaran, pemeriksaan arsip, asuransi dan ganti rugi, infromasi konfidensial berkaitan dengan kewajiban, keadaan dan pembatasan, pengecualian, ketentuan wajib, dan hal-hal lain berkaitan dengan pengabaian, pajak, penolakan hak penerima manfaat oleh pihak ketiga, hubungan para pihak, kelangsungan kewajiban, keputusasaan, interpretasi, perjanjian beserta amandemnya, akibat dari perikatan, tujuan, rekan-rekan, sertifikasi pemenuhan kesempatan kerja yang sama rata.
2. Bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan perjanjian antara pembeli dan penjual di Indonesia dan di AS sama-sama mengidentifikasikan dasar hukum, upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mufakat, penentuan lembaga arbitrase yang akan digunakan, pihak yang menanggung biaya arbitrase, dan upaya akhir dari penyelesaian sengketa.

Namun terdapat beberapa perbedaan dikarenakan faktor yurisdiksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum penyelesaian sengketa di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, BANI *Rules and Procedures*), dan UNCITRAL *Arbitration Rules.* Sedangkan AS memiliki dasar hukum penyelesaian sengketa berdasarkan pada *Federal Arbitration Act* dan *CPR Rules.*

Upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan AS sama-sama mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Biaya arbitrase antara kedua negara ini juga sama-sama ditanggung oleh para pihak atau sesuai dengan kesepakatan atau dibebankan pada pihak yang merugikan.

Upaya akhir dari penyelesaian sengketa ini jika di Indonesia para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan umum. Sedangkan di AS, para pihak dapat mengajukan ke pengadilan federal.

**4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarakan hal-hal berikut ini :

1. Peraturan berkaitan dengan isi PPA di Indonesia masih kurang apabila dibandingkan dengan PPA Amerika Serikat. Hal ini merupakan hal yang wajar karena Indonesia merupakan negara berkembang sedangkan Amerika Serikat sudah sebagai negara maju. Melalui penelitian ini dapat diketahui perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat khususnya dalam sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan hasil dari perbandingan pada penelitian ini maka diharapkan Indonesia dapat berkembang menuju ke pengaturan yang lebih baik lagi khususnya dalam sektor ketenagalistrikan dengan mekanisme IPP.
2. Pemerintah Indonesia juga mulai harus memperhatikan dan mulai memprioritaskan pengaturan dengan mekanisme IPP pembangkit listrik energi terbarukan. Pemerintah juga perlu mulai membuat regulasi baru yang mengarahkan para produsen swasta memberikan dampak emisi rumah kaca dari fasilitas seminim mungkin.

**Daftar Pustaka**

**Buku**

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers.

Arrow, Kenneth J., 1962, *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention,* New Jersey : Princetion University Press.

Barnett, Randy E., 1986, *A Consent Theory of Contract,* Columbia Law Review March.

Batubara, Suleman dan Orinton Purba, 2013, *Arbitrase Internasional : Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC,* Jakarta : Penerbit Raih Asa Sukses.

Bauman, Richard, 2002, *Ideology and Community in the First Wave of Critical Legal Studies,* Toronto : University of Toronto Press.

Beale, Hugh, 2002, *Contract Law : Casebooks for the Common Law of Europe,* Oxford : Hart Publisher.

Besant-Jones, John E., 2006, *Reforming Power Markets in Developing Countries : What Have We Learned?,* Washington DC : The World Bank.

Brown, Valerie J. Atkinson, 2001, *Legal Research via the Internet,* Canada: Thomson Delmar Learning.

Busro, Achmad, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian,* Yogyakarta : Pohon Cahaya.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata,* Yogyakarta : Pohon Cahaya.

Byer, Trevor, Enrique Crousillat, and Manuel Dussan, 2009, *Latin America and the Caribbean Region Energy Sector : Retrospective Review and Challengers,* ESMAP Technical Paper 123/09, Washington DC : The World Bank.

Cruz, Peter de, 2014, *Perbandingan Sistem Hukum : Civil Law, Common Law, dan Socialist Law,* Jakarta: Nusa Media.

Dunne, J.M. Van dan Gr. Van der Burght, 1987, *“Penyalahgunaan Keadaan”,* diterjemahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari.

Elias, Stephen *and* The Editor of NOLO, 2009, *Legal Research: How to Find & Understand the Law,* Fifteenth Edition, NOLO, Berkeley, California : Delta Printing Solutions.

Hadikusuma, H. Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia,* Bandung : PT Alumni.

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian,* Bandung : Alumni.

Hartono, Sunaryati, 1988, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Hernako, Agus Yudha, 2011, *Hukum Perjanjian : Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Hillman, Robert A., 1997, *The Richness of Contract Law : An Analysis and Critique of Contemporary Theories of Contract Law,* Berlin : Springer Science+Business Media Dordrecht.

HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis : Buku Kedua,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hudiata, Edi, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,* Yogyakarta : UII Press.

Ihromi, T.O., 1993, *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai,* Jakarta : Yayasan Obor.

James, Michael, 2009, *Litigation With A Foreign Aspect : A Practical Guide,* Great Britain : Oxford University Press.Lazar, Jim dan RAP staff, 2016, *Electricity Regulation In the US : A Guide,* Montpelier : The Regulatory Assistance Project.

Landa, Janet Tai, 1995, *Trust, Ethnicity, and Identity : Beyond the New Institutional Economics of Ethnic Trading Networks, Contract Law, and Gift-Exchange*, Michigan : Michigan Publishing.

Lehman, Jeffrey dan SHirelle Phelps, 2004, *West’s Encyclopedia of American Law,* USA : Gale Publisher

Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2011, *Cyber Law : Asoek Hukum Teknologi Informasi,* Bandung : Refika Aditama.

Marsudi, Djiteng, 2011, *Pembangkit Energi Listrik,* Jakarta : Penerbit Erlangga.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Jakarta: Kencana.

Meliala, Djaja S., 1977, *Hukum di Amerika Serikat : Suatu Studi Perbandingan,* Bandung: Tarsito.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2012, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,* Jakarta : Rajawali Press.

Moleong, Lexy J., 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nader,Laura dan Harry F. Todd Jr., 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies,* (New York : Columbia University Press.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

P., Garfield dan Lovejoy W., 1964, *Public Utility Economics,* New Jersey : Prentice Hall, 1964

Paterson, Jeannie, Andrew Robertson, Arlen, 2012, *Contract : Cases and Materials,* Australia : Thomson Reuters.

Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum dan Perilaku : Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik,* Jakarta : Buku Kompas.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2007, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory),* Jakarta : Prenada.

Salam, Moch Faisal, 2007, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional,* Bandung : Penerbit Bandar Maju.

Soekanto, Soerjono, 1989, *Perbandingan Hukum,* Bandung: Melati.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, 1981, *Hukum Perdata,* Yogyakarta : Liberty.

Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Sumitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum : Legal Research,* Jakarta: Sinar Grafika.

Sutiarso, Cicut, 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis,* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Syahputra, Ramadoni, 2016, *Buku Ajar : Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik,* Yogyakarta : Penerbit LP3M UMY Yogyakarta.

Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum,* Bandung : Penerbit Mandar Maju.

Taufik, Imam, 2007, *Relasi Negara dan Masyarakat dalam Diskursus Sengketa di Indonesia dalam Mengelola Sengketa Membangun Damai Teori, Strategis dan Implementasi Resolusi Sengketa,* Semarang : Walisongo Mediation Center dan IAIN Walisongo.

Thumann, Albert dan Eric A. Woodroof, 2009, *Energy Project Financing : Resources and Strategies for Success,* Lilburn : Fairmont Press.

Trihastuti, Nanik, 2013, *Hukum Kontrak Karya : Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia,* Malang : Setara Press.

Umam, Khotibul, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: Bumi Aksara.

Vollmar, H.F.A., 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II,* diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, Jakarta : Rajawali Pers.

Waite, Maurice dan Sara Hawker, 2009, *Oxford Paperback Dictionary and Thesaurus,* Oxford: Oxford University Press.

Wicaksono, Frans Satriyo, 2009, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak,* Jakarta : Visi Media.

Winarta, Frans Hendra, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Aribitrase Nasional Indonesia dan Internasional,* Jakarta : Sinar Grafika.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum : Konsep dan Metode,* Malang: Setara Press.

**Jurnal Nasional**

Adha, Lalu Hadi, 2009, *Kontrak BOT Sebagai Perjanjian Kebijakan (Beleidovereenskomst),* Jurnal Law Reform, Vol. 4 Nomor 2 , Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Arifin, Zainal, 2015, *Konsumsi BBM untuk Pembangkit Listrik di Indonesia : Kecenderungan, Permasalan dan Solusinya,* Majalah Mineral dan Energi, M&E Vol. 13, No. 2.

Dewi, Ayu Atika dan Etty Susilowati, 2014, *Nasionalisme Penyelesaian Sengketa : Studi Pemberdayaan BANI Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing),* Jurnal Law Reform Vol. 9 No. 2, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dhini, Chrisstar, Novika Maharani, Reza Amarulloh, 2015, *Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation Commission on International Trade Law Terhadap Kontrak Dagang Internasional,* Jurnal Privat Law Vol. III No. 2, Universitas Sebelas Maret, Solo.

Donandi S., Sujana Dan Etty Susilowati, 2015, *Arti Penting Perjanjian Tertulis Antara Pemilik dan Pengguna Karya Seni Fotografi Untuk Kepentingan Promosi Komersial,* Jurnal Law Reform Vol. 11 No. 1, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Fitri, Yulia dan Sri Fitria Retnawaty, 2015, *Prediksi Konsentrasi CO2 pada Cerobong Asap dari Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas Duri,* Jurnal Ilmu Fisika, Vol. 7 No. 2, 2015, Universitas Andalas.

Fitriyanti, Fadia, 2015, *Harmonisasi Penerapan Asas Ex Aequo Et Bono Dalam Sengketa Bisnis Pada Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah,* Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Nainggolan, Handika Roberto dan Eddy Warman, 2016, *Studi Prakiraan Potensi Pembangkit Listrik Panas Bumi di Pusuk Buhit Kelurahan Siogung-ogung Kabupaten Samosir,* Jurnal Singuda Ensikom Vol. 14 No. 38 2016, Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik, Unitersitas Sumatera Utara

Rauf, Rosnita, 2013, *Konsep Integrasi Pembangkit Berbasis Energi Terbarukan Sebagai Sistem Mikrogrid di Kabupaten Pesisir Selatan,* Jurnal Nasional Teknik Elektro Vol. 2 No. 2, Universitas Andalas.

Rompas, Hizkia, 2015, *Suatu Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase,* Lex Privatum Vol. III No. 4.

Setiawan, Eko Budi, 2012, *Analisa Qualitu of Service Voice Over Internet Protocol dengan Protocol H.323 dan Session Initial Protocol,* Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika Vol.1 No. 2, UNIKOM Bandung.

Setyoko, Bambang, 2006, *Analisa Efisiensi Performa Heat Recovery Steam Generation Pada PLTGU,* Traksi, Majalah Ilmiah Teknik Mesin, Vol. 4 No.2.

Suriadi dan Mahdi Syukri, *Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpadu Menggunakan Software PVSYST Pada Komplek Perumahan di Banda Aceh,* Jurnal Rekayasa Elektrika Vol. 9 No. 2 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Warsito, S., Abdul Syakur, Agus Adhi Nugroho, 2005, *Studi Awal Perencanaan Sistem Mekanikal dan Kelistrikan Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro,* Seminar Nasional Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.

**Jurnal Internasional**

Barnes, Wayne, 2008, *The French Subjective Theory of Contract : Separating Rhetoric From Reality,* Majalah French Subjective Theory of Contracts, Vol. 1.

Davies, Lincoln L., 2015, *Symposium : The Pope’s Encyclical and Climate Change Policy Energy, Consumption, and The Amorality of Energy Law,* AJIL Unbound, Vol. 109.

Fthenakis, Vashilis dan Hyung Chui Kim, 2009, *Land use and electricity generation : A life-cycle analysis,* Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 13 Issue 6-7.

Gold, Andrew S., 2009, *A Property Theory of Contract,* Northwestern University Law Review, USA, Vol. 103, No. 1.

Hurt, Christine, 2007, *The Bluebook at Eighteen : Reflecting and Ratifying Current Trends in Legal Scholarship,* Indiana Law Journal Vol. 82 Issue 1, Maurer School of law : Indiana University

Kwoka, John, 2008, *Restructuring the U.S. Electric Power Sector: A Review of Recent Studies,* Review of Industrial Organization, Vol. 32.

Menkel-Meadow, Carrie, 1991, *Pursuing Settlement in an Adversary Culture : A Tale of Innovation Co-Opted or “The Law of ADR”,* Florida State University Law Review Vol. 19 Issue 1.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2013, *Regulation of Dispute Resolution in the United States of America : From the Formal to the Informal to the ‘Semi-formal’,* Georgetown University Law Centre.

Oppenheim, Jerrold, 2016, *The United States Regulator Compact and Energy Poverty,* Energy Research and Social Science Journal Vol. 28.

Resnik, Judith, 1995, *Many Doors? Cloosing Doors? Alternative Dispute Resolution and Adjudication,* The OHIO State Journal on Dispute Resolution Vol. 10 No. 2.

Tura, Hussein Ahmed, 2011, *Interpretation of Contracts Under Ethiopian Civil Code : Subjective or Objective Method?,* AAU Student Law Review Vol. 2 No. 1 July.

**Skripsi**

Hermawan, Henhen, 2013, *Meningkatkan Kinerja Turbin Gas PT. Indonesia Power UBP Priok “Dilihat dari Pengaruh Udara Lingkungan Sekitar”,* Bandung : Skripsi Fakultas Teknik Universitas Pasundan.

**Majalah**

*Liputan Khusus Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi : Pontang-Panting Infrastruktur,* Majalah Tempo, 6-12 November 2017

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (revisi 2007), 2009, Ikatan Akuntan Indonesia, per-1 Juli 2009, Jakarta : Salemba Empat.

**Internet**

<https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Indonesia>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170505093409-78-212460/bps-kuartal-i-2017-pertumbuhan-ekonomi-ri-501-persen/>

<http://mediaindonesia.com/news/read/90917/pendapatan-perkapita-indonesia-naik/2017-02-06>

<http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3545308/indonesia-bisa-keluar-dari-middle-income-trap-di-2030>

<https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/indonesia-dalam-bayang-bayang-middle-income-trap>

<http://setkab.go.id/dorong-infrastruktur-kelistrikan-dan-pasokan-ternak-pemerintah-luncurkan-paket-kebijakan-ix/>

<http://listrik.org/pln/program-35000-mw/>

<https://finance.detik.com/energi/3449449/pln-teken-16-kontrak-proyek-listrik-rp-21-triliun>

<https://www.nrdc.org/stories/global-warming-101>

<https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/mer.pdf>

<https://www.eia.gov/energyexplained/?page=us_energy_home>

<http://listrik.org/pln/ipp-ppa/>

<https://www.bps.go.id/>

<http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-june-2017>

<http://www.ecmweb.com/content/1920s-1920-1929>

<https://www.nae.edu/19582/Bridge/EngineeringAchievements/GreatAchievementsandGrandChallenges.aspx>

<https://www.enotes.com/homework-help/electricity-and-electric-light-imapact-1920s-243135>

[https://www.law.cornell.edu/ucc#](https://www.law.cornell.edu/ucc)

<https://www.law.cornell.edu/ucc/2/2-207>

<http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2182>

<http://www.baniarbitration.org/ina/about.php>

<https://en.wikipedia.org/wiki/SIEPAC>

<https://www.scientificamerican.com/article/2003-blackout-five-years-later/>

<http://icare-indonesia.org/perkembangan-energi-terbarukan-di-eropa-dan-asia-tenggara/>

<https://www.djk.esdm.go.id/pdf/Presentasi%20Dirdan%20I.pdf>

<http://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx>

<https://www.bpa.gov/power/pgc/wind/ex_c_ppa_2.pdf>

<http://www.yourdictionary.com/statutory>

<http://apps.americanbar.org/litigation/committees/adr/articles/spring2014-0614-federal-arbitration-act.html>

<https://www.nwcouncil.org/history/NorthwestPowerAct>

<https://www.cpradr.org/about>

[https://www.cpradr.org/resource-center/rules/internationalother/arbitration/ international-administered-arbitration-rules](https://www.cpradr.org/resource-center/rules/internationalother/arbitration/%20international-administered-arbitration-rules)

**Lampiran**

1. <https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_power_stations_in_Indonesia> diakses pada tanggal 8 Agustus 2017, 19:50 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170505093409-78-212460/bps-kuartal-i-2017-pertumbuhan-ekonomi-ri-501-persen/> diakses pada tanggal 25 Juli 2017, 14:05 WIB [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://mediaindonesia.com/news/read/90917/pendapatan-perkapita-indonesia-naik/2017-02-06> diakses pada tanggal 25 Juli 2017, 14:08 WIB [↑](#footnote-ref-3)
4. <http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3545308/indonesia-bisa-keluar-dari-middle-income-trap-di-2030> diakses pada tanggal 25 Juli 2017, 14:14 WIB [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://www.kemenkeu.go.id/Artikel/indonesia-dalam-bayang-bayang-middle-income-trap> diakses pada tanggal 13 Agustus 2017, 09:37 WIB [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://setkab.go.id/dorong-infrastruktur-kelistrikan-dan-pasokan-ternak-pemerintah-luncurkan-paket-kebijakan-ix/> diakses pada tanggal 25 Juli 2017, 14:23 WIB [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://listrik.org/pln/program-35000-mw/> diakses pada tanggal 25 Juli 2017, 14:28 WIB [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://finance.detik.com/energi/3449449/pln-teken-16-kontrak-proyek-listrik-rp-21-triliun> diakses pada tanggal 25 Juli 2017, 14:38 WIB [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://www.nrdc.org/stories/global-warming-101> diakses pada tanggal 10 Agustus 2017, 18:47 WIB [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/mer.pdf> diakses pada tanggal 24 Agustus 2017, 09:56 WIB [↑](#footnote-ref-10)
11. John Kwoka, *Restructuring the U.S. Electric Power Sector: A Review of Recent Studies,* Review of Industrial Organization, Vol. 32, 2008, hal. 165-166 [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://www.eia.gov/energyexplained/?page=us_energy_home>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2017, 14:02 WIB [↑](#footnote-ref-12)
13. Lincoln L. Davies, *Symposium : The Pope’s Encyclical and Climate Change Policy Energy, Consumption, and The Amorality of Energy Law,* AJIL Unbound, Vol. 109, 2015, hal. 150 [↑](#footnote-ref-13)
14. Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 33-36 [↑](#footnote-ref-14)
15. Maurice Waite dan Sara Hawker, *Oxford Paperback Dictionary and Thesaurus,* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hal. 776 [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://listrik.org/pln/ipp-ppa/> diakses pada tanggal 8 Agustus 2017, 19:44 WIB [↑](#footnote-ref-16)
17. Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum,* (Bandung: Melati, 1989), hal. 131 [↑](#footnote-ref-17)
18. Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1988), hal. 54 [↑](#footnote-ref-18)
19. Djaja S. Meliala, *Hukum di Amerika Serikat : Suatu Studi Perbandingan,* (Bandung: Tarsito, 1977), hal. 89 [↑](#footnote-ref-19)
20. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis : Buku Kedua,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 240-241 [↑](#footnote-ref-20)
21. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 17 [↑](#footnote-ref-21)
22. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, hal. 241-247 [↑](#footnote-ref-22)
23. Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II,* diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta, (Jakarta : Rajawali Pers, 1984), hal. 147-148 [↑](#footnote-ref-23)
24. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Perdata,* (Yogyakarta : Liberty, 1981), hal. 20-21 [↑](#footnote-ref-24)
25. J.M. Van Dunne dan Gr. Van der Burght, *“Penyalahgunaan Keadaan”,* diterjemahkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, Januari 1987, hal. 108-109 [↑](#footnote-ref-25)
26. Randy E. Barnett, *A Consent Theory of Contract,* Columbia Law Review March, 1986, hal. 1-2 [↑](#footnote-ref-26)
27. Hussein Ahmed Tura, *Interpretation of Contracts Under Ethiopian Civil Code : Subjective or Objective Method?,* AAU Student Law Review Vol. 2 No. 1 July 2011, hal. 74-75 [↑](#footnote-ref-27)
28. Wayne Barnes, *The French Subjective Theory of Contract : Separating Rhetoric From Reality,* Majalah French Subjective Theory of Contracts, Vol. 1, 2008, hal. 1 [↑](#footnote-ref-28)
29. Andrew S. Gold, *A Property Theory of Contract,* Northwestern University Law Review, 2009, USA, Vol. 103, No. 1, hal. 7-15 [↑](#footnote-ref-29)
30. M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian,* (Bandung : Alumni, 1986), hal. 84 [↑](#footnote-ref-30)
31. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016 *Op.Cit.,* hal. 144-146 [↑](#footnote-ref-31)
32. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern (Modern Sociological Theory),* (Jakarta : Prenada, 2007), hal. 153-154 [↑](#footnote-ref-32)
33. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-33)
34. Imam Taufik, *Relasi Negara dan Masyarakat dalam Diskursus Sengketa di Indonesia dalam Mengelola Sengketa Membangun Damai Teori, Strategis dan Implementasi Resolusi Sengketa,* (Semarang : Walisongo Mediation Center dan IAIN Walisongo, 2007), hal. 155-158 [↑](#footnote-ref-34)
35. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal. 4-6 [↑](#footnote-ref-35)
36. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., *The Disputing Process Law in Ten Societies,* (New York : Columbia University Press, 1978), hal. 9-11 [↑](#footnote-ref-36)
37. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34 [↑](#footnote-ref-37)
38. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Op.Cit.*, hal. 15 [↑](#footnote-ref-38)
39. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 86 [↑](#footnote-ref-39)
40. Valerie J. Atkinson Brown, *Legal Research via the Internet,* (Canada: Thomson Delmar Learning, 2001), hal.16 [↑](#footnote-ref-40)
41. Stephen Elias *and* The Editor of NOLO, *Legal Research: How to Find & Understand the Law,* Fifteenth Edition, NOLO, (Berkeley, California : Delta Printing Solutions, 2009), page 482 [↑](#footnote-ref-41)
42. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 166-178 [↑](#footnote-ref-42)
43. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Op.Cit.*, hal. 17-19 [↑](#footnote-ref-43)
44. Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum : Legal Research,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 134 [↑](#footnote-ref-44)
45. Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 97-98 [↑](#footnote-ref-45)
46. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 24-27 [↑](#footnote-ref-46)
47. Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum : Konsep dan Metode,* (Malang: Setara Press, 2013), hal. 67 [↑](#footnote-ref-47)
48. *Ibid*, hal. 68-69 [↑](#footnote-ref-48)
49. *Ibid*, hal. 84-85 [↑](#footnote-ref-49)
50. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hal. 53 [↑](#footnote-ref-50)
51. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Op.Cit.,* hal. 19 [↑](#footnote-ref-51)
52. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 248 [↑](#footnote-ref-52)
53. Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum : Civil Law, Common Law, dan Socialist Law,* (Jakarta: Nusa Media, 2014), hal. 377-378 [↑](#footnote-ref-53)
54. <https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, 14:05 WIB [↑](#footnote-ref-54)
55. <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/indonesia-economic-quarterly-june-2017>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2017, 14:18 WIB [↑](#footnote-ref-55)
56. Kenneth J. Arrow, *Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention,* (New Jersey : Princetion University Press, 1962)hal. 609 [↑](#footnote-ref-56)
57. <http://www.ecmweb.com/content/1920s-1920-1929> diakses pada tanggal 20 Desember 2017, 06:16 WIB [↑](#footnote-ref-57)
58. <https://www.nae.edu/19582/Bridge/EngineeringAchievements/GreatAchievementsandGrandChallenges.aspx> diakses pada tanggal 20 Desember 2017, 13:21 WIB [↑](#footnote-ref-58)
59. <https://www.enotes.com/homework-help/electricity-and-electric-light-imapact-1920s-243135> diakses pada tanggal 20 Desember 2017, 06:25 WIB [↑](#footnote-ref-59)
60. Garfield P. Dan Lovejoy W., *Public Utility Economics,* (New Jersey : Prentice Hall, 1964), hal. 15 [↑](#footnote-ref-60)
61. Jim Lazar dan RAP staff, *Electricity Regulation In the US : A Guide,* (Montpelier : The Regulatory Assistance Project, 2016), hal. 5 [↑](#footnote-ref-61)
62. Jerrold Oppenheim, *The United States Regulator Compact and Energy Poverty,* Energy Research and Social Science Journal Vol. 28 August 2016, hal. 96-108 [↑](#footnote-ref-62)
63. Zainal Arifin, *Konsumsi BBM untuk Pembangkit Listrik di Indonesia : Kecenderungan, Permasalan dan Solusinya,* Majalah Mineral dan Energi, M&E Vol. 13, No. 2, Juni 2015, hal.100 [↑](#footnote-ref-63)
64. Rosnita Rauf, *Konsep Integrasi Pembangkit Berbasis Energi Terbarukan Sebagai Sistem Mikrogrid di Kabupaten Pesisir Selatan,* Jurnal Nasional Teknik Elektro Vol. 2 No. 2 Bulan September 2013, Universitas Andalas, hal. 80-81 [↑](#footnote-ref-64)
65. Henhen Hermawan, *Meningkatkan Kinerja Turbin Gas PT. Indonesia Power UBP Priok “Dilihat dari Pengaruh Udara Lingkungan Sekitar”,* (Bandung : Skripsi Fakultas Teknik Universitas Pasundan, 2013), hal. 5 [↑](#footnote-ref-65)
66. Djiteng Marsudi, *Pembangkit Energi Listrik,* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2011), hal. 100 [↑](#footnote-ref-66)
67. Bambang Setyoko, *Analisa Efisiensi Performa Heat Recovery Steam Generation Pada PLTGU,* Traksi, Majalah Ilmiah Teknik Mesin, Vol. 4 No.2 2006, hal. 56 [↑](#footnote-ref-67)
68. Yulia Fitri dan Sri Fitria Retnawaty, *Prediksi Konsentrasi CO2 pada Cerobong Asap dari Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas Duri,* Jurnal Ilmu Fisika, Vol. 7 No. 2, 2015, Universitas Andalas, hal. 69 [↑](#footnote-ref-68)
69. S. Warsito, Abdul Syakur, Agus Adhi Nugroho, *Studi Awal Perencanaan Sistem Mekanikal dan Kelistrikan Pembangkit Listrik Tenaga Mini-Hidro,* Seminar Nasional Teknik Ketenagalistrikan, Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, 2005, hal. 63 [↑](#footnote-ref-69)
70. Handika Roberto Nainggolan dan Eddy Warman, *Studi Prakiraan Potensi Pembangkit Listrik Panas Bumi di Pusuk Buhit Kelurahan Siogung-ogung Kabupaten Samosir,* Jurnal Singuda Ensikom Vol. 14 No. 38 2016, Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik, Unitersitas Sumatera Utara, hal. 14 [↑](#footnote-ref-70)
71. Suriadi dan Mahdi Syukri, *Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpadu Menggunakan Software PVSYST Pada Komplek Perumahan di Banda Aceh,* Jurnal Rekayasa Elektrika Vol. 9 No. 2 Oktober 2010, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hal. 76 [↑](#footnote-ref-71)
72. Ramadoni Syahputra, *Buku Ajar : Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik,* (Yogyakarta : Penerbit LP3M UMY Yogyakarta, 2016), hal. 7 [↑](#footnote-ref-72)
73. *Liputan Khusus Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi : Pontang-Panting Infrastruktur,* Majalah Tempo, 6-12 November 2017, hal. 60 [↑](#footnote-ref-73)
74. John E. Besant-Jones, *Reforming Power Markets in Developing Countries : What Have We Learned?,* (Washington DC : The World Bank, 2006), hal. 130 [↑](#footnote-ref-74)
75. Ibid, hal. 131 [↑](#footnote-ref-75)
76. Trevor Byer, Enrique Crousillat, and Manuel Dussan, *Latin America and the Caribbean Region Energy Sector : Retrospective Review and Challengers,* ESMAP Technical Paper 123/09 (Washington DC : The World Bank, 2009), hal. 20 [↑](#footnote-ref-76)
77. <https://en.wikipedia.org/wiki/SIEPAC> diakses pada tanggal 20 Desember 2017, 17:16 WIB [↑](#footnote-ref-77)
78. Trevor Byer, op.cit., hal. 32 [↑](#footnote-ref-78)
79. <https://www.scientificamerican.com/article/2003-blackout-five-years-later/> diakses pada tanggal 21 Desember 2017, 18:46 WIB [↑](#footnote-ref-79)
80. Achmad Busro, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian,* (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2013), hal. 23 [↑](#footnote-ref-80)
81. Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya : Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia,* (Malang : Setara Press, 2013), hal. 15 [↑](#footnote-ref-81)
82. *Ibid.,* hal. 16 [↑](#footnote-ref-82)
83. H. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia,* (Bandung : PT Alumni, 2005), hal. 98 [↑](#footnote-ref-83)
84. Lalu Hadi Adha, *Kontrak BOT Sebagai Perjanjian Kebijakan (Beleidovereenskomst),* Jurnal Law Reform, Vol. 4 Nomor 2 Tahun 2009, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 6 [↑](#footnote-ref-84)
85. Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata,* (Yogyakarta : Pohon Cahaya, 2011) hal. 68-70 [↑](#footnote-ref-85)
86. Nanik Trihastuti, *op.cit*, hal. 17 [↑](#footnote-ref-86)
87. H. Hilman Hadikusuma, *op.cit.,* hal. 99 [↑](#footnote-ref-87)
88. Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW,* (Jakarta : Rajawali Press, 2012), hal. 67-69 [↑](#footnote-ref-88)
89. H. Hilman Hadikusuma, *op.cit.,* hal. 100 [↑](#footnote-ref-89)
90. Suharnoko, *op.cit*, hal. 4-5 [↑](#footnote-ref-90)
91. Achmad Busro, *op.cit.,* hal. 71-72 [↑](#footnote-ref-91)
92. Suharnoko, *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 3 [↑](#footnote-ref-92)
93. Michael James, *Litigation With A Foreign Aspect : A Practical Guide,* (Great Britain : Oxford University Press, 2009), hal. 16 [↑](#footnote-ref-93)
94. [https://www.law.cornell.edu/ucc#](https://www.law.cornell.edu/ucc) diakses pada tanggal 20 Desember 2017, 18:19 WIB [↑](#footnote-ref-94)
95. Christine Hurt, *The Bluebook at Eighteen : Reflecting and Ratifying Current Trends in Legal Scholarship,* Indiana Law Journal Vol. 82 Issue 1, Maurer School of law : Indiana University, hal. 55 [↑](#footnote-ref-95)
96. Richard Bauman, *Ideology and Community in the First Wave of Critical Legal Studies,* (Toronto : University of Toronto Press, 2002), hal. 80 [↑](#footnote-ref-96)
97. Hugh Beale, *Contract Law : Casebooks for the Common Law of Europe,* (Oxford : Hart Publisher, 2002), hal. 55 [↑](#footnote-ref-97)
98. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku : Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik,* (Jakarta : Buku Kompas, 2009), hal. 22 [↑](#footnote-ref-98)
99. Robert A. Hillman, *The Richness of Contract Law : An Analysis and Critique of Contemporary Theories of Contract Law,* (Berlin : Springer Science+Business Media Dordrecht, 1997), hal. 254 [↑](#footnote-ref-99)
100. Janet Tai Landa, *Trust, Ethnicity, and Identity : Beyond the New Institutional Economics of Ethnic Trading Networks, Contract Law, and Gift-Exchange*, (Michigan : Michigan Publishing, 1995), hal. 67 [↑](#footnote-ref-100)
101. <https://www.law.cornell.edu/ucc/2/2-207> diakses pada tanggal 21 Desember 2017, 09:50 WIB [↑](#footnote-ref-101)
102. <http://dictionary.law.com/Default.aspx?selected=2182> diakses pada tanggal 21 Desember 2017, 10:17 WIB [↑](#footnote-ref-102)
103. Jeffrey Lehman dan SHirelle Phelps, *West’s Encyclopedia of American Law,* (USA : Gale Publisher, 2004), hal. 107 [↑](#footnote-ref-103)
104. Jeannie Paterson, Andrew Robertson, Arlen, *Contract : Cases and Materials,* (Australia : Thomson Reuters, 2012), hal. 27 [↑](#footnote-ref-104)
105. Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum,* (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 2012), hal. 369-370 [↑](#footnote-ref-105)
106. Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Aribitrase Nasional Indonesia dan Internasional,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 87-88 [↑](#footnote-ref-106)
107. <http://www.baniarbitration.org/ina/about.php> diakses pada tanggal 19 Desember 2017, 10:54 WIB [↑](#footnote-ref-107)
108. Frans Hendra Winarta, *op.cit.,* hal. 89-90 [↑](#footnote-ref-108)
109. Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,* (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hal. 49-50 [↑](#footnote-ref-109)
110. Moch Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional,* (Bandung : Penerbit Bandar Maju, 2007), hal. 167 [↑](#footnote-ref-110)
111. Carrie Menkel-Meadow, *Pursuing Settlement in an Adversary Culture : A Tale of Innovation Co-Opted or “The Law of ADR”,* Florida State University Law Review Vol. 19 Issue 1 Year 1991, hal. 3 [↑](#footnote-ref-111)
112. Judith Resnik, *Many Doors? Cloosing Doors? Alternative Dispute Resolution and Adjudication,* The OHIO State Journal on Dispute Resolution Vol. 10 No. 2 Year 1995, hal. 223 [↑](#footnote-ref-112)
113. Carrie Menkel-Meadow, *Regulation of Dispute Resolution in the United States of America : From the Formal to the Informal to the ‘Semi-formal’,* Georgetown University Law Centre 2013, hal. 421 [↑](#footnote-ref-113)
114. <http://icare-indonesia.org/perkembangan-energi-terbarukan-di-eropa-dan-asia-tenggara/> diakses pada tanggal 18 Desember 2017, 07:47 WIB [↑](#footnote-ref-114)
115. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (revisi 2007), Ikatan Akuntan Indonesia, per-1 Juli 2009, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), hal. 16 [↑](#footnote-ref-115)
116. <https://www.djk.esdm.go.id/pdf/Presentasi%20Dirdan%20I.pdf> diakses pada tanggal 18 Desember 2017, 09:54 WIB [↑](#footnote-ref-116)
117. Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law : Asoek Hukum Teknologi Informasi,* (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 150-151 [↑](#footnote-ref-117)
118. Agus Yudha Hernako, *Hukum Perjanjian : Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 268 [↑](#footnote-ref-118)
119. <http://www.bi.go.id/en/moneter/informasi-kurs/referensi-jisdor/Default.aspx> diakses pada tanggal 30 Juni 2017, 12:03 WIB [↑](#footnote-ref-119)
120. Sujana Donandi S. Dan Etty Susilowati, *Arti Penting Perjanjian Tertulis Antara Pemilik dan Pengguna Karya Seni Fotografi Untuk Kepentingan Promosi Komersial,* Jurnal Law Reform Vol. 11 No. 1 Tahun 2015, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 48 [↑](#footnote-ref-120)
121. Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak,* (Jakarta : Visi Media, 2009), hal. 73 [↑](#footnote-ref-121)
122. Albert Thumann dan Eric A. Woodroof, *Energy Project Financing : Resources and Strategies for Success,* (Lilburn : Fairmont Press, 2009), page 93 [↑](#footnote-ref-122)
123. Vashilis Fthenakis dan Hyung Chui Kim, *Land use and electricity generation : A life-cycle analysis,* Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 13 Issue 6-7 2009, hal. 1465 [↑](#footnote-ref-123)
124. <https://www.bpa.gov/power/pgc/wind/ex_c_ppa_2.pdf> diakses pada tanggal 28 Juni 2017, 18:21 WIB [↑](#footnote-ref-124)
125. <http://www.yourdictionary.com/statutory> diakses pada tanggal 18 Desember 2017, 15:03 WIB [↑](#footnote-ref-125)
126. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Loc.Cit.*, hal. 240-241 [↑](#footnote-ref-126)
127. Vollmar, H.F.A., *Loc.Cit.*, hal. 147-148 [↑](#footnote-ref-127)
128. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Loc.Cit.*, hal. 20-21 [↑](#footnote-ref-128)
129. J.M. Van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Loc.Cit.*, hal. 108-109 [↑](#footnote-ref-129)
130. Randy E. Barnett, *Loc.Cit.*, hal. 1-2 [↑](#footnote-ref-130)
131. Hussein Ahmed Tura, *Loc.Cit.*, hal. 74-75 [↑](#footnote-ref-131)
132. Wayne Barnes, *Loc.Cit.*, hal. 1 [↑](#footnote-ref-132)
133. Andrew S. Gold, *Loc.Cit.*, hal. 7-15 [↑](#footnote-ref-133)
134. M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*, hal. 84 [↑](#footnote-ref-134)
135. Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,* (Yogyakarta : UII Press, 2015), hal. 87 [↑](#footnote-ref-135)
136. Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Aribitrase Nasional Indonesia dan Internasional,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hal. 94 [↑](#footnote-ref-136)
137. Ayu Atika Dewi dan Etty Susilowati, *Nasionalisme Penyelesaian Sengketa : Studi Pemberdayaan BANI Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing),* Jurnal Law Reform Vol. 9 No. 2 Tahun 2014, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 24 [↑](#footnote-ref-137)
138. Eko Budi Setiawan, *Analisa Qualitu of Service Voice Over Internet Protocol dengan Protocol H.323 dan Session Initial Protocol,* Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika Vol.1 No. 2 Oktober 2012, UNIKOM Bandung, hal. 1 [↑](#footnote-ref-138)
139. Fadia Fitriyanti, *Harmonisasi Penerapan Asas Ex Aequo Et Bono Dalam Sengketa Bisnis Pada Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah,* (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hal. 171 [↑](#footnote-ref-139)
140. Hizkia Rompas, *Suatu Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase,* Lex Privatum Vol. III No. 4 Oktober 2015, hal. 158 [↑](#footnote-ref-140)
141. Frans Hendra Winarta, op.cit., hal. 111 [↑](#footnote-ref-141)
142. Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional : Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC,* (Jakarta : Penerbit Raih Asa Sukses, 2013), hal. 66 [↑](#footnote-ref-142)
143. Chrisstar Dhini, Novika Maharani, Reza Amarulloh, *Harmonisasi Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation Commission on International Trade Law Terhadap Kontrak Dagang Internasional,* Jurnal Privat Law Vol. III No. 2 Juli-Desember 2015, Universitas Sebelas Maret, Solo, hal. 30 [↑](#footnote-ref-143)
144. Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis,* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2011), hal. 130-131 [↑](#footnote-ref-144)
145. <http://apps.americanbar.org/litigation/committees/adr/articles/spring2014-0614-federal-arbitration-act.html> diakses pada tanggal 21 Desember 2017, 16:10 WIB [↑](#footnote-ref-145)
146. <https://www.nwcouncil.org/history/NorthwestPowerAct> diakses pada tanggal 21 Desember 2017, 16:15 WIB [↑](#footnote-ref-146)
147. <https://www.cpradr.org/about> diakses pada tanggal 21 Desember 2017, 16:23 WIB [↑](#footnote-ref-147)
148. <https://www.cpradr.org/resource-center/rules/international-other/arbitration/international-administered-arbitration-rules> diakses pada tanggal 21 Desember 2017, 16:35 WIB [↑](#footnote-ref-148)
149. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Loc.Cit.*,, hal. 17 [↑](#footnote-ref-149)
150. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Loc.Cit.*, hal. 153-154 [↑](#footnote-ref-150)
151. Imam Taufik, *Loc.Cit.*, hal. 155-158 [↑](#footnote-ref-151)
152. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Loc.Cit.*, hal. 4-6 [↑](#footnote-ref-152)
153. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr., *Loc.Cit.*, hal. 9-11 [↑](#footnote-ref-153)
154. T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum : Sebuah Bunga Rampai,* (Jakarta : Yayasan Obor, 1993), hal. 210-212 [↑](#footnote-ref-154)